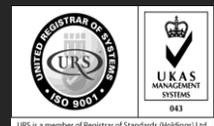




KEBERHASILAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2011/2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
2013**



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



KEBERHASILAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
TAHUN 2011/2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
2013

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Tahun
2011/2012/Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan
Statistik. – Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2013
xii, 127 hal

ISSN 0216-8294

Ketua:
Siti Sofiah

Tim Penulis
1. Ida Kintamani
2. Wahono
3. Abdul Hakim

Penyunting:
Ida Kintamani

©Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku “Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan, Tahun 2011/2012” ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ketercapaian program pembangunan pendidikan pada tahun pelajaran 2011/2012. Untuk mengukur ketercapaian program tersebut maka digunakan misi pendidikan 5K dengan 20 jenis indikator. Masing-masing misi pendidikan memiliki nilai tersendiri sehingga dari kelima misi tersebut dihasilkan kinerja pendidikan pada tingkat provinsi dan nasional. Misi K-1 adalah ketersediaan layanan pendidikan, misi K-2 adalah keterjangkauan layanan pendidikan, misi K-3 adalah kualitas layanan pendidikan, misi K-4 adalah kesetaraan memperoleh layanan pendidikan, dan misi K-5 adalah kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Misi pendidikan K-1 menggunakan lima indikator, yaitu 1) rasio siswa/sekolah (R-S/Sek), 2) rasio siswa/kelas (R-S/K); 3) rasio kelas/ruang kelas (R-K/RK), 4) persentase perpustakaan (%Perpus), dan 5) persentase laboratorium (%Lab). Misi pendidikan K-2 menggunakan dua indikator, yaitu tingkat pelayanan sekolah (TPS) dan daerah terjangkau (DT). Misi pendidikan K-3 menggunakan enam indikator, yaitu 1) persentase guru layak (%GL), 2) rasio siswa/guru (R-S/G), 3) angka lulusan (AL), 4) angka mengulang (AU), 5) angka putus sekolah (APS), dan 6) persentase ruang kelas baik (%RKB). Misi pendidikan K-4 menggunakan tiga indikator, yaitu 1) perbedaan gender (PG) APK, 2) indeks paritas gender (IPG) APK, dan 3) persentase siswa swasta (%S-Swt). Misi pendidikan K-5 menggunakan empat indikator, yaitu 1) angka partisipasi kasar (APK) atau angka partisipasi murni (APM), 2) angka masukan kasar (AMK) atau angka melanjutkan (AM), 3) angka bertahan tingkat V SD (AB5 SD) atau angka bertahan (AB), dan 4) rata-rata lama belajar (RLB).

Metode bahasan yang digunakan adalah studi literatur. Studi ini dilaksanakan dengan mempelajari literatur yang ada seperti statistik persekolahan, statistik madrasah, dan data nonpendidikan untuk dilakukan analisis dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi dilengkapi dengan perhitungan indikator pendidikan dan analisis indikator sehingga dihasilkan kinerja pendidikan atau keberhasilan program pembangunan pendidikan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dilengkapi dengan tabel dan penjelasan cara membaca indikator.

Agar dapat dihitung nilai masing-masing misi pendidikan maka digunakan standar tertentu seperti yang disajikan pada Tabel 1 dan jenis kinerja pendidikan masing-masing misi disajikan pada Tabel 2.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program aplikasi yang telah disusun dan telah dilengkapi dengan standar untuk melakukan

konversi untuk masing-masing indikator (Tabel 1) dan jenis kinerja berdasarkan kategori wajar Dikdas 9 tahun (Tabel 2) setiap misi sehingga dapat dengan segera diketahui provinsi mana yang memiliki nilai yang terbaik dan mana yang terburuk. Nilai 100 berarti nilai yang paling bagus dan nilai 0 berarti nilai yang paling buruk.

Tabel 1
Standar untuk Melakukan Konversi Masing-masing Indikator

Misi	No.	Jenis Indikator	Satuan	TK	SD	SMP	SM	PT
Misi K-1	1	R-S/Sek, R-M/Lbg	Siswa	50	240	360	480	1,503
	2	Rasio S/K	Siswa	19	28	32	32	-
	3	Rasio K/RK	Kelas	1	1	1	1	-
	4	% Perpustakaan	Persentase	-	-	100.00	100.00	-
	5	% Laboratorium	Persentase	-	-	100.00	100.00	-
Misi K-2	1	TPS	Siswa	341	45	88	67	-
	2	DT	Siswa	-	166	364	576	6,231
Misi K-3	1	%GL, %DL	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2	R-S/G, R-M/D	Siswa	11.00	17.00	15.00	12.00	30.00
	3	AL	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	4	AU	Persentase	-	0.00	0.00	0.00	-
	5	APS	Persentase	-	0.00	0.00	0.00	-
	6	%Rkb	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	-
Misi K-4	1	PG APK	Persentase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	IPG APK	Indeks	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3	%S-Swt	Persentase	97.40	9.20	23.90	47.40	62.14
Misi K-5	1	APK, APM	Persentase	35.54	115.00	100.00	100.00	100.00
	2	AMK, AM	Persentase	27.07	55.00	100.00	100.00	100.00
	3	AB5 SD,AB	Persentase	-	94.00	100.00	100.00	-
	4	RLB	Tahun	-	6.00	3.00	3.00	-

Tabel 2
Jenis Kinerja Berdasarkan Standar Ideal

No.	Jenis Kinerja	Nilai
1	Pariipurna	91-100
2	Utama	81-90
3	Madya	76-80
4	Pratama	71-75
5	Kurang	< = 70

Sesuai dengan misi pendidikan 5K maka hasil studi juga dirinci menurut misi pendidikan. Selain itu, dihasilkan pula kinerja pendidikan tiap provinsi dan jenjang pendidikan. Berdasarkan kinerja layanan pendidikan yang terdapat pada Tabel 1 yang terdiri dari TK, SD, SMP, SM, dan PT maka rata-rata nasional sebesar 89,06 dengan rincian TK sebesar 92,07, SD sebesar 92,91, SMP sebesar 92,26, SM sebesar 90,54, dan PT sebesar 77,51.

Kinerja ketersediaan layanan pendidikan terbesar pada PT sebesar 100,00 dan terkecil pada SM sebesar 73,38 sehingga rata-rata ketersediaan layanan sebesar 92,07. Kinerja keterjangkauan layanan pendidikan terbesar pada PT sebesar 100,00 dan terkecil pada TK sebesar 98,76 sehingga rata-

rata keterjangkauan layanan sebesar 92,91. Kinerja kualitas layanan pendidikan terbesar pada SM sebesar 95,52 dan terkecil pada PT sebesar 61,06 sehingga rata-rata kualitas layanan sebesar 92,26. Kinerja kesetaraan layanan pendidikan terbesar pada SD sebesar 99,85 dan terkecil pada PT sebesar 97,69 sehingga rata-rata kesetaraan layanan sebesar 90,54. Kinerja kepastian layanan pendidikan terbesar pada TK sebesar 100,00 dan terkecil pada PT sebesar 37,76 sehingga rata-rata kepastian layanan sebesar 77,51.

Tabel 1
Rangkuman Kinerja Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011/2012

No	Jenjang Pendidikan	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	Rata2
1	TK	98.47	98.76	64.03	99.09	100.00	92.07
2	SD	86.88	95.42	87.36	99.85	95.06	92.91
3	SMP	74.58	97.85	94.40	99.81	94.67	92.26
4	SM	73.38	93.03	95.52	99.33	91.46	90.54
5	PT	100.00	91.05	61.06	97.69	37.76	77.51
	Rata	92.07	92.91	92.26	90.54	77.51	89.06

Berdasarkan kinerja ketersediaan layanan pendidikan tiap provinsi yang terdiri dari TK, SD, SMP, SM, dan PT maka rata-rata nasional sebesar 86,66 yang berarti pencapaian hanya sekitar 87% dengan nilai terbesar pada provinsi DKI Jakarta sebesar 91,81 dan terkecil pada provinsi Kalimantan Selatan sebesar 68,60. Kinerja ketersediaan layanan pendidikan menurut jenjang pendidikan terbesar pada PT sebesar 100,00 dan terkecil pada SM sebesar 73,38.

Berdasarkan kinerja keterjangkauan layanan pendidikan tiap provinsi yang terdiri dari TK, SD, SMP, SM, dan PT maka rata-rata nasional sebesar 95,22 yang berarti pencapaian hanya sekitar 95% dengan nilai terbesar pada provinsi DI Yogyakarta sebesar 98,38 dan terkecil pada provinsi Jawa Barat sebesar 75,41. Kinerja keterjangkauan layanan pendidikan menurut jenjang pendidikan terbesar pada TK sebesar 98,76 dan terkecil pada PT sebesar 91,05.

Berdasarkan kinerja kualitas layanan pendidikan tiap provinsi yang terdiri dari TK, SD, SMP, SM, dan PT maka rata-rata nasional sebesar 80,47 yang berarti pencapaian hanya sekitar 80% dengan nilai terbesar pada provinsi DI Yogyakarta sebesar 83,36 dan terkecil pada provinsi Sulawesi Utara sebesar 73,99. Kinerja kualitas layanan pendidikan menurut jenjang pendidikan terbesar pada SM sebesar 95,52 dan terkecil pada PT sebesar 61,06.

Berdasarkan kinerja kesetaraan layanan pendidikan tiap provinsi yang terdiri dari TK, SD, SMP, SM, dan PT maka rata-rata nasional sebesar 99,15 yang berarti pencapaian mencapai sekitar 99% dengan nilai terbesar pada provinsi DI Yogyakarta sebesar 98,05 dan terkecil pada provinsi Gorontalo

sebesar 77,93. Kinerja kesetaraan layanan pendidikan menurut jenjang pendidikan terbesar pada SD sebesar 99,85 dan terkecil pada PT sebesar 97,69.

Berdasarkan kinerja kepastian memperoleh layanan pendidikan tiap provinsi yang terdiri dari TK, SD, SMP, SM, dan PT maka rata-rata nasional sebesar 83,79 yang berarti pencapaian hanya sekitar 84% dengan nilai terbesar pada provinsi DKI Jakarta sebesar 98,21 dan terkecil pada provinsi Kalimantan Barat sebesar 66,58. Kinerja kepastian memperoleh layanan pendidikan menurut jenjang pendidikan terbesar pada TK sebesar 100,00 dan terkecil pada PT sebesar 37,76.

Dengan menggunakan misi pendidikan 5K maka layanan pendidikan tiap provinsi yang terdiri dari TK, SD, SMP, SM, dan PT maka rata-rata nasional sebesar 89,06 yang berarti pencapaian sekitar 89% dengan nilai terbesar pada provinsi DI Yogyakarta sebesar 92,89 dan terkecil pada provinsi Kalimantan Barat sebesar 80,72. Kinerja layanan pendidikan jenjang pendidikan terbesar pada SD sebesar 92,91 dan terkecil pada PT sebesar 77,51.

Bila dilihat berdasarkan peringkat maka kinerja layanan pendidikan lima besar pada Provinsi DI Yogyakarta, kemudian DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Timur. Sebaliknya, lima terkecil terdapat pada Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Banten, dan Kalimantan Barat.

KATA PENGANTAR

Buku “Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan, Tahun 2011/2012” ini merupakan hasil pendayagunaan data dan statistik pendidikan yang mengkaji indikator pendidikan yang telah dikembangkan selama ini. Buku ini disusun dalam upaya memberikan gambaran keberhasilan program pembangunan pendidikan yang disajikan menurut misi pendidikan 5K, yaitu 1) misi K-1 ketersediaan layanan pendidikan, 2) misi K-2 keterjangkauan layanan pendidikan, 3) misi K-3 kualitas layanan pendidikan, 4) misi K-4 kesetaraan memperoleh layanan pendidikan, dan 5) misi K-5 kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Misi K-1 menggunakan lima jenis indikator, K-2 menggunakan dua jenis indikator, K-3 menggunakan enam jenis indikator, K-4 menggunakan tiga jenis indikator, dan K-5 menggunakan empat jenis indikator. Berdasarkan indikator misi pendidikan maka dihitung kinerja pendidikan atau keberhasilan program pembangunan pendidikan berdasarkan rata-rata kelima misi pendidikan tersebut.

Indikator pendidikan yang digunakan dalam misi pendidikan 5K memiliki satuan yang berbeda sehingga perlu dilakukan konversi menggunakan standar tertentu sebagai komposit indikator. Dengan menggunakan standar tersebut maka dihasilkan nilai maksimal 100 dan minimal 0. Rata-rata dari hasil ke-20 jenis indikator tersebut dijadikan ukuran untuk menentukan keberhasilan program pembangunan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh komposit indikator kelima misi pendidikan.

Sumber data yang digunakan dalam menyusun indikator pendidikan ini ada empat jenis, yaitu 1) data statistik TK sampai PT yang diterbitkan oleh PDSP selama 2 tahun berurutan, 2) data statistik Madrasah yang diterbitkan oleh Kemenag, 3) data nonpendidikan terutama penduduk usia sekolah, dan 4) Permendiknas atau UU terkait dengan pendidikan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2013

Pt. Kepala,

Dr.-Ing.Ir. Yul Yunazwin Nazaruddin
NIP 19570715 1987031001

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN/TABEL	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Manfaat Studi	7
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	8
A. Program Pembangunan Pendidikan	8
B. Misi Pendidikan	9
C. Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi 5K	10
D. Pengukuran Kinerja Program Pembangunan Pendidikan	16
BAB III: METODOLOGI	20
A. Metode	20
B. Misi K-1: Ketersediaan Layanan Pendidikan	21
C. Misi K-2: Keterjangkauan Layanan Pendidikan	26
D. Misi K-3: Kualitas Layanan Pendidikan	29
E. Misi K-4: Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan	34
F. Misi K-5: Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan	38
G. Kinerja Program Pembangunan Pendidikan	43
BAB IV: HASIL DAN BAHASAN	44
A. Misi K-1: Ketersediaan Layanan Pendidikan	44
B. Misi K-2: Keterjangkauan Layanan Pendidikan	59
C. Misi K-3: Kualitas Layanan Pendidikan	68
D. Misi K-4: Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan	84
E. Misi K-5: Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan	97
F. Kinerja Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan	110
G. Perkembangan Kinerja Pendidikan	118

	Halaman
BAB V: PENUTUP	121
A. Simpulan	121
B. Saran	124
C. Rekomendasi	124
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR BAGAN/TABEL

		Halaman
BAB II		
Bagan 2.1	Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi Pendidikan 5K	17
Bagan 2.2	Indikator Kinerja Program Pembangunan Pendidikan	18
BAB III		
Tabel 3.1	Kategori Pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan Menggunakan Norma Nasional	20
Tabel 3.2	Kategori Indikator Pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan Menggunakan Standar Ideal	20
Tabel 3.3	Jenis Indikator, Konversi Nilai Berdasarkan Standar Ideal, dan Nilai Ketersediaan Layanan Pendidikan	25
Tabel 3.4	Jenis Indikator, Konversi Nilai Berdasarkan Standar, dan Nilai Keterjangkauan Layanan Pendidikan	29
Tabel 3.5	Jenis Indikator, Konversi Nilai Berdasarkan Standar, dan Nilai Kualitas Layanan Pendidikan	34
Tabel 3.6	Jenis Indikator, Konversi Nilai Berdasarkan Standar, dan Nilai Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan	37
Tabel 3.7	Jenis Indikator, Konversi Nilai Berdasarkan Standar, dan Nilai Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan	42
BAB IV		
Tabel 4.1	Perbandingan Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan	44
Tabel 4.2	Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi	46
Tabel 4.3	Kinerja Ketersediaan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi	47
Tabel 4.4	Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi	48
Tabel 4.5	Ketersediaan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi	49
Tabel 4.6	Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi	51
Tabel 4.7	Ketersediaan Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi	53
Tabel 4.8	Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi	54
Tabel 4.9	Ketersediaan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi	56
Tabel 4.10	Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi	57
Tabel 4.11	Ketersediaan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi	57
Tabel 4.12	Kinerja Ketersediaan Layanan Pendidikan Tiap Provinsi	58
Tabel 4.13	Perbandingan Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan	59

Tabel 4.14	Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi	60
Tabel 4.15	Keterjangkauan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi	60
Tabel 4.16	Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi	61
Tabel 4.17	Keterjangkauan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi	62
Tabel 4.18	Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi	63
Tabel 4.19	Keterjangkauan Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi	64
Tabel 4.20	Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi	65
Tabel 4.21	Keterjangkauan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi	65
Tabel 4.22	Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi	66
Tabel 4.23	Keterjangkauan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi	67
Tabel 4.24	Kinerja Keterjangkauan Layanan Pendidikan Tiap Provinsi	68
Tabel 4.25	Perbandingan Indikator Kualitas Layanan Pendidikan	69
Tabel 4.26	Indikator Kualitas Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi	70
Tabel 4.27	Kualitas Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi	71
Tabel 4.28	Indikator Kualitas Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi	73
Tabel 4.29	Kualitas Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi	75
Tabel 4.30	Indikator Kualitas Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi	76
Tabel 4.31	Kualitas Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi	78
Tabel 4.32	Indikator Kualitas Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi	79
Tabel 4.33	Kinerja Kualitas Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi	81
Tabel 4.34	Indikator Kualitas Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi	82
Tabel 4.35	Kinerja Kualitas Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi	83
Tabel 4.36	Kinerja Kualitas Layanan Pendidikan Tiap Provinsi	84
Tabel 4.37	Perbandingan Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan	85
Tabel 4.38	Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi	86
Tabel 4.39	Kesetaraan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi	87
Tabel 4.40	Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi	88
Tabel 4.41	Kesetaraan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi	89
Tabel 4.42	Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi	90
Tabel 4.43	Kesetaraan Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi	91
Tabel 4.44	Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi	92

	Halaman	
Tabel 4.45	Kesetaraan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi	93
Tabel 4.46	Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi	94
Tabel 4.47	Kesetaraan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi	95
Tabel 4.48	Kinerja Kesetaraan Layanan Pendidikan Tiap Provinsi	96
Tabel 4.49	Perbandingan Indikator Kepastian Layanan Pendidikan	97
Tabel 4.50	Indikator Kepastian Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi	98
Tabel 4.51	Kepastian Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi	99
Tabel 4.52	Indikator Kepastian Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi	100
Tabel 4.53	Kepastian Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi	101
Tabel 4.54	Indikator Kepastian Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi	103
Tabel 4.55	Kepastian Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi	104
Tabel 4.56	Indikator Kepastian Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi	105
Tabel 4.57	Kepastian Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi	107
Tabel 4.58	Indikator Kepastian Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi	108
Tabel 4.59	Kinerja Kepastian Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi	109
Tabel 4.60	Kinerja Kepastian Layanan Pendidikan Tiap Provinsi	110
Tabel 4.61	Kinerja Pendidikan TK Tiap Provinsi	111
Tabel 4.62	Kinerja Pendidikan SD Tiap Provinsi	112
Tabel 4.63	Kinerja Pendidikan SMP Tiap Provinsi	113
Tabel 4.64	Kinerja Pendidikan SM Tiap Provinsi	114
Tabel 4.65	Kinerja Pendidikan PT Tiap Provinsi	115
Tabel 4.66	Kinerja Pendidikan Tiap Provinsi	116
Tabel 4.67	Peringkat Kinerja Pendidikan Tiap Provinsi	117
Tabel 4.68	Perkembangan Kinerja Pendidikan Tiap Provinsi	119
Tabel 4.69	Perkembangan Peringkat Kinerja Pendidikan Tiap Provinsi	120
BAB V		
Tabel 5.1	Peringkat Kinerja Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan	122

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pembangunan pendidikan sampai saat ini terus diupayakan, bahkan pemerintah mempunyai komitmen untuk mendukung program-program pembangunan pendidikan tersebut dengan mengupayakan peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBN dan APBD mulai tahun 2010. Pembangunan pendidikan dapat dilihat secara nyata pada penyelenggaraan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, bahkan pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal. Penyediaan guru/dosen terus diupayakan agar mencukupi, pengadaan sarana prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah seperti penyediaan gedung, rehabilitasi sekolah, dan penyempurnaan kurikulum adalah bukti lain pendidikan telah, sedang dan akan selalu dikembangkan.

Proses pendidikan setidaknya bertumpu pada empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh Unesco, yaitu 1) *learning to know*, 2) *learning to do*, 3) *learning to be*, dan 4) *learning to live together* yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar, yaitu 1) membaca, 2) menulis, 3) mendengar, 4) menutur, 5) menghitung, 6) meneliti, 7) menghafal, dan 8) menghayal.

Dalam kaitan dengan pendidikan, penyusunan kebijakan pendidikan, pengambilan keputusan tentang pendidikan, dan perencanaan pendidikan seharusnya ditunjang dengan data dan informasi. Dengan adanya data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan reliabel akan dapat diambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga kebijakan yang diambil mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Demikian juga untuk perencanaan, penggunaan data dan informasi yang benar akan menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak akan terjadi adanya kesalahan penempatan sekolah, kesalahan alokasi guru, kesalahan distribusi sarana pendidikan, dan lainnya. Oleh karena itu, data dan informasi tersebut hendaknya dijadikan bahan acuan oleh para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan baik dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi maupun penyelenggaraan pendidikan.

Dalam kaitan dengan rencana strategi kebijakan Kemdikbud yang sedang digalakkan maka kebijakan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Strategi Kemdiknas dalam rangka Pembangunan Pendidikan 2010-2014 yang terdiri dari tiga pilarkebijakan dan dijabarkan dalam misi pendidikan

5K, yaitu 1) K-1 adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, 2) K-2 adalah memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, 3) K-3 adalah meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan, 4) K-4 mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan 5) K-5 adalah menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 1, Tahun 2012 tentang Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan. Dalam melaksanakan tugas PDSP meyelenggarakan fungsi 1) penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik pendidikan; 2) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan; 3) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik pendidikan; dan 4) pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan.

Mengolah data dan menyusun informasi ini terutama ditujukan untuk memberi kemudahan kepada para penyusun kebijakan dan pengambil keputusan terutama di lingkungan Kemdikbud dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan pendidikan. Perhatian utama dipusatkan pada visi Kemdiknas 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional yang mencerminkan kuatnya keinginan Pemerintah untuk melakukan misi pendidikan 5K.

Dalam rangka perumusan kebijakan, khususnya di bidang pendidikan, informasi mengenai jumlah sekolah, siswa baru, siswa, guru, lulusan, kelas, ruang kelas, dan data pendidikan lainnya sangat diperlukan untuk menunjang upaya perencanaan pembangunan sistem pendidikan dan penilaian perkembangannya. Di samping itu, dalam perkembangan selanjutnya penyediaan data dan informasi tidak hanya terbatas pada data pokok melainkan juga rinciannya. Karena data pendidikan tidak hanya untuk kepentingan di dalam negeri melainkan juga untuk kepentingan internasional dan dalam studi perbandingan antarnegara sebagai wahana memperluas wawasan dalam melaksanakan analisis sistem pendidikan nasional. Pemahaman akuntabilitas kinerja pendidikan di luar negeri akan memacu pendidikan nasional untuk mengikuti perkembangan pendidikan dalam kancah internasional dalam rangka globalisasi khususnya globalisasi pendidikan.

Dengan keberhasilan program pembangunan pendidikan selama ini maka kebutuhan akan peningkatan mutu data dan bentuk informasi pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini mengakibatkan makin banyaknya warganegara terdidik, masyarakat makin kritis, dan perhatian terhadap pendidikan makin baik dalam hal pelaksanaan misi pendidikan 5K.

Untuk melihat kinerja atau keberhasilan program pembangunan pendidikan dinyatakan dalam berbagai indikator pendidikan. Oleh karena

itu, diperlukan penyediaan indikator-indikator pendidikan yang sesuai dengan misi pendidikan 5K, baik secara makro maupun mikro. Walaupun demikian, model indikator pendidikan 5K yang disajikan pada saat ini dibatasi pada data agregat nasional dan provinsi dengan maksud untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional dan provinsi secara makro. Selain itu, indikator pendidikan tersebut dapat memenuhi kebutuhan perbandingan antarprovinsi dan antarnegara. Indikator pendidikan juga merupakan salah satu dari sejumlah faktor yang sangat penting dalam upaya mendeteksi tercapainya cita-cita sistem pendidikan nasional. Indikator pendidikan ini dapat digunakan sebagai peringatan awal terhadap permasalahan pendidikan yang ada di lapangan.

Indikator adalah suatu alat yang memiliki potensi untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hubungan antara berbagai aspek pendidikan yang berbeda di dalam sistem pendidikan dan antara beberapa aspek tertentu di dalam sistem pendidikan dengan sistem sosial, ekonomi, dan budaya lingkungan hidup manusia. Potensi itu akan menjadi kekuatan yang nyata bila indikator itu disusun dan disajikan secara sistematis dan mudah serta menarik mengenai hubungan-hubungan tersebut sehingga mudah dipahami oleh setiap pengelola pendidikan dan para *stakeholders*.

Menurut "*World Education Report*", indikator yang baik mempunyai lima karakteristik, yaitu 1) relevan dengan kebijakan, 2) mudah digunakan, 3) diambil dari suatu variabel, 4) secara teknis valid, reliabel dan dapat dibandingkan, dan 5) mudah diukur dan menggunakan dana yang sesuai. Pertama, relevan dengan kebijakan, artinya mampu memberikan keterangan secara jelas dan tidak memiliki multiarti terhadap isu kebijakan kunci. Kedua, mudah digunakan, artinya mudah dipahami atau dalam bentuk angka-angka yang sederhana sehingga semua pengelola pendidikan di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dan sampai satuan pendidikan memahaminya. Ketiga, diambil dari suatu variabel (misalnya siswa/mahasiswa) sehingga dapat dilakukan interpretasi di dalam konteks variabel lain (misalnya kependudukan) atau satu indikator dapat digunakan bersama-sama dengan indikator lain sehingga menghasilkan indikator yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi pendidikan melainkan juga kondisi nonpendidikan. Keempat, secara teknis valid, reliabel, dan dapat dibandingkan, artinya data yang dihasilkan selalu sesuai dengan kebutuhan, tepat waktu ketika diperlukan dan dapat dibandingkan dengan data lainnya sehingga menghasilkan indikator yang rasional. Kelima, mudah diukur dan penggunaan dana yang sesuai, artinya statistik yang diperoleh sebagai hasil penurunan beberapa indikator mudah diukur dalam kurun waktu yang tersedia dan dengan biaya yang terjangkau.

Pada kenyataannya, sampai saat ini belum semua pengelola pendidikan yang berada di jajaran Kemdikbud maupun pengelola pendidikan di Dinas

Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memahami apa yang dimaksud dengan indikator pendidikan dan apa kaitannya dengan akuntabilitas kinerja pendidikan. Oleh karena itu, penyusunan dan kajian indikator pendidikan untuk akuntabilitas kinerja program pembangunan pendidikan ini menjadi salah satu cara agar pengelola pendidikan dapat memahami berbagai jenis indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk menilai program pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah:

1. Bagaimana indikator pendidikan dari misi K-1 meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dapat diterapkan dalam pembangunan pendidikan?
2. Bagaimana indikator pendidikan dari misi K-2 memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dapat diterapkan dalam pembangunan pendidikan?
3. Bagaimana indikator pendidikan dari misi K-3 meningkatkan kualitas layanan pendidikan dapat diterapkan dalam pembangunan pendidikan?
4. Bagaimana indikator pendidikan dari misi K-4 mewujudkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan dapat diterapkan dalam pembangunan pendidikan?
5. Bagaimana indikator pendidikan dari misi K-5 menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan dapat diterapkan dalam pembangunan pendidikan?
6. Bagaimana kinerja program pembangunan pendidikan yang digambarkan dari indikator misi pendidikan 5K?

C. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang timbul, terdapat dua tujuan, yaitu 1) tujuan umum dan 2) tujuan khusus. Tujuan umum dilakukannya kajian keberhasilan program pembangunan pendidikan melalui indikator pendidikan adalah untuk melihat kinerja pembangunan pendidikan yang diukur menggunakan tiga pilar kebijakan dan dijabarkan dalam misi pendidikan 5K. Dengan kata lain, tujuan umum studi yang berjudul “Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan” ini merupakan kajian kinerja program pembangunan pendidikan, menjelaskan manfaat serta keterbatasan masing-masing indikator pendidikan berdasarkan misi pendidikan 5K. Indikator pendidikan ini dapat dimanfaatkan secara lebih

optimal (dilihat dari keakuratan, ketepatan, serta kecepatannya) oleh para pengambil keputusan serta para penentu kebijakan di bidang pendidikan.

Tujuan khusus kajian keberhasilan program pembangunan pendidikan tahun pelajaran 2011/2012 tiap provinsi dan nasional serta jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SM, dan PT adalah:

1. Mengkaji sejauh mana misi K-1 ketersediaan layanan pendidikan telah tercapai.
2. Mengkaji sejauh mana misi K-2 keterjangkauan layanan pendidikan telah tercapai.
3. Mengkaji sejauh mana misi K-3 kualitas dan relevansi layanan pendidikan telah tercapai.
4. Mengkaji sejauh mana misi K-4 kesetaraan layanan pendidikan telah tercapai.
5. Mengkaji sejauh mana misi K-5 kepastian memperoleh layanan pendidikan telah tercapai.
6. Mengkaji sejauh mana kinerja program pendidikan yang merupakan komposit misi pendidikan 5K telah tercapai.

D. Ruang Lingkup

Fokus utama kajian program pembangunan pendidikan adalah menghasilkan indikator pendidikan yang berasal dari misi pendidikan 5K, yaitu 1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, 2) memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, 3) meningkatkan kualitas layanan pendidikan, 4) mewujudkan kesetaraan layanan pendidikan, 5) kepastian memperoleh layanan pendidikan, dan 6) ketercapaian kinerja pendidikan berdasarkan misi pendidikan 5K.

Penjelasan kajian pertama tentang indikator sebagai ukuran ketersediaan layanan pendidikan adalah dengan menggunakan indikator pendidikan tertentu sehingga diketahui sejauh mana ketersediaan layanan pendidikan telah tercapai. Penjelasan kedua tentang indikator sebagai ukuran keterjangkauan layanan adalah dengan menggunakan indikator pendidikan tertentu sehingga diketahui sejauh mana keterjangkauan layanan pendidikan. Penjelasan kajian ketiga tentang indikator pendidikan sebagai ukuran kualitas layanan pendidikan adalah dengan menggunakan indikator pendidikan tertentu sehingga diketahui sejauh mana kualitas layanan pendidikan telah tercapai. Penjelasan kajian keempat tentang indikator pendidikan sebagai ukuran kesetaraan layanan pendidikan adalah dengan menggunakan indikator pendidikan tertentu sehingga diketahui sejauh mana kesetaraan layanan pendidikan telah tercapai. Penjelasan kajian kelima tentang indikator pendidikan sebagai ukuran kepastian memperoleh layanan pendidikan adalah dengan menggunakan indikator

pendidikan tertentu sehingga diketahui sejauh kepastian layanan pendidikan telah tercapai.

Kajian indikator program pembangunan pendidikan menggunakan indikator misi K-1, indikator misi K-2, indikator misi K-3, indikator misi K-4, dan indikator misi K-5 kemudian diambil rata-rata dari kelima misi pendidikan sebagai kinerja program pembangunan pendidikan. Selain itu, karena keterbatasan data yang dimiliki maka indikator pendidikan yang disusun hanya pada indikator yang tersedia dan dianggap relevan untuk menggambarkan kondisi suatu daerah.

Untuk jenis satuan pendidikan, kajian dilakukan pada TK, SD, SMP, SM dan PT, kecuali untuk indikator angka partisipasi kasar/murni termasuk MI, MTs, MA, PTAI di lingkungan Kementerian Agama (Kemendiknas). Oleh karena itu, tidak semua indikator pendidikan dapat disusun untuk TK, SD dan MI, SMP dan MTs, dan SM dan MA serta PT dan PTAI.

E. Manfaat Studi

Kajian terhadap program pembangunan pendidikan ini memberikan informasi tentang keberhasilan program Pendidikan di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Namun, pada buku ini hanya dijabarkan untuk tingkat provinsi dan nasional secara makro. Oleh karena itu, kajian ini sangat bermanfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota agar dapat diketahui seberapa jauh ketercapaian misi pendidikan 5K.

1. Bagi pemerintah pusat:
 - a. Dapat mengetahui bagaimana kesenjangan antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota dalam pencapaian kinerja pendidikan menggunakan ukuran misi pendidikan 5K.
 - b. Dapat mengetahui misi pendidikan mana yang belum dapat dicapai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - c. Dapat digunakan sebagai alokasi pengadaan atau rehabilitasi yang terkait dengan prasarana pendidikan pada tingkat nasional.
 - d. Dapat digunakan sebagai bahan kebutuhan sumber daya manusia pendidikan atau tambahan yang diperlukan pada tingkat nasional.
 - e. Dapat sebagai bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tingkat nasional.
2. Bagi pemerintah provinsi:
 - a. Dapat mengetahui bagaimana kesenjangan antarkabupaten/kota dalam pencapaian kinerja pendidikan menggunakan ukuran misi pendidikan 5K.

- b. Dapat mengetahui misi pendidikan yang mana yang belum dapat dicapai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - c. Dapat digunakan sebagai alokasi pengadaan atau rehabilitasi yang terkait dengan prasarana dan sarana pendidikan pada tingkat provinsi.
 - d. Dapat digunakan sebagai bahan kebutuhan sumber daya manusia pendidikan atau tambahan yang diperlukan pada tingkat provinsi.
 - e. Dapat sebagai bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tingkat provinsi.
3. Bagi pemerintah kabupaten/kota:
- a. Dapat mengetahui misi pendidikan mana yang belum dapat dicapai oleh kabupaten/kota.
 - b. Dapat digunakan sebagai alokasi pengadaan atau rehabilitasi yang terkait dengan prasarana dan sarana pendidikan pada tingkat kabupaten/kota.
 - c. Dapat digunakan sebagai bahan kebutuhan sumber daya manusia pendidikan atau tambahan yang diperlukan pada tingkat kabupaten/kota.
 - d. Dapat sebagai bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tingkat kabupaten/kota.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Program Pembangunan Pendidikan

Program pembangunan pendidikan yang dimaksud adalah semua program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendidikan. Sesuai dengan misi pendidikan 5K maka layanan pendidikan disajikan berikut ini.

Tersedia dan terjangkau layanan TK bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi dan kabupaten/kota. Penyediaan layanan pendidikan TK adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana, rehabilitasi sarana dan prasarana, penyelenggaraan festival dan kompetisi, pembinaan manajemen berbasis sekolah, pembinaan gugus, dan olahraga pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana TK adalah untuk meningkatkan sistem pembelajaran berkualitas. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan TK. Kualitas layanan TK melalui penyediaan pendidik berkompeten melalui perencanaan kebutuhan guru, pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan guru, pengembangan karier guru, peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan guru, dan monitoring dan evaluasi kinerja guru.

Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi dan kabupaten/kota. Penjaminan kepastian layanan pendidikan SD melalui penyediaan sarana dan prasarana, rehabilitasi sarana dan prasarana, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), penyelenggaraan festival dan kompetisi, pembinaan manajemen berbasis sekolah (MBS), pembinaan gugus, dan olahraga pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana SD adalah untuk meningkatkan sistem pembelajaran berkualitas. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SD. Kualitas layanan SD melalui penyediaan pendidik yang berkompeten melalui perencanaan kebutuhan guru, pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan guru, pengembangan karier guru, peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan guru, dan monitoring dan evaluasi kinerja guru.

Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi dan kabupaten/kota. Penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP melalui penyediaan sarana dan prasarana, rehabilitasi sarana dan prasarana, KTSP, penyelenggaraan festival dan kompetisi, pembinaan MBS, pembinaan gugus, dan olahraga pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana SMP adalah untuk meningkatkan sistem pembelajaran berkualitas. Penyediaan subsidi untuk

meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMP melalui bantuan operasional sekolah (BOS) dan beasiswa. Kualitas layanan SMP melalui penyediaan pendidik yang berkompeten melalui perencanaan kebutuhan guru, pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan guru, pengembangan karier guru, peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan guru, dan monitoring dan evaluasi kinerja guru.

Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi dan kabupaten/kota. Penyediaan dan peningkatan layanan SMA dan SMK melalui beasiswa, penyediaan sarana dan prasarana, rehabilitasi sarana dan prasarana, bantuan operasional manajemen mutu (BOMM), KTSP, penyelenggaraan festival dan kompetensi, pembinaan MBS, dan olahraga pendidikan. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK untuk penerapan sistem pembelajaran SMA/SMK berkualitas. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMK berkualitas. Kualitas layanan SMA/SMK melalui penyediaan pendidik yang berkompeten melalui perencanaan kebutuhan guru, pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan guru, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SMA/SMK, pengembangan karier guru, peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan guru, dan monitoring dan evaluasi kinerja guru.

Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran PT berkualitas. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan PT berkualitas. Penyediaan layanan kelembagaan melalui beasiswa prestasi, bantuan kerja sama tri partiet, hibah penguatan manajemen institusi, dan beasiswa miskin.

Berdasarkan program pembangunan pendidikan maka studi ini diterapkan untuk semua jenjang pendidikan formal, yaitu TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PT digunakan misi pendidikan 5K.

B. Misi Pendidikan

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan Nasional (mulai tahun 2012 menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Untuk mencapai visi pendidikan 2025 maka dibagi dalam empat tema pembangunan pendidikan nasional, yaitu tema pembangunan pertama I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dari modernisasi, tema pembangunan II (2010-2014) dengan fokus pada penguatan pelayanan, tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing nasional, dan tema pembangunan IV (2021-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional.

Tulisan ini hanya membahas tema pembangunan II (2010-2014) dan yang difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, visi Kemdikbud 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:

1. tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;
2. terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
4. setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya, dan
5. menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kemdikbud 2014, misi Kemdikbud 2010-2014 dikemas dalam Misi 5K sebagai berikut:

Misi K-1: Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan

Misi K-2: Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan

Misi K-3: Meningkatkan kualitas/mutu layanan dan relevansi layanan pendidikan

Misi K-4: Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan

Misi K-5: Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

C. Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi 5K

Setelah diketahui misi pendidikan 5K dan indikator pendidikan masing-masing misi pendidikan maka langkah berikutnya adalah memahami jenis indikator pendidikan yang akan digunakan. Indikator pendidikan hanya

dapat diperoleh setelah ada perhitungan antara berbagai jenis data pendidikan.

1. Misi K-1 Ketersediaan Layanan

Untuk menentukan apakah misi K-1 telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan tujuh jenis indikator pendidikan, yaitu

- a. Rasio siswa per sekolah (R-S/Sek)
- b. Rasio siswa per kelas (R-S/K)
- c. Rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK)
- d. Persentase perpustakaan (%Perpus)
- e. Persentase laboratorium (%Lab)
- f. Persentase ruang UKS (%RUKS),
- g. Persentase ruang komputer (%Rkom)

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk ketersediaan layanan disesuaikan dengan data tahunan yang tersedia. R-S/Sek atau R-Mhs/Lbg dijadikan ukuran untuk melihat besar kecilnya sekolah/lembaga yang ditetapkan dari pembakuan tipe sekolah. Misalnya, R-S/Sek untuk TK adalah 50, untuk SD adalah 240 karena setiap ruang kelas direncanakan seharusnya diisi oleh 40 anak sehingga dari 6 ruang kelas yang dibangun untuk setiap sekolah dapat diisi 240 siswa, untuk tingkat SMP adalah 9 ruang kelas atau 360 anak, untuk tingkat SM adalah 12 ruang kelas atau 480 anak sedangkan untuk tingkat PT menggunakan rata-rata nasional.

R-S/K digunakan untuk melihat padatnya suatu kelas. Setiap kelas seharusnya dalam perencanaan pembangunan sekolah diisi oleh 40 siswa. Namun, pada kenyataannya tidak semuanya diisi 40 siswa, ada yang lebih banyak dan ada juga yang lebih sedikit. Misalnya, R-S/K adalah 20 dan 35 maka yang lebih padat adalah 35.

R-K/RK digunakan untuk melihat pemakaian atau pemanfaatan ruang kelas apakah sudah sesuai dengan tujuan. Misalnya, R-K/RK adalah 1,20 maka terdapat 20% ruang kelas yang digunakan lebih dari 1 kali kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, bila R-K/RK adalah 0,9 maka terdapat 10% ruang kelas yang belum digunakan untuk kegiatan belajar.

%Perpus dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan perpustakaan di sekolah. Misalnya %Perpus adalah 60%, hal ini berarti hanya 60% sekolah yang memiliki perpustakaan. Sebaliknya, bila %Perpus adalah 110%, hal ini berarti terdapat 10% sekolah yang memiliki lebih dari satu perpustakaan.

%Lab dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan laboratorium di sekolah. Misalnya %Lab adalah 60%, hal ini berarti hanya 60% sekolah yang memiliki laboratorium. Sebaliknya, bila %Lab adalah 110%, hal ini berarti terdapat 10% sekolah yang memiliki lebih dari satu laboratorium.

%RUKS dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan ruang UKS yang seharusnya ada di sekolah. Misalnya %RUKS adalah 60%, hal ini berarti hanya 60% sekolah yang memiliki ruang UKS. Sebaliknya, bila %UKS adalah 110%, hal ini berarti terdapat 10% sekolah yang memiliki lebih dari satu ruang UKS.

%RKom dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan ruang komputer yang seharusnya ada di sekolah. Misalnya %RKom adalah 60%, hal ini berarti hanya 60% sekolah yang memiliki ruang komputer. Sebaliknya, bila %RKom adalah 110%, hal ini berarti terdapat 10% sekolah yang memiliki lebih dari satu ruang komputer.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja ketersediaan layanan pendidikan maka nilai ketujuh indikator tersebut setelah dilakukan konversi untuk menghasilkan satuan yang sama dijumlahkan dan dibagi tujuh dengan asumsi bahwa semua indikator memiliki peranan yang sama.

2. Misi K-2 Keterjangkauan Layanan Pendidikan

Untuk menentukan apakah misi K-2 telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan tiga jenis indikator pendidikan, yaitu

- a. Tingkat pelayanan sekolah (TPS)
- b. Daerah terjangkau (DT)
- c. Satuan Biaya (SB)

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk mengetahui keterjangkauan layanan pendidikan disesuaikan dengan data tahunan yang tersedia. Tingkat pelayanan sekolah dijadikan alat untuk menilai keterjangkauan layanan pendidikan. Bila nilainya kecil maka dapat menampung siswa lebih besar jika dibandingkan dengan nilai yang besar. Misalnya, TPS SD sebesar 50 dan TPS SMP 100 maka SD dapat menjangkau siswa lebih baik jika dibandingkan dengan keterjangkauan SMP.

Daerah terjangkau dijadikan alat untuk menilai keterjangkauan layanan pendidikan dilihat dari radius kepadatan siswa dan radius kepadatan sekolah. Bila nilainya kecil maka keterjangkauannya juga kecil, sedangkan nilainya besar berarti keterjangkauannya juga besar.

Satuan biaya dijadikan alat untuk menilai keterjangkauan layanan pendidikan dari segi biaya. Bila nilainya kecil maka dapat dijangkau oleh masyarakat, sedangkan bila nilainya besar berarti sekolah mahal sehingga keterjangkauannya kecil.

Dengan demikian, untuk mengetahui keterjangkauan layanan pendidikan maka nilai ketiga indikator tersebut setelah dilakukan konversi untuk menghasilkan satuan yang sama dijumlahkan dan dibagi dengan tiga dengan asumsi bahwa semua indikator memiliki peranan yang sama.

3. Misi K-3 Kualitas Layanan Pendidikan

Untuk menentukan apakah misi K-3 telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan 11 jenis indikator pendidikan, yaitu

- a. Persentase siswa baru SD asal TK (%SB-TK)
- b. Persentase guru layak (%GL)
- c. Rasio siswa per guru (R-S/G)
- d. Angka lulusan (AL)
- e. Angka mengulang (AU)
- f. Angka putus sekolah (APS)
- g. Persentase ruang kelas baik (%RKb)
- h. Persentase perpustakaan baik (%Perpusb)
- i. Persentase ruang UKS baik (%RUKSb),
- j. Persentase ruang komputer baik (%Rkomb)
- k. Persentase laboratorium baik (%Labb).

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk melihat mutu layanan pendidikan disesuaikan dengan data tahunan yang tersedia. Mutu masukan dari proses belajar mengajar tersebut dapat dilihat dari segi siswa baru adalah %SB TK yang dapat menunjukkan mutu pendidikan sehingga makin tinggi nilainya berarti makin bermutu pendidikannya.

Mutu sumber daya manusia dilihat dari %GL atau %DL dan R-S/G karena guru/dosen dianggap yang paling menentukan mutu pendidikan dan rasio siswa/guru dapat diketahui kekurangan atau kelebihan guru. Hal ini berarti, baik buruknya proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh kualifikasi guru/dosen yang diukur dari tingkat pendidikan guru/dosen dan kuantitas guru.

%GL atau %DL dijadikan ukuran untuk melihat besarnya guru/dosen yang mengajar sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No. 14/2005). Makin besar nilai %GL/%DL diharapkan guru mengajar dengan baik sehingga mutu pendidikan diharapkan makin meningkat. Sesuai dengan UU tersebut maka %GL untuk TK sampai SM diukur dengan tingkat ijazah guru adalah sarjana atau Diploma 4 dan yang lebih tinggi, sedangkan %DL program Diploma dan Sarjana diukur dari ijazah S2 dan yang lebih tinggi, %DL program pasca sarjana diukur dari ijazah S3.

R-S/G atau R-M/D dijadikan ukuran untuk melihat kuantitas guru/dosen, apakah terdapat kekurangan dan kelebihan guru/dosen. Bila angka R-S/G/R-M/D lebih kecil dari standar berarti kelebihan guru/dosen sedangkan lebih besar dari standar berarti kekurangan guru/dosen.

Mutu keluaran dari proses belajar mengajar tersebut dapat dilihat dari segi siswa/mahasiswa adalah AL juga dapat menunjukkan mutu pendidikan sehingga makin tinggi AL makin baik.

Mutu proses dilihat dari AU dan APS merupakan faktor yang negatif dari mutu pendidikan karena banyaknya siswa mengulang dan putus sekolah menunjukkan mutu pendidikan yang kurang baik. Oleh karena itu, makin kecil AU dan APS menunjukkan proses belajar-mengajar yang makin baik sehingga mutu pendidikan akan meningkat.

Selain itu, pada proses belajar mengajar juga ditentukan oleh ketersediaan prasarana pendidikan seperti ruang kelas dan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, dan laboratorium. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ruang kelas yang baik juga memacu siswa untuk belajar sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. %Rkb dijadikan ukuran untuk melihat kondisi ruang kelas yang baik. Makin besar nilainya diharapkan mutu pendidikan akan meningkat karena proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan siswa maupun guru dapat berinteraksi dengan baik pula. Demikian juga, dengan fasilitas sekolah yang baik dapat meningkatkan siswa untuk belajar dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

%Perpusb menyebabkan siswa bertahan untuk belajar menggunakan buku penunjang yang berada di perpustakaan. %RUKSb menyebabkan siswa lebih terjamin dalam hal kesehatannya karena difungsikan secara baik. %Rkomb menyebabkan siswa dapat belajar menggunakan komputer di sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. %Rlabbb menyebabkan siswa dapat belajar di laboratorium dengan baik karena kelengkapan fasilitas yang diberikan.

Dengan demikian, untuk mengetahui kualitas layanan pendidikan maka nilai ke-11 indikator tersebut dijumlahkan dan dibagi 11 dengan asumsi bahwa semua indikator memiliki peranan yang sama.

4. Misi K-4 Kesetaraan Layanan Pendidikan

Untuk menentukan apakah misi K-4 telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan 3 jenis indikator pendidikan, yaitu

- a. Perbedaan gender APK untuk TK, SD, SMP, SM, dan PT.
- b. Indeks paritas gender untuk TK, SD, SMP, SM, dan PT
- c. Persentase siswa swasta untuk TK, SD, SMP, SMP, dan PT.

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk melihat kesetaraan untuk memperoleh layanan pendidikan disesuaikan dengan data tahunan yang tersedia. Perbedaan gender APK dijadikan ukuran untuk menilai apakah ada perbedaan layanan pendidikan antara laki-laki dengan perempuan. Bila nilainya minus (-) atau positif (+) berarti masih terjadi perbedaan gender dalam layanan pendidikan. Disebut tidak ada perbedaan gender dalam layanan pendidikan bila nilainya 0. Jadi, idealnya perbedaan gender adalah 0.

Indeks paritas gender APK dijadikan ukuran untuk menilai apakah terjadi kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan antara laki-laki dengan perempuan. Bila nilainya kurang (0,..) atau lebih dari 1 (1,..) berarti belum ada kesetaraan gender dalam layanan pendidikan. Jadi, idealnya indeks paritas gender adalah 1.

Persentase siswa swasta dijadikan ukuran kesetaraan dilihat dari status sekolah antara negeri dengan swasta sebagai partisipasi masyarakat. %S-Swt belum diketahui berapa nilai idealnya.

Dengan demikian, untuk mengetahui kesetaraan layanan pendidikan maka nilai ketiga indikator tersebut dijumlahkan dan dibagi tiga dengan asumsi bahwa semua indikator memiliki peranan yang sama.

5. Misi K-5 Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan

Untuk menentukan apakah misi K-3 telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan 11 jenis indikator pendidikan, yaitu

- a. Angka partisipasi kasar (APK)
- b. Angka masukan kasar (AMK) atau angka melanjutkan (AM)
- c. Angka bertahan tingkat 5 untuk SD (AB5 SD) atau angka bertahan (AB)
- d. Rata-rata lama belajar (RLB)

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk mengetahui kepastian memperoleh layanan disesuaikan dengan data tahunan yang tersedia. Penggunaan APK digunakan untuk TK adalah untuk mengetahui partisipasi siswa TK terhadap penduduk usia 4-6 tahun, tingkat SD adalah partisipasi siswa tingkat SD penduduk usia 7-12 tahun, tingkat SMP adalah partisipasi siswa tingkat SMP terhadap penduduk usia 13-15 tahun, tingkat SM adalah partisipasi siswa tingkat SM terhadap penduduk usia 16-18 tahun, dan tingkat PT adalah partisipasi mahasiswa terhadap penduduk usia 19-23 tahun.

Pemilihan AMK TK karena merupakan akses masuk ke TK dan AMK SD karena merupakan akses pertama kali masuk ke SD sedangkan AM khusus untuk SMP, SM, dan PT karena merupakan akses lanjutan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya, untuk masuk ke TK berasal dari rumah tangga, untuk masuk SD tidak harus tamat dari TK tetapi dapat langsung dari penduduk usia masuk SD atau dari rumah tangga. Sebaliknya, jika siswa belum lulus SD/MI atau Paket A tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMP, demikian juga jika belum lulus SMP/MTs atau Paket B tidak dapat melanjutkan ke tingkat SM/MA, atau jika belum lulus SM/MA atau Paket C tidak dapat melanjutkan ke tingkat PT.

Dengan melihat AB 5 SD, bisa diketahui siswa yang dapat bertahan sampai tingkat 5 jenjang SD sehingga pendidikan menjadi efisien atau ketika siswa sudah mencapai tingkat 5 maka tak akan menjadi buta huruf bila siswa tersebut tidak sekolah lagi. AB adalah siswa yang dapat bertahan sampai

tingkat tertinggi. Dengan demikian, nilai maksimal AB adalah 100% artinya setiap siswa bertahan di sekolah sampai mereka lulus di masing-masing jenjang. Oleh karena itu, makin tinggi nilai AB berarti makin baik. Misalnya, AB SMP 90% dan SM 95% maka siswa SM lebih banyak bertahan di sekolah jika dibandingkan dengan siswa SMP. Hal ini wajar karena untuk masuk di SM sudah lebih terseleksi jika dibandingkan dengan di SMP.

RLB juga ikut berpengaruh dalam efisiensi pendidikan karena RLB yang tinggi menyebabkan semakin besarnya tenaga, waktu dan biaya yang digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga pendidikan menjadi tidak efisien. Makin tinggi nilai RLB makin buruk dengan nilai ideal untuk SD adalah tahun dan SMP/SM adalah 3 tahun. Misalnya, RLB SD sebesar 6,3 tahun sedangkan RLB SMP sebesar 3,3 tahun maka RLB SD lebih bagus karena hanya berbeda 5% dari standar 6 tahun sedangkan SMP berbeda 11% dari standar 3 tahun.

Dengan demikian, untuk mengetahui kepastian layanan pendidikan maka nilai keempat indikator tersebut dijumlahkan dan dibagi empat dengan asumsi bahwa semua indikator memiliki peranan yang sama.

6. Kinerja Program Pembangunan Pendidikan

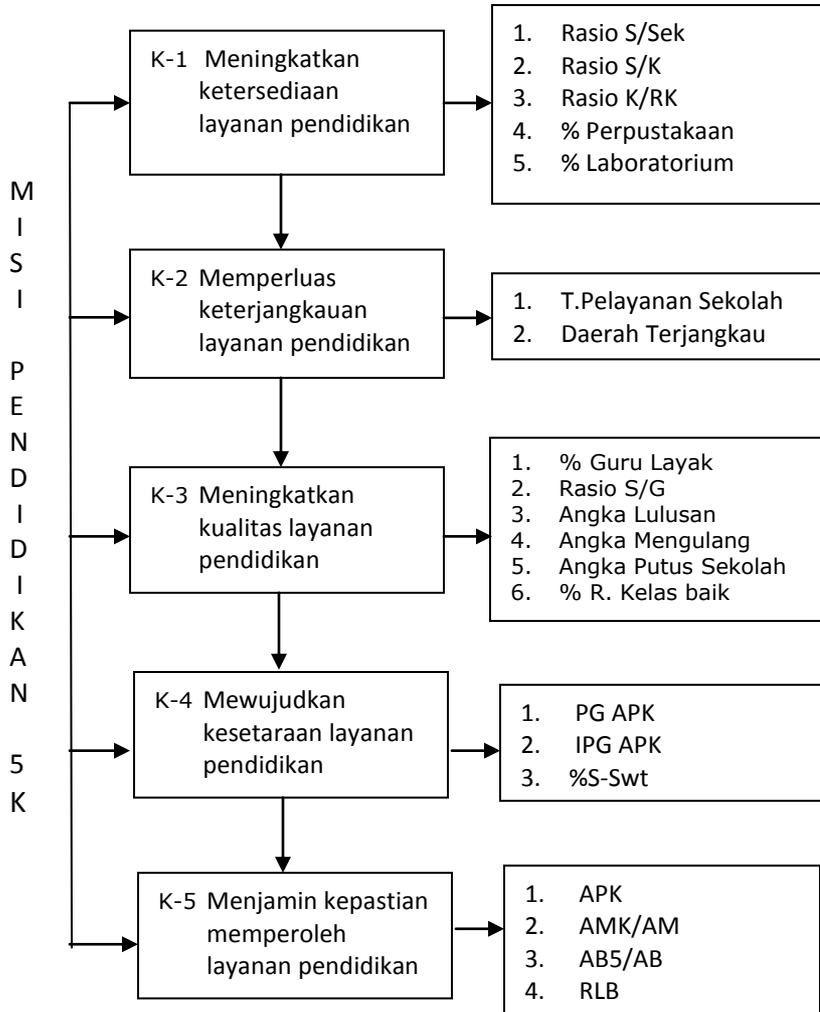
Berdasarkan kelima misi pendidikan maka terdapat 28 indikator pendidikan yang digunakan. Untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan untuk TK, SD, SMP, SM, dan PT diambil dari gabungan nilai setiap Misi Pendidikan 5K atau kelima misi tersebut.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja layanan pendidikan maka nilai kelima misi pendidikan tersebut dijumlahkan dan dibagi lima dengan asumsi bahwa semua misi pendidikan memiliki peranan yang sama.

D. Pengukuran Kinerja Program Pembangunan Pendidikan

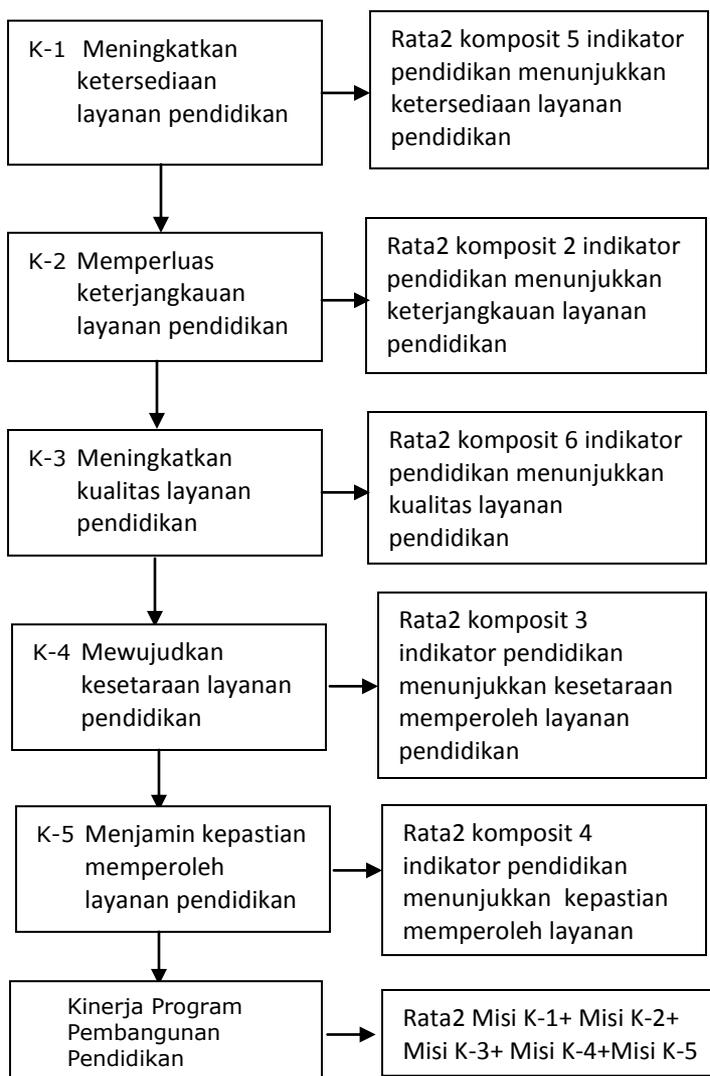
Berdasarkan pada 28 jenis indikator pendidikan menggunakan misi pendidikan 5K maka hanya 20 jenis indikator yang digunakan untuk menghasilkan kinerja program pembangunan pendidikan pada tahun 2011/2012. Terdapat 8 jenis indikator yang tidak digunakan dalam mengukur kinerja program pembangunan pendidikan pada tahun 2011/2012 karena tidak dapat disediakan datanya. Terdapat 2 indikator pada misi K-1, yaitu persentase ruang UKS dan persentase ruang komputer, 1 indikator misi K-2, yaitu satuan biaya pendidikan, dan 5 indikator misi K-3, yaitu persentase siswa baru SD yang berasal dari TK, persentase perpustakaan baik, persentase ruang UKS baik, persentase ruang komputer baik, dan persentase laboratorium baik.

Bagan 2.1
Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi Pendidikan 5K



Pada Bagan 2.1 dijelaskan bahwa misi pendidikan 5K terdiri dari lima kelompok indikator pendidikan untuk misi K-1, K-2, K-3, K-4, dan K-5. Untuk misi K-1 terdapat lima jenis indikator yang terkait dengan prasarana pendidikan. Untuk misi K-2 terdapat dua jenis indikator yang terkait dengan keterjangkauan layanan pendidikan. Untuk misi K-3 terdapat enam jenis indikator yang terkait dengan mutu guru, mutu siswa, dan mutu prasarana. Untuk misi K-4 terdapat tiga jenis indikator yang terkait dengan kesetaraan yang diukur dari gender dan status sekolah. Untuk misi K-5 terdapat 4 jenis indikator yang terkait dengan akses dan melanjutkan.

Bagan 2.2
Indikator Kinerja Program Pembangunan Pendidikan



Jabaran kinerja program pembangunan pendidikan merupakan rata-rata dari kelompok indikator pendidikan disajikan pada Bagan 2.2. Pada Bagan 2.2. tersebut dapat diketahui masing-masing misi pendidikan. Gabungan misi pendidikan 5K merupakan kinerja program pembangunan pendidikan.

Dengan demikian, misi pendidikan 5K menggunakan 20 indikator pendidikan. Misi K-1 ketersediaan layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit lima indikator menghasilkan nilai kinerja ketersediaan layanan pendidikan. Misi K-2 keterjangkauan layanan

pendidikan tercapai menggunakan komposit dua indikator menghasilkan nilai kinerja keterjangkauan layanan pendidikan. Misi K-3 kualitas layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit enam indikator menghasilkan nilai kinerja keterjangkauan layanan pendidikan. Misi K-4 kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit tiga indikator menghasilkan nilai kinerja keterjangkauan layanan pendidikan. Misi K-5 kepastian mendapatkan layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit empat indikator menghasilkan nilai kinerja keterjangkauan layanan pendidikan.

Setelah setiap misi mendapatkan nilai maka kinerja program pembangunan pendidikan adalah rata-rata dari nilai misi K-1 + misi K-2 + misi K-3 + misi K-4 + misi K-5.

BAB III METODOLOGI

A. Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi digunakan dalam penyusunan ini adalah mempelajari dokumen yang ada untuk dilakukan analisis dengan menggunakan rumus-rumus tertentu.

Sumber data yang digunakan adalah tahun 2011/2012 sedangkan yang dilakukan analisis adalah semua populasi atau jenjang pendidikan pada tingkat provinsi sesuai dengan keperluan misi pendidikan 5K. Sumber data tersebut diambil dari Statistik TK, SD, SMP, SM, dan PT yang dihasilkan oleh PDSP.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif dengan menggunakan norma nasional dan standar ideal. Norma nasional dimaksud digunakan untuk menilai masing-masing misi pendidikan dan dirinci menjadi dua nilai, yaitu indikator sama dengan atau lebih tinggi dari angka nasional berarti baik dan indikator lebih kecil dari angka nasional berarti kurang. Rincian indikator pendidikan masing-masing misi menggunakan norma nasional disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Kategori Indikator Pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan
Menggunakan Norma Nasional

No.	Nilai	Ketersediaan Layanan	Keterjangkauan Layanan	Kualitas Layanan	Kesetaraan Memperoleh Layanan	Kepastian Mendapatkan Layanan	Kinerja
1.	>= Nasional	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	< Nasional	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang

Tabel 3.2
Kategori Indikator Pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan
Menggunakan Standar Ideal

No.	Nilai	Ketersediaan Layanan	Keterjangkauan Layanan	Kualitas Layanan	Kesetaraan Memperoleh Layanan	Kepastian Mendapatkan Layanan	Kinerja
1.	91-100	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2.	81-90	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
3.	76-80	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
4.	71-75	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
5.	<= 70	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang

Standar ideal dimaksud digunakan untuk menilai masing-masing misi pendidikan dan dirinci menjadi lima nilai, yaitu paripurna dengan nilai 91-100, utama dengan nilai 81-90, madya dengan nilai 76-80, pratama dengan nilai 71-75, dan kurang bila nilainya ≤ 70 . Rincian masing-masing indikator misi pendidikan menggunakan standar ideal disajikan pada Tabel 3.2.

Selain itu, untuk memudahkan analisis disajikan pula tabel-tabel sehingga memudahkan untuk interpretasi.

B. Misi K-1: Ketersediaan Layanan Pendidikan

1. Pengertian

Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan. Sebagai upaya menyediakan sarana-prasarana dan infrastruktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya.

Untuk dapat mencapai ketersediaan layanan tersebut, jenis data yang diperlukan dan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ketersediaan secara berturut-turut disajikan berikut ini.

2. Data yang Diperlukan

Berbagai jenis data yang diperlukan untuk mengukur ketersediaan layanan pendidikan yang meliputi pendidikan di TK, SD, SMP, SM dan PT.

Jenis data yang digunakan adalah 1) jumlah siswa/mahasiswa, 2) jumlah sekolah/lembaga, 3) jumlah kelas, 4) jumlah ruang kelas, 5) jumlah perpustakaan, dan 6) jumlah laboratorium.

3. Indikator Pendidikan yang Digunakan

Untuk memahami berbagai indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur ketersediaan layanan maka disajikan definisi, data dasar, rumus, kriteria, dan kegunaan indikator tersebut.

a. Rasio Siswa per Sekolah (R-S/Sek)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa/mahasiswa dengan jumlah sekolah/lembaga pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah siswa/mahasiswa SD, SMP, SM, dan PT
- 2) Jumlah sekolah/lembaga SD, SMP, SM, dan PT

Rumus:

$$R-S/\text{Sek } j = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Sekolah } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, SM, dan PT

Kriteria: Makin tinggi rasio berarti makin padat siswa yang berada di sekolah atau makin kurang jumlah sekolah di suatu daerah.

Kegunaan: Untuk mengetahui rata-rata besarnya sekolah di suatu daerah sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengusulkan tambahan ruang kelas baru.

b. Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah siswa TK, SD, SMP, dan SM
- 2) Jumlah kelas TK, SD, SMP, dan SM

Rumus:

$$R-S/K j = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Kelas } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, dan SM

Kriteria: Makin tinggi rasio berarti makin padat siswa yang berada di kelas atau makin kurang ruang kelas di suatu daerah.

Kegunaan: Untuk mengetahui rata-rata besarnya kelas di sekolah dan daerah sehingga dapat ditentukan daerah mana yang sangat padat dan dapat sebagai bahan untuk mengusulkan tambahan ruang kelas baru.

c. Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)

Definisi: Perbandingan antara jumlah kelas dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah kelas TK, SD, SMP, dan SM
- 2) Jumlah ruang kelas TK, SD, SMP, dan SM

Rumus:

$$R-K/RK j = \frac{\text{Kelas } j}{\text{Ruang Kelas } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, dan SM

Kriteria: Idealnya adalah 1, berarti ruang kelas hanya digunakan sekali,

kurang dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang belum digunakan dan lebih dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Makin tinggi nilainya berarti makin kurang jumlah ruang kelas yang dimiliki.

Kegunaan: Untuk mengetahui kekurangan/kelebihan ruang kelas di sekolah dan daerah sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan prioritas sekolah mana yang akan diberi tambahan ruang kelas.

d. Persentase perpustakaan sekolah (% Perpus)

Definisi: Perbandingan antara jumlah perpustakaan yang dimiliki sekolah dengan jumlah sekolah yang ada pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah perpustakaan SMP dan SM
- 2) Jumlah sekolah SMP dan SM

Rumus:

$$\%Perpus\ j = \frac{\text{Perpustakaan } j}{\text{Sekolah } j} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SMP dan SM

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang seharusnya dimiliki sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan perpustakaan pada tahun-tahun berikutnya.

e. Persentase Laboratorium (%lab)

Definisi: Perbandingan antara jumlah sekolah yang telah memiliki laboratorium pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah laboratorium SMP dan SM
- 2) Jumlah sekolah SMP dan SM

Rumus:

$$\%Lab\ j = \frac{\text{Laboratorium } j}{\text{Sekolah } j} \times 100$$

- Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SMP dan SM
Khusus SM sekolah dikalikan 5 sesuai ketentuan di SM supaya memiliki 5 jenis laboratorium, yaitu lab fisika, kimia, biologi, lab multimedia, dan lab bahasa.
- Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.
- Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya sekolah yang belum memiliki laboratorium yang seharusnya dimiliki sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan laboratorium pada tahun-tahun berikutnya.

4. Ketersediaan Layanan Pendidikan

Ketersediaan layanan pendidikan dihitung dari komposit lima indikator yang dinyatakan dalam satuan yang sama dengan melakukan konversi. Untuk melakukan konversi menggunakan standar dengan ketentuan seperti disajikan pada Tabel 3.3. Konversi R-S/Sek dilakukan dengan menggunakan tipe sekolah atau pembakuan sekolah. Untuk TK digunakan 50 sesuai dengan standar tingkat nasional, untuk SD digunakan 240 sebagai angka baku karena kebanyakan SD memiliki 6 kelas dan setiap ruang kelas diperuntukkan 40 siswa sedangkan untuk SMP digunakan 360 sebagai angka baku karena SMP mempunyai 9 ruang kelas dan SM digunakan 480 sebagai angka baku karena kebanyakan SM mempunyai 12 ruang kelas dan setiap ruang kelas juga diperuntukkan 40 siswa. Untuk PT digunakan 1.503. Contohnya, R-S/Sek SMP adalah 300 maka angka tersebut belum optimal dan dikonversi dengan cara 300 dibagi 360 dikalikan 100 sama dengan 83,3% ($300/360 \times 100 = 83,3\%$). Bila R-S/Sek SMA adalah 500 maka angka tersebut lebih dari optimal sebesar 104,17% ($500/480 \times 100 = 104,17\%$) namun ditulis 100%.

Untuk R-S/K TK digunakan 20 sebagai angka nasional karena siswa TK harus mendapat perhatian yang lebih. Untuk R-S/K SD digunakan 28 SMP dan SM digunakan 32 sebagai angka yang telah ditentukan dalam Permendiknas Nomor 23, Tahun 2013. Bila R-S/K TK adalah 25 maka angka tersebut lebih dari optimal dan dikonversi dengan cara 25 dibagi 20 dikalikan 100 sama dengan 125,00% ($25/20 \times 100 = 125,00\%$) maka ditulis 100. Bila R-S/K SD adalah 24 maka angka tersebut belum optimal dan dikonversi dengan cara 24 dibagi 28 dikalikan 100 sama dengan 85,71% ($24/28 \times 100 = 85,71\%$). Bila R-S/K SMP adalah 35 maka angka tersebut lebih optimal dan dikonversi dengan cara 35 dibagi 32 dikalikan 100 sama dengan 109,38% ($35/32 \times 100 = 109,38\%$) maka ditulis 100. Sebaliknya, R-S/K SMA adalah 47 maka angka tersebut lebih dari optimal dan dikonversi dengan cara yang sama menjadi 146,88% ($47/32 \times 100 = 146,88\%$) maka ditulis 100.

Tabel 3.3
Jenis Indikator, Konversi Nilai Berdasarkan Standar Ideal, dan Nilai Ketersediaan Layanan Pendidikan

No.	Jenis Indikator	Konversi Nilai Berdasarkan Standar Ideal/Ditentukan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	R-S/Sek atau R-M/Lbg	a. TK : Hasil / 50 x 100 b. SD : Hasil / 240 x 100 c. SMP : Hasil / 360 x 100 d. SM : Hasil / 480 x 100 e. PT : Hasil / 1.503 x 100 f. Bila perhitungannya lebih besar dari standar maka nilainya dijadikan 100	Maksimal 100
2.	R-S/K	a. TK : Hasil / 20 x 100 b. SD : Hasil / 28 x 100 c. SMP, SM : Hasil / 32 x 100 d. Bila perhitungannya lebih besar dari standar maka nilainya dijadikan 100	Maksimal 100
3.	R-K/RK	a. < 1 : hasil / 1 x 100, nilainya kurang dari 100% berarti belum ideal b. > 1 : 1 / hasil x 100, nilainya kurang dari 100% berarti belum ideal	Maksimal 100
4.	%Perpus	Tidak perlu konversi karena menggunakan standar ideal 100	Maksimal 100
5.	%Lab	Tidak perlu konversi karena menggunakan standar ideal 100	Maksimal 100
Jumlah Nilai			Maksimal 100

Untuk R-K/RK digunakan 1 sebagai angka ideal, artinya setiap ruang kelas hanya digunakan satu kali atau 1 kelompok belajar (1 kelas). Dengan demikian, bila nilainya kurang atau lebih dari 1 keduanya tidak ideal. Hal inilah yang disebut sebagai menggunakan 2 standar. Bila R-K/RK adalah 1,2 berarti terdapat 20% ruang kelas digunakan lebih dari sekali maka angka tersebut dikonversi dengan cara 1 dibagi 1,2 sama dengan 83,3% ($1/1,2 \times 100 = 83,3\%$). Sebaliknya, bila R-K/RK adalah kurang dari 1, misalnya 0,9 berarti terdapat 10% ruang kelas belum digunakan atau digunakan tetapi tidak untuk kegiatan belajar misalnya untuk ruang BP maka angka tersebut dikonversi dengan cara 0,9 dibagi 1 dikali 100 sama dengan 90,0% ($0,9/1 \times 100 = 90,0\%$).

Untuk %Perpus digunakan angka ideal 100%. Dengan demikian, bila nilainya kurang atau sama dengan angka nasional tetap menggunakan angka tersebut. Hal yang sama diberlakukan untuk %Lab dengan menggunakan angka ideal 100%.

Setelah kelima indikator ketersediaan layanan pendidikan memiliki satuan yang sama dalam persentase, langkah selanjutnya adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah indikator yang ada atau dibagi lima. Dengan demikian, untuk menghitung ketersediaan layanan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

$\text{Ketersediaan} = \frac{\text{Nilai R-S/Sek+R-S/K+R-K/RK+\%Perpus+\%Lab}}{5}$
--

C. Misi K-2: Keterjangkauan Layanan Pendidikan

1. Pengertian

Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan dan mengupayakan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat.

Untuk dapat mencapai keterjangkauan layanan tersebut, jenis data yang diperlukan dan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur kinerja keterjangkauan layanan pendidikan secara berturut-turut disajikan berikut ini.

2. Data yang Diperlukan

Berbagai jenis data yang diperlukan untuk mengukur keterjangkauan layanan pendidikan yang meliputi pendidikan di TK, SD, SMP, SM dan PT.

Jenis data yang digunakan adalah 1) jumlah penduduk usia 4-6 tahun, 2) jumlah penduduk usia 7-12 tahun, 3) jumlah sekolah, 4) jumlah kelas, 5) jumlah ruang kelas, 6) jumlah lulusan, 7) luas wilayah, dan 8) jarak yang dapat dijangkau.

3. Indikator Pendidikan yang Digunakan

a. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah penduduk usia masuk sekolah atau lulusan dengan sekolah ekuivalen pada jenjang pendidikan tertentu.

Sekolah ekuivalen adalah sekolah yang memiliki 6 ruang kelas atau 6 rombongan belajar (dipilih mana yang lebih besar). Digunakan sekolah ekuivalen agar antara SD, SMP, dan SM bisa dibandingkan. Penduduk usia sekolah digunakan untuk tingkat SD karena SD adalah melayani penduduk usia 7-12 tahun sedangkan untuk tingkat SMP dan SM adalah melayani lulusan pada jenjang yang lebih rendah yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah penduduk usia sekolah 4-6 tahun dan 7-12 tahun
- 2) Lulusan SD dan SMP
- 3) Jumlah ruang kelas TK, SD, SMP, dan SM
- 4) Jumlah rombongan belajar TK, SD, SMP, dan SM

Rumus:

$$\text{TPS TK} = \frac{\text{Penduduk 4-6 tahun}}{\text{Sekolah Ekuivalen TK}}$$

$$\text{TPS SD} = \frac{\text{Penduduk 7-12 tahun}}{\text{Sekolah Ekuivalen SD}}$$

$$\text{TPS SMP/SM} = \frac{\text{Lulusan SD/SMP}}{\text{Sekolah Ekuivalen SMP/SM}}$$

$$\text{Sek Ekuivalen} = \frac{\text{Ruang Kelas/Rombel}}{6}$$

Kriteria: Makin tinggi TPS berarti makin kecil kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin sulit dijangkau. Sebaliknya, makin kecil TPS berarti makin besar kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin mudah dijangkau.

Kegunaan: Untuk mengetahui kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia sekolah atau lulusan atau seberapa besar sekolah dapat dijangkau oleh penduduk usia sekolah atau lulusan.

b. Daerah Terjangkau (DT)

Definisi: Perbandingan antara daerah terjangkau siswa dengan daerah terjangkau sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Daerah terjangkau siswa (DT Siswa) adalah perkalian antara jari-jari lingkaran dengan jarak yang bisa dijangkau oleh anak dan kepadatan penduduk usia sekolah. Daerah terjangkau sekolah (DT Sek) adalah perkalian antara jari-jari lingkaran dengan jarak yang bisa dijangkau oleh anak dan dengan kepadatan sekolah.

Kepadatan penduduk usia sekolah (KPUS) adalah perbandingan antara penduduk usia sekolah dibagi dengan luas wilayah. Kepadatan sekolah (Ksek) adalah perbandingan antara jumlah sekolah dibagi dengan luas wilayah. Daerah yang bisa dijangkau anak SD adalah 3 km, anak SMP adalah 6 km (Permendiknas 23/2013 tentang SPM), sedangkan siswa SM ditentukan sebesar 10 km dan mahasiswa PT sebesar 30 km.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-23 tahun
- 2) Jumlah sekolah SD, SMP, SM, dan PT
- 3) Jumlah luas wilayah

Rumus:

$$DT_j = \frac{DT \text{ Siswa } j}{DT \text{ Sekolah } j}$$

$$\begin{aligned} DT \text{ Siswa SD} &= 22/7 \times 3^2 \times KPUS \text{ 7-12 th} \\ DT \text{ Siswa SMP} &= 22/7 \times 6^2 \times KPUS \text{ 13-15 th} \\ DT \text{ Siswa SM} &= 22/7 \times 10^2 \times KPUS \text{ 16-18 th} \\ DT \text{ Mahasiswa PT} &= 22/7 \times 30^2 \times KPUS \text{ 19-23 th} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DT \text{ Sekolah SD} &= 22/7 \times 3^2 \times KSec \text{ SD} \\ DT \text{ Sekolah SMP} &= 22/7 \times 6^2 \times KSec \text{ SMP} \\ DT \text{ Sekolah SM} &= 22/7 \times 10^2 \times KSec \text{ SM} \\ DT \text{ Lembaga PT} &= 22/7 \times 30^2 \times Klemb \text{ PT} \end{aligned}$$

$$KPUS_j = \frac{\text{Penduduk US } j}{\text{Luas Wilayah}}$$

$$KSec_j = \frac{\text{Sekolah } j}{\text{Luas Wilayah}}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SM, dan PT

Kriteria: Makin tinggi DT berarti makin luas jangkauan siswa. Artinya, sekolah makin bisa dijangkau oleh radius tertentu. Sebaliknya, makin kecil DT berarti sekolah makin sempit jangkauannya dalam radius tertentu.

Kegunaan: Untuk mengetahui keterjangkauan siswa dalam bersekolah. Artinya, seberapa besar sekolah dapat dijangkau oleh siswa.

4. Keterjangkauan Layanan Pendidikan

Keterjangkauan layanan pendidikan dihitung dari komposit dua indikator yang dinyatakan dalam satuan yang sama dengan melakukan konversi. Untuk melakukan konversi menggunakan standar dengan ketentuan seperti disajikan pada Tabel 3.4. Konversi TPS dilakukan dengan menggunakan rata-rata nasional. Demikian juga dengan DT, konversi dilakukan dengan menentukan nilai TK adalah 341, SD adalah 45, SMP adalah 88, dan SM adalah 67. Bila TPS SD adalah 40 maka angka tersebut dikonversi dengan cara 100-

$(45/40 \times 100) = 100 - 1,13 = 98,67$. Sebaliknya, bila TPS SD adalah 50 maka angka tersebut dikonversi dengan cara $45 / 50 \times 100 = 90,00$. Dengan demikian, nilai maksimal masing-masing indikator 100.

Tabel 3.4
Jenis Indikator, Konversi Nilai Berdasarkan Standar, dan Nilai
Keterjangkauan Layanan Pendidikan

No.	Jenis Indikator	Konversi Nilai Berdasarkan Standar Ideal/Ditentukan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TPS	a. TK : Hasil / 341 x 100 b. SD : Hasil / 45 x 100 c. SMP : Hasil / 88 x 100 d. SM : Hasil / 67 x 100 e. Bila perhitungannya lebih besar dari standar maka nilainya dijadikan 100	Maksimal 100
2.	DT	a. SD : Hasil / 166 x 100 b. SMP : Hasil / 364 x 100 c. SM : Hasil / 576 x 100 d. PT : Hasil / 6231 x 100 e. Bila perhitungannya lebih besar dari standar maka nilainya	Maksimal 100
Jumlah Nilai			Maksimal 100

Setelah kedua indikator keterjangkauan layanan pendidikan memiliki satuan yang sama, langkah selanjutnya adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah indikator yang ada atau dibagi dua. Dengan demikian, untuk menghitung kinerja keterjangkauan layanan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

$\text{Keterjangkauan} = \frac{\text{Nilai TPS+DT}}{2}$

D. Misi K-3: Kualitas Layanan Pendidikan

1. Pengertian

Meningkatkan KUALITAS/MUTU dan relevansi layanan pendidikan. Sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa.

Untuk dapat mencapai kualitas layanan tersebut, indikator pendidikan yang digunakan dan jenis data yang diperlukan untuk mengukur kinerja kualitas layanan pendidikan secara berturut-turut seperti berikut ini.

2. Data yang Diperlukan

Berbagai jenis data yang diperlukan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan. Data pendidikan dimaksud meliputi pendidikan di TK, tingkat SD, SMP, SM dan PT.

Jenis data yang digunakan adalah 1) jumlah guru menurut ijazah tertinggi, 2) jumlah siswa, 3) jumlah lulusan, 4) jumlah mengulang, 5) jumlah putus sekolah, dan 5) jumlah ruang kelas menurut kondisi.

3. Indikator Pendidikan yang Digunakan

a. Persentase Guru/Dosen Layak (%GL/%DL)

Definisi: Perbandingan antara jumlah guru yang layak mengajar (memiliki ijazah Sarjana/S1 atau Diploma 4 dan yang lebih tinggi dan S2 dan yang lebih tinggi untuk PT) dengan jumlah guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase (UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen).

Data Dasar yang Digunakan

- 1) jumlah guru/dosen menurut ijazah tertinggi untuk TK, SD, SMP, SM, dan PT
- 2) jumlah guru/dosen seluruhnya TK, SD, SMP, SM, dan PT

Rumus:

$$\%GL_j = \frac{\text{Guru S1/D4 \& lebih tinggi } j}{\text{Guru seluruhnya } j} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, dan SM

$$\%DL = \frac{\text{Dosen S2 \& lebih tinggi}}{\text{Dosen seluruhnya}} \times 100$$

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, berarti semua guru memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti makin baik mutu sekolah dipandang dari sudut guru.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya jumlah guru berijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan baru dalam rangka peningkatan mutu guru pada tahun mendatang.

b. Rasio Siswa per Guru (R-S/G), Rasio Mahasiswa per Dosen (R-M/D)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa/mahasiswa dengan jumlah guru/dosen pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah siswa TK, SD, SMP, SM, dan mahasiswa PT
- 2) Jumlah guru TK, SD, SMP, SM, dan dosen PT

Rumus:

$$R-S/G j = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Guru } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, SM, dan PT

Kriteria: Makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa/mahasiswa yang harus dilayani oleh seorang guru/dosen atau makin kurang jumlah guru/dosen di suatu daerah.

Kegunaan: Untuk mengetahui rata-rata guru/dosen yang dapat melayani siswa/mahasiswa di suatu sekolah dan daerah sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan daerah mana yang memerlukan tambahan guru/dosen pada tahun mendatang.

c. Angka Lulusan (AL)

Definisi: Perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) jumlah lulusan TK, SD, SMP, SM, dan PT
- 2) jumlah siswa seluruhnya TK dan PT, tingkat VI untuk SD, dan tingkat X untuk SMP atau tingkat XII untuk SM tahun ajaran sebelumnya

Rumus:

$$AL j t = \frac{\text{Lulusan } j t}{\text{Siswa tk tertinggi } j t-1} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, dan SM
t adalah tahun, t-1 adalah tahun sebelumnya

$$AL PT t = \frac{\text{Lulusan PT t}}{\text{Mahasiswa PT t-1}} \times 100$$

Kriteria: Untuk SD sampai SM, idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa tingkat tertinggi lulus semuanya. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik. Khusus untuk TK dan PT belum ada idealnya.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dan tidak lulus dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program remedial bagi mereka yang tidak lulus pada tahun mendatang.

d. Angka Mengulang SD (AU SD)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa mengulang pada tahun tertentu dengan jumlah siswa pada tahun ajaran sebelumnya pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) jumlah siswa mengulang SD, SMP, atau SM
- 2) jumlah siswa seluruhnya SD, SMP atau SM tahun ajaran sebelumnya

Rumus:

$$AU_{jt} = \frac{\text{Mengulang } jt}{\text{Siswa } jt-1} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SM
t adalah tahun, t-1 adalah tahun sebelumnya

Kriteria: Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang mengulang. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa yang mengulang di suatu daerah sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program remedial yang diperlukan pada tahun mendatang.

e. Angka Putus Sekolah (APS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tahun tertentu dengan jumlah siswa pada tahun ajaran sebelumnya pada jenjang tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) jumlah siswa putus sekolah SD, SMP, atau SM
- 2) jumlah siswa seluruhnya SD, SMP atau SM tahun ajaran sebelumnya

Rumus:

$$APS_{jt} = \frac{\text{Putus Sekolah } jt}{\text{Siswa } jt-1} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SM
t adalah tahun, t-1 adalah tahun sebelumnya

Kriteria: Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang putus sekolah. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program retrival yang diperlukan pada tahun mendatang.

f. Persentase Ruang Kelas Baik (% Rkb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah ruang kelas kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah ruang kelas menurut kondisi SD, SMP dan SM
- 2) Jumlah ruang kelas seluruhnya SD, SMP dan SM

Rumus:

$$\%Rkb_j = \frac{\text{Ruang Kelas baik } j}{\text{Ruang Kelas seluruhnya } j} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SM

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua ruang kelas dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya ruang kelas baik sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi sekolah yang rusak dalam rangka meningkatkan mutu.

4. Kualitas Layanan Pendidikan

Kualitas layanan pendidikan dihitung dari komposit enam indikator yang dinyatakan dalam satuan yang sama dengan melakukan konversi. Untuk melakukan konversi menggunakan standar dengan ketentuan seperti disajikan pada Tabel 3.5.

%GL, AL, dan %Rkb tidak dilakukan konversi karena standar idealnya 100, sedangkan AU dan APS karena standar idealnya 0, namun karena memberi nilai yang negatif maka dilakukan konversi dengan cara 100-nilainya. Contoh AU SD = 5,60% maka konversinya adalah 100 - 5,60 = 94,40. R-S/G dilakukan konversi, bila nilainya kurang dari nasional adalah nilai dibagi dengan angka nasional. Sebaliknya, bila nilainya lebih tinggi dari nasional maka konversinya tetap 100. Dengan demikian, nilai maksimal masing-masing indikator 100. Contoh, R-S/G SD sebesar 18 maka konversinya adalah $18/17 \times 100 = 105,88$ konversinya tetap 100, bila R-S/G SD sebesar 15 maka konversinya adalah $15/17 \times 100 = 88,24$.

Tabel 3.5
Jenis Indikator, Konversi Nilai Berdasarkan Standar, dan Nilai
Kualitas Layanan Pendidikan

No. (1)	Jenis Indikator (2)	Konversi Nilai Berdasarkan Standar Ideal/Ditentukan (3)	Nilai (4)
1.	% GL/ %DL	Tidak perlu konversi karena menggunakan standar ideal 100	Maksimal 100
2.	R S/G	a. TK : Hasil / 11 x 100 b. SD : Hasil / 17 x 100 c. SMP : Hasil / 15 x 100 d. SM : Hasil / 12 x 100 e. Bila perhitungannya lebih besar dari standar maka nilainya dijadikan 100	Maksimal 100
3.	AL	Tidak perlu konversi karena menggunakan standar ideal 100	Maksimal 100
4.	AU	Perlu konversi karena standar idealnya 0, jadi nilai = 100 dikurangi AL untuk SD, SMP dan SM	Maksimal 100
5.	APS	Perlu konversi karena standar idealnya 0, jadi nilai = 100 dikurangi APS untuk SD, SMP dan SM	Maksimal 100
6.	% RKB	Tidak perlu konversi karena menggunakan standar ideal 100	Maksimal 100
Jumlah Nilai			Maksimal 100

Setelah keenam indikator kualitas layanan pendidikan memiliki satuan yang sama, langkah selanjutnya adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah indikator yang ada atau dibagi enam. Dengan demikian, untuk menghitung kualitas layanan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kualitas} = \frac{\text{Nilai \%GL+R-S/G+AL+AU+APS+\%Rkb}}{6}$$

E. Misi K-4: Kesenjangan Memeroleh Layanan Pendidikan

1. Pengertian

Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan layanan pendidikan antarwilayah, suku, agama, status sosial, negeri dan swasta, serta gender.

Untuk dapat mencapai kesetaraan dalam layanan tersebut, indikator pendidikan yang digunakan dan jenis data yang diperlukan untuk mengukur kinerja kesetaraan secara berturut-turut seperti berikut ini.

2. Data yang Diperlukan

Berbagai jenis data yang diperlukan untuk mengukur kesetaraan layanan pendidikan. Data pendidikan dimaksud meliputi pendidikan di TK, tingkat SD, SMP, SM dan PT.

Jenis data yang digunakan adalah 1) perhitungan APK perempuan dan APK laki-laki dan 2) jumlah siswa menurut status sekolah.

3. Indikator Pendidikan yang Digunakan

a. Perbedaan Gender (PG) APK

Definisi: Selisih antara APK laki-laki dengan APK perempuan pada jenjang pendidikan tertentu yang dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Perhitungan APK laki-laki
- 2) Perhitungan APK perempuan

Rumus:

$$PG\ APK\ j = APK\ Laki-laki - APK\ Perempuan\ j$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SM

Kriteria: Idealnya adalah 0 persen berarti tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin buruk, sebaliknya makin rendah berarti makin baik. Bila angkanya minus berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebaliknya, bila angkanya tak minus berarti laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dengan demikian, nilainya adalah -, 0, dan +

Kegunaan: Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam bersekolah antara laki-laki dengan perempuan sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang.

Penjelasan PG:

PG akan menghasilkan tiga jenis nilai, yaitu 1) nilai positif, 2) nilai negatif, dan 3) nilai 0 (nol). Bila hasilnya positif berarti terjadi PG yang lebih besar laki-laki daripada perempuan. Sebaliknya, bila hasilnya negatif berarti terjadi PG lebih besar perempuan daripada laki-laki sedangkan nilai 0 berarti tidak ada PG. Artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Kondisi 0 ini yang diharapkan terjadi pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, PG akan berkisar antara + (plus/positif), 0, dan - (minus/negatif).

b. Indek Paritas Gender (IPG) APK

Definisi: Perbandingan antara APK perempuan dengan APK laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Perhitungan APK laki-laki
- 2) Perhitungan APK perempuan

Rumus:

$$\text{IPG APK } j = \frac{\text{APK Perempuan } j}{\text{APK Laki-laki } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SM

Kriteria: Idealnya adalah 1 berarti ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Bila angkanya kurang atau lebih dari 1 maka tidak ada kesetaraan gender. Bila angkanya lebih dari 1 berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebaliknya, bila angkanya kurang dari 1 berarti laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dengan demikian, nilainya adalah <1, 1, dan >1.

Kegunaan: Untuk mengetahui apakah sudah terjadi kesetaraan dalam bersekolah antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang.

c. Persentase Siswa Swasta terhadap Siswa Seluruhnya (%S-Swt)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa bersekolah di sekolah swasta dengan jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut status sekolah
- 2) Jumlah siswa seluruhnya

Rumus:

$$\%S\text{-Swat } j = \frac{\text{Siswa Swasta } j}{\text{Siswa Seluruhnya}} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SM, dan PT

Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin besar partisipasi sekolah swasta dalam menampung siswa. Belum ada ketentuan berapa nilai idealnya.

Kegunaan: Untuk mengetahui besarnya partisipasi sekolah swasta dalam menampung siswa di sekolah.

4. Kesetaraan Layanan Pendidikan

Kesetaraan layanan pendidikan dihitung dari komposit tiga indikator yang dinyatakan dalam satuan yang sama dengan melakukan konversi. Untuk melakukan konversi menggunakan standar dengan ketentuan seperti disajikan pada Tabel 3.6. PG APK dilakukan konversi dengan standar idealnya 0%, IPG APK dilakukan konversi dengan standar 1, sedangkan %S-Swt dilakukan konversi menggunakan angka nasional, bila nilainya lebih besar dari angka nasional maka nilai dibagi dengan angka nasional. Oleh karena itu, bila nilainya lebih tinggi dari nasional maka konversinya tetap 100. Dengan demikian, nilai maksimal masing-masing indikator 100. Contoh PG APK SD = 2,50% maka konversinya adalah $100 - 2,50 = 97,50$, bila PG APK SD = -2,50% maka konversinya adalah $100 + (-2,50) = 97,50$. Contoh IPG APK SD = 0,95 maka konversinya adalah $0,95 / 1 \times 100 = 95,00$, bila IPG APK SD = 1,05 maka konversinya adalah $1 / 1,05 \times 100 = 95,23$. Contoh %S-Swt SMP = 20% maka konversinya $20 / 25 \times 100 = 80,00\%$, bila %S-Swt SMP = 26 maka konversinya adalah $26 / 25 \times 100 = 104,00$ tetap ditulis 100.

Tabel 3.6
Jenis Indikator, Konversi Nilai Berdasarkan Standar, dan Nilai Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan

No. (1)	Jenis Indikator (2)	Konversi Nilai Berdasarkan Standar Ideal/Ditentukan (3)	Nilai (4)
1.	PG APK	Standar idelnya = 0 untuk semua jenjang a. Hasil minus = 100 ditambah nilai b. Hasil positif = 100 dikurang nilai	Maksimal 100
2	IPG APK	Standar idelnya = 1 untuk semua jenjang a. Hasil kurang dari 1 = nilai dibagi 1 dikalikan 100 b. Hasil lebih dari 1 = 1 dibagi nilai dikalikan 100	Maksimal 100
3.	% S-Swt	a. TK : Hasil / 97 x 100 b. SD: Hasil / 9 x 100 c. SMP : Hasil / 24 x 100 d. SM : Hasil / 47 x 100 e. PT : Hasil / 68 x 100 f. Bila perhitungannya lebih besar dari standar maka nilainya dijadikan 100	Maksimal 100
Jumlah Nilai			Maksimal 100

Setelah ketiga indikator kesetaraan layanan pendidikan memiliki satuan yang sama, langkah selanjutnya adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah indikator yang ada atau dibagi tiga. Dengan demikian, untuk menghitung kesetaraan layanan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kesetaraan} = \frac{\text{Nilai PG APK} + \text{IPG APK} + \%S\text{-Swt}}{3}$$

F. Misi K-5: Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan

1. Pengertian

Menjamin KEPASTIAN memperoleh layanan pendidikan. Adanya jaminan bagi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan lapangan kerja sesuai kompetensi.

Untuk dapat mencapai kepastian dalam layanan pendidikan tersebut, indikator pendidikan yang digunakan dan jenis data yang diperlukan untuk mengukur kinerja kepastian memperoleh layanan pendidikan secara berturut-turut seperti berikut ini.

2. Data yang Diperlukan

Berbagai jenis data yang diperlukan untuk mengukur kepastian memperoleh layanan pendidikan. Data pendidikan dimaksud meliputi pendidikan di TK, tingkat SD, SMP, SM dan PT.

Jenis data yang digunakan adalah 1) penduduk usia masuk sekolah, 2) penduduk usia sekolah, 3) jumlah siswa/mahasiswa, 4) jumlah siswa baru/mahasiswa baru, 5) jumlah lulusan, 6) jumlah siswa menurut tingkat dua tahun berurutan, 7) jumlah mengulang menurut tingkat, 8) jumlah putus sekolah menurut tingkat.

3. Indikator Pendidikan yang Digunakan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

1) Penduduk usia 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-23 tahun.

2) Jumlah siswa TK dan RA/BA, tingkat SD, SMP, SM dan mahasiswa PT.

Rumus yang digunakan:

$$APK_j = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Penduduk usia sekolah } j} \times 100$$

j = jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, SM, PT

TK: penduduk kelompok usia 4-6 tahun

Tingkat SD: penduduk kelompok usia 7-12 tahun

Tingkat SMP: penduduk kelompok usia 13-15 tahun

Tingkat SM: penduduk kelompok usia 16-18 tahun

Tingkat PT: penduduk kelompok usia 19-23 tahun

Kriteria: Makin tinggi APK berarti makin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah di satuan pendidikan. Nilai APK yang baik mendekati 100%.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang bersekolah di satuan pendidikan pada daerah tertentu.

b. Angka Masukan Kasar (AMK) (khusus TK dan SD)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa baru TK atau siswa baru SD dengan jumlah penduduk usia resmi masuk TK atau SD dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Penduduk usia masuk TK adalah 4-5 tahun dan masuk ke SD adalah penduduk 6-7 tahun.
- 2) Siswa kelompok A pada TK dan siswa baru SD semua usia.

Rumus yang digunakan:

$$AMK_j = \frac{\text{Siswa Baru } j}{\text{Penduduk usia masuk sekolah } j} \times 100$$

j = jenjang, TK atau SD

TK: siswa kelompok A dan penduduk kelompok usia 4-5 tahun

SD: siswa baru dan penduduk kelompok usia 6-7 tahun

Kriteria: Makin tinggi AMK berarti makin banyak siswa masuk sekolah yang tidak sesuai dengan usia resmi. Idealnya=100% berarti sesuai dengan usia resmi masuk sekolah. AMK lebih besar dari 100% karena banyak siswa yang masuk sekolah di luar usia resmi.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya anak usia masuk sekolah di TK dan SD pada suatu daerah.

c. Angka Melanjutkan (AM) (khusus SMP, SM dan PT)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa baru/mahasiswa baru pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah lulusan SD, SMP dan SM
- 2) Jumlah siswa baru SMP dan SM atau mahasiswa baru PT

Rumus yang Digunakan:

$$AM_j = \frac{\text{Siswa Baru } j}{\text{Lulusan } j-1} \times 100$$

j = jenjang, SMP, SM, dan PT, j-1 = jenjang sebelumnya

Kriteria: Makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya=100% berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila angkanya lebih dari 100 % karena ada siswa/mahasiswa baru yang berasal dari daerah lain seperti di daerah kota dan perbatasan.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah/lembaga yang lebih tinggi di suatu daerah.

d. Angka Bertahan Tingkat 5 SD (AB5 SD)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa SD yang dapat bertahan sampai tingkat 5 dari suatu kohort sebesar 1000 dibandingkan dengan tahun-siswa dan dinyatakan dalam persentase.

Penggunaan AB5 SD dengan asumsi bila siswa putus tingkat 5 SD diharapkan tidak menjadi buta aksara.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut tingkat 2 tahun berurutan
- 2) Jumlah mengulang menurut tingkat tahun terakhir
- 3) Jumlah putus sekolah menurut tingkat tahun terakhir
- 4) Jumlah lulusan tahun terakhir

Rumus:

$$\text{AB5 SD} = \frac{\text{Siswa Bertahan SD 5}}{1000} \times 100$$

Catatan: Digunakan angka 1000 karena merupakan kohor 1000

Kriteria: Makin mendekati 100 persen makin baik berarti siswa dapat bertahan di sekolah.

Kegunaan: Untuk mengetahui siswa yang dapat bertahan sampai tingkat 5 SD.

e. Angka Bertahan (AB)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa yang dapat bertahan pada tingkat tertentu atau sampai lulus dari suatu kohort sebesar 1000 pada suatu pendidikan tertentu dibandingkan dengan tahun-siswa dan dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut tingkat 2 tahun berurutan
- 2) Jumlah mengulang menurut tingkat tahun terakhir
- 3) Jumlah putus sekolah menurut tingkat tahun terakhir
- 4) Jumlah lulusan tahun terakhir

Rumus:

$$AB_j = \frac{\text{Siswa Bertahan } j}{3000} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan SMP dan SM yang mempunyai jenjang 3 tahun sehingga kohortnya menjadi 3000

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa dapat bertahan sampai lulus dan tidak ada yang mengulang.

Kegunaan: Untuk mengetahui jumlah siswa yang dapat bertahan sampai lulus pada suatu jenjang pendidikan sehingga dapat menjadi bahan kebijakan di tahun mendatang.

f. Rata-rata Lama Belajar (RLB)

Definisi: Rata-rata lama belajar yang diperlukan siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan.

- 1) SD: Rata-rata lama belajar sampai lulus seharusnya 6 tahun
- 2) SMP/SM: Rata-rata lama belajar sampai lulus seharusnya 3 tahun

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut tingkat 2 tahun berurutan
- 2) Jumlah mengulang menurut tingkat tahun terakhir
- 3) Jumlah putus sekolah menurut tingkat tahun terakhir
- 4) Jumlah lulusan tahun terakhir

Rumus:

$$RLB_{Ls\ SD} = \frac{(Ls\ 1 \times 6) + (Ls\ 2 \times 7) + (Ls\ 3 \times 8)}{\text{Lulusan } 1+2+3}$$

Catatan: Jumlah lulusan I adalah lulusan tanpa mengulang, lulusan II adalah lulusan mengulang satu kali, dan lulusan III adalah lulusan yang mengulang dua kali

Kriteria: Idealnya adalah 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SMP dan SM berarti semua siswa lulus tepat waktu dan tak ada yang mengulang.

Kegunaan: Untuk mengetahui lama belajar siswa sampai lulus sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang.

4. Kepastian Layanan Pendidikan

Kepastian memperoleh layanan pendidikan dihitung dari komposit empat indikator yang dinyatakan dalam satuan yang sama dengan melakukan konversi. Untuk melakukan konversi menggunakan standar dengan ketentuan seperti disajikan pada Tabel 3.7. APK, AMK/AM, dan AB dilakukan konversi dengan standar idealnya 100%, sedangkan RLB dilakukan konversi dengan standar ideal 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SMP dan SM. Oleh karena itu, bila nilainya lebih tinggi dari standar ideal maka perhitungannya nilai dibagi standar, bila nilainya lebih kecil dari standar nilai dibagi standar sehingga nilai maksimal 100. APK TK dan APM SD dilakukan konversi menggunakan standar 35 dan 115. Bila nilai APK TK adalah 37 maka konversinya $37/35 \times 100 = 105,71$ maka konversinya tetap 100, bila APK TK adalah 32 maka konversinya $32/35 \times 100 = 91,43$. AMK TK dan AMK SD dilakukan konversi menggunakan standar 27 dan 55. Bila nilai AMK SD adalah 60 maka konversinya $60/55 \times 100 = 109,09$ maka konversinya tetap 100, bila AMK SD adalah 50 maka konversinya $50/55 \times 100 = 90,90$. AB SD juga dilakukan konversi. Bila AB5 SD adalah 92 maka konversinya $92/94 \times 100 = 97,87$, bila AB5 SD adalah 96 maka konversinya $96/94 \times 100 = 102,13$ maka konversinya tetap 100. Sebaliknya, bila RLB SD adalah 6,02 maka konversinya adalah $6/6,02 \times 100 = 99,67$, bila RLB SD adalah 5,98 maka konversinya adalah $5,98/6 \times 100 = 99,67$.

Tabel 3.7
Jenis Indikator, Konversi Nilai Berdasarkan Standar, dan Nilai
Kepastian Mendapatkan Layanan Pendidikan

No. (1)	Jenis Indikator (2)	Konversi Nilai Berdasarkan Standar Ideal/Ditentukan (3)	Nilai (4)
1.	APK/APM	a. TK : Hasil / 35 x 100 b. SD : Hasil / 115 x 100 c. Bila perhitungan TK dan SD lebih besar dari standar maka nilainya dijadikan 100	Maksimal 100
2.	AMK/AM	a. TK : Hasil / 27 x 100 b. SD : Hasil / 55 x 100 c. Bila perhitungan TK dan SD lebih besar dari standar maka nilainya dijadikan 100	Maksimal 100
3.	AB5 SD/AB	a. SD : Hasil / 55 x 100 b. SMP dan SM : Tidak dilakukan konversi karena menggunakan standar ideal 100%	Maksimal 100
4.	RLB	a. SD : hasil kurang dari 6 = hasil dibagi 6, hasil lebih besar 6 = 6 dibagi hasil SMP dan SM : hasil kurang dari 3, hasil lebih besar 3 = 3 dibagi hasil b.	Maksimal 100
Jumlah Nilai			Maksimal 100

Setelah keempat indikator kepastian memperoleh layanan pendidikan memiliki satuan yang sama, langkah selanjutnya adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah indikator yang ada atau dibagi 4. Dengan demikian, untuk menghitung kepastian memperoleh layanan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kepastian} = \frac{\text{Nilai APK+AMK/AM+AB5+RLB}}{4}$$

G. Kinerja Program Pembangunan Pendidikan

Kinerja atau disebut keberhasilan program pembangunan pendidikan umumnya dinilai berdasarkan pengukuran mengenai terserapnya dana yang dialokasikan untuk program pembangunan pendidikan. Cara yang lebih akurat memberikan indikasi tentang keberhasilan program pembangunan pendidikan ialah dengan menggunakan data yang merupakan hasil pendidikan dikaitkan dengan misi pendidikan 5K, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas layanan pendidikan, kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Keberhasilan program pembangunan pendidikan dihitung melalui gabungan dari kelima misi dengan indikator pendidikannya.

Untuk menghitung kinerja program pembangunan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kinerja Program} = \frac{\text{Ketersediaan+Keterjangkauan+Kualitas+Kesetaraan+Kepastian}}{5}$$

Teknik analisis yang digunakan untuk menghitung kinerja program pembangunan adalah menggunakan standar ideal kinerja masing-masing misi pendidikan yang dirinci menjadi lima nilai, yaitu paripurna dengan nilai 91-100, utama dengan nilai 81-90, madya dengan nilai 76-80, pratama dengan nilai 71-75, dan kurang bila nilainya ≤ 70 (lihat Tabel 3.2). Contoh, kinerja program pembangunan pendidikan SD, bila diketahui

1. ketersediaan adalah 92,87
2. Keterjangkauan adalah 75,40
3. Kualitas adalah 91,97
4. Kesetaraan adalah 99,93
5. Kepastian adalah 96,00

Dengan demikian, kinerja program pembangunan pendidikan SD adalah $(92,87 + 75,40 + 91,97 + 99,93 + 96,00)$ dibagi 5 = 91,23

Dengan menggunakan standar ideal maka kinerja program pembangunan pendidikan SD sebesar 91,23 termasuk paripurna.

BAB IV HASIL DAN BAHASAN

A. Misi K-1: Ketersediaan Layanan Pendidikan

Misi K-1 ketersediaan layanan pendidikan menggunakan lima indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui kinerja ketersediaan layanan pendidikan. Tabel 4.1 menunjukkan perbandingan kelima indikator ketersediaan layanan pendidikan antara lima jenjang pendidikan. R-S/Sek SD sebesar 188, SMP sebesar 280, SM sebesar 375, dan PT sebesar 1.772 sedangkan TK sebesar 51 dikarenakan belum merupakan prasyarat untuk masuk SD.

Tabel 4.1
Perbandingan Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan
Tahun 2011/2012

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal	Angka Nasional				
			TK	SD	SMP	SM	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	R-S/Sek R M/Lbg	50/240 360/480/1.503	51	188	280	375	1,772
2.	R-S/K	19/28/32/32	20	26	34	34	-
3.	R-K/RK	1.00	1.05	1.12	0.99	1.01	-
4.	%Perpus	100.00	-	-	40.08	58.63	-
5.	%Lab	100.00	-	-	55.79	31.14	-

Masih pada Tabel 4.1 ternyata makin tinggi jenjang pendidikan kepadatan sekolah makin tinggi diperlihatkan dari R-S/Sek atau R-Mhs/Lbg. Hal ini wajar karena jangkauan siswa pada jenjang yang tinggi makin luas sehingga R-Mhs/Lbg di PT tertinggi sebesar 1.772 sedangkan TK terkecil sebesar 51. Hal ini juga berarti makin sedikit sekolah pada jenjang yang makin tinggi (PT) dan makin banyak sekolah pada jenjang yang makin rendah (SD).

Hal yang sama untuk kepadatan kelas ternyata makin tinggi jenjang pendidikan juga makin padat ditandai dengan R-S/K terbesar pada SM sebesar 34, SMP sebesar 34 sedangkan SD sebesar 26 dan yang terkecil TK sebesar 20. Dengan demikian, di SMP dan SM penggunaan kelas lebih efektif daripada di SD dan TK.

Dalam pemanfaatan ruang kelas, ternyata R-K/RK terkecil pada SMP sebesar 0,99 dan terbesar pada SD sebesar 1,12. Hal ini berarti, hampir semua jenjang memiliki ruang kelas yang dipakai lebih dari sekali dan

terbesar pada SD sebesar 12% sedangkan pada SMP sebesar 1% ruang kelas yang belum digunakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa di semua jenjang (TK, SD dan SM) masih kekurangan ruang kelas kecuali SMP yang telah kelebihan ruang kelas.

Prasarana lainnya khusus SMP dan SM, yaitu perpustakaan dan laboratorium, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan %Perpus juga makin bagus, yaitu SMP sebesar 40,08% dan SM 58,63%. Besarnya %Lab SM lebih kecil dari SMP karena dikaitkan dengan ketentuan SM harus memiliki lima jenis laboratorium maka kondisi ini masih belum bagus walaupun lokasi SM berada di perkotaan atau ibukota kabupaten yang fasilitasnya lebih mudah diperoleh, yaitu SMP sebesar 55,79% dan SM sebesar 31,14%.

1. Taman Kanak-kanak (TK)

Hasil analisis tiga indikator ketersediaan layanan pendidikan TK tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.2. R-S/Sek TK berkisar antara 45 terendah (Maluku) sampai 81 tertinggi (Bangka Belitung) dengan angka nasional sebesar 51. Dengan demikian, daya tampung sekolah telah dimanfaatkan sebesar 100,00% dengan idealnya sebesar 50. Kisaran yang lebar ini mengindikasikan variasi yang tinggi antarprovinsi. Dari 33 provinsi, 12 provinsi (36,36%) yang memiliki rasio lebih besar dari ideal, yaitu 1) Bangka Belitung, 2) Papua, 3) DKI Jakarta, 4) Sumatera Utara, 5) Kalimantan Timur, 6) Papua Barat, 7) DI Yogyakarta, 8) Aceh, 9) Bali, 10) Kalimantan Barat, 11) Jawa Barat, dan 12) Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan keduabelas provinsi tersebut telah memanfaatkan sekolahnya dengan baik. Terdapat 14 provinsi (42,42%) yang memiliki rasio S/Sek kurang dari 50, yaitu 1) Maluku, 2) Sulawesi Selatan, 3) NTT, 4) Kalimantan Selatan, 5) Sulawesi Barat, 6) Kalimantan Tengah, 7) Jambi, 8) Sulawesi Utara, 9) Sulawesi Tenggara, 10) Maluku Utara, 11) Bengkulu, 12) NTB, 13) Sulawesi Tengah, dan 14) Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak terisi sesuai dengan kapasitas yang ada.

Perbandingan R-S/Sek TK provinsi dengan norma nasional menunjukkan bahwa terdapat 12 provinsi (36,36%) yang memiliki R-S/Sek lebih tinggi atau sama dengan nasional, yaitu 1) Kepulauan Riau, 2) Jawa Barat, 3) Kalimantan Barat, 4) Bali, 5) Aceh, 6) DI Yogyakarta, 7) Papua Barat, 8) Kalimantan Timur, 9) Sumatera Utara, 10) DKI Jakarta, 11) Papua, dan 12) Bangka Belitung. Sebanyak 21 provinsi lainnya (63,64%) memiliki R-S/Sek lebih kecil dengan nasional.

R-S/K TK berkisar antara 10 terendah (Papua Barat) sampai 47 tertinggi (DI Yogyakarta) dengan angka nasional sebesar 20. Dengan demikian, pendayagunaan kelas telah mencapai 100,00% dengan idealnya sebesar 20. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 11 provinsi (33,33%) yang

memiliki R-S/K TK di bawah angka nasional, yaitu 1) Papua Barat, 2) Bali, 3) Sumatera Utara, 4) Riau, 5) Banten, 6) Bengkulu, 7) Kalimantan Barat, 8) Sulawesi Tenggara, 9) Jawa Barat, 10) Lampung, dan 11) Sulawesi Selatan, sedangkan 22 provinsi (66,67%) memiliki R-S/K lebih besar atau sama dengan angka nasional. Sejalan dengan rendahnya R-S/K TK, kondisi ini menunjukkan bahwa siswa TK di setiap sekolah relatif kecil karena siswa TK masih memerlukan perhatian yang cukup besar dalam proses belajar mengajar.

Tabel 4.2
Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	No.	Provinsi	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK
1	DKI Jakarta	68	26	1.00	18	Kalimantan Tengah	47	22	1.01
2	Jawa Barat	52	17	1.01	19	Kalimantan Selatan	47	20	1.25
3	Banten	50	14	1.04	20	Kalimantan Timur	57	26	1.02
4	Jawa Tengah	50	20	1.06	21	Sulawesi Utara	48	40	1.01
5	DI Yogyakarta	54	47	1.01	22	Gorontalo	50	21	1.07
6	Jawa Timur	50	20	1.00	23	Sulawesi Tengah	49	21	1.06
7	Aceh	53	31	1.10	24	Sulawesi Selatan	46	19	1.01
8	Sumatera Utara	64	12	1.03	25	Sulawesi Barat	47	22	1.17
9	Sumatera Barat	49	25	1.01	26	Sulawesi Tenggara	49	16	1.36
10	Riau	50	13	1.08	27	Maluku	45	35	1.01
11	Kepulauan Riau	51	21	1.08	28	Maluku Utara	49	21	1.24
12	Jambi	48	27	1.02	29	Bali	53	11	1.11
13	Sumatera Selatan	50	20	1.17	30	NTB	49	29	1.03
14	Bangka Belitung	81	20	1.08	31	NTT	46	28	1.06
15	Bengkulu	49	14	1.03	32	Papua	68	20	1.05
16	Lampung	50	19	1.00	33	Papua Barat	57	10	1.47
17	Kalimantan Barat	52	15	1.39		Indonesia	51	20	1.05

R-K/RK TK berkisar antara 1,00 terendah dan kondisi ideal (Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Timur) sampai 1,47 tertinggi (Papua Barat) dengan angka nasional sebesar 1,05. Hal ini berarti 5% ruang kelas yang ada digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar. Berbeda dengan R-S/Sek dan R-S/K yang lebih rendah dari standar ideal, R-K/RK pada umumnya di atas standar ideal (1,00) atau lebih buruk. Terdapat tiga provinsi yang ideal dengan nilai 1,00, yaitu Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Terdapat 16 provinsi (48,48%) yang memiliki R-K/RK di atas rata-rata nasional atau lebih buruk, yaitu 1) Sulawesi Tengah, 2) Jawa Tengah, 3) NTT, 4) Gorontalo, 5) Kepulauan Riau, 6) Bangka Belitung, 7) Riau, 8) Aceh, 9) Bali, 10) Sumatera Selatan, 11) Sulawesi Barat, 12) Maluku Utara, 13) Kalimantan Selatan, 14) Sulawesi Tenggara, 15) Kalimantan Barat, dan 16) Papua Barat. Sebanyak 14 provinsi lainnya (42,42%) memiliki R-K/RK di bawah nasional.

Tabel 4.3 merupakan tiga indikator ketersediaan layanan pendidikan yang telah dikonversi sehingga menghasilkan nilai ketersediaan layanan pendidikan TK. Pada tingkat nasional, R-S/Sek menjadi 100,00, R-S/K menjadi 100,00, dan

R-K/RK menjadi 95,41 sehingga jumlah nilai ketersediaan layanan pendidikan TK menjadi 98,47. Hal ini berarti ketersediaan layanan pendidikan TK sebesar 98% dengan nilai terendah (72,90) terjadi di Papua Barat dan nilai tertinggi (99,94) di provinsi Lampung.

Tabel 4.3
Kinerja Ketersediaan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	Nilai
1	DKI Jakarta	100,00	100,00	99,65	99,88
2	Jawa Barat	100,00	92,02	98,90	96,97
3	Banten	100,00	74,45	95,70	90,05
4	Jawa Tengah	99,26	100,00	94,25	97,84
5	DI Yogyakarta	100,00	100,00	99,23	99,74
6	Jawa Timur	100,00	100,00	99,64	99,88
7	Aceh	100,00	100,00	90,91	96,97
8	Sumatera Utara	100,00	62,77	97,36	86,71
9	Sumatera Barat	98,23	100,00	99,09	99,11
10	R i a u	100,00	67,19	92,39	86,53
11	Kepulauan Riau	100,00	100,00	92,63	97,54
12	J a m b i	95,75	100,00	98,04	97,93
13	Sumatera Selatan	100,00	100,00	85,80	95,27
14	Bangka Belitung	100,00	100,00	92,53	97,51
15	Bengkulu	97,45	75,39	97,16	90,00
16	Lampung	100,00	100,00	99,83	99,94
17	Kalimantan Barat	100,00	80,96	71,72	84,23
18	Kalimantan Tengah	94,82	100,00	99,39	98,07
19	Kalimantan Selatan	93,49	100,00	79,86	91,12
20	Kalimantan Timur	100,00	100,00	98,10	99,37
21	Sulawesi Utara	96,68	100,00	99,42	98,70
22	Gorontalo	99,89	100,00	93,21	97,70
23	Sulawesi Tengah	98,21	100,00	94,29	97,50
24	Sulawesi Selatan	91,80	100,00	99,35	97,05
25	Sulawesi Barat	94,38	100,00	85,74	93,37
26	Sulawesi Tenggara	97,04	83,92	73,44	84,80
27	Maluku	90,86	100,00	99,24	96,70
28	Maluku Utara	97,23	100,00	80,75	92,66
29	B a l i	100,00	57,71	90,26	82,66
30	NTB	98,12	100,00	97,25	98,46
31	NTT	91,93	100,00	93,96	95,30
32	Papua	100,00	100,00	95,62	98,54
33	Papua Barat	100,00	50,44	68,25	72,90
	Indonesia	100,00	100,00	95,41	98,47

Berdasarkan standar ideal maka terdapat 25 provinsi (75,76%) dengan kondisi ketersediaan layanan paripurna (nilai 91-100), 7 provinsi (21,21%) dengan kondisi utama (81-90) dan sebanyak 1 provinsi (3,03%) dengan kondisi madya (76-80). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal ketersediaan layanan pendidikan TK adalah 98,47 berarti termasuk kategori paripurna.

2. Sekolah Dasar (SD)

Hasil analisis tiga indikator ketersediaan layanan pendidikan SD tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.4. R-S/Sek SD berkisar antara 126 terendah (Papua Barat) sampai 283 tertinggi (Banten) dengan angka nasional sebesar 188. Dengan demikian, daya tampung sekolah hanya dimanfaatkan sebesar 78,33% dari idealnya 240. Kisaran yang lebar ini mengindikasikan variasi yang tinggi antarprovinsi. Meskipun standar ideal rasio S/Sek adalah 240, namun hanya 3 provinsi memiliki rasio lebih besar atau sama dengan ideal, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Kondisi ini wajar karena DKI Jakarta merupakan kota besar dan memiliki penduduk yang sangat padat.

Tabel 4.4
Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	No.	Provinsi	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK
1	DKI Jakarta	269	31	1.27	18	Kalimantan Tengah	133	20	1.09
2	Jawa Barat	241	31	1.27	19	Kalimantan Selatan	147	21	1.07
3	Banten	283	35	1.26	20	Kalimantan Timur	197	24	1.09
4	Jawa Tengah	175	25	1.07	21	Sulawesi Utara	127	19	1.04
5	DI Yogyakarta	160	22	1.03	22	Gorontalo	185	29	1.05
6	Jawa Timur	168	25	1.07	23	Sulawesi Tengah	132	20	1.11
7	Aceh	164	24	1.05	24	Sulawesi Selatan	166	23	1.10
8	Sumatera Utara	198	28	1.15	25	Sulawesi Barat	140	23	1.12
9	Sumatera Barat	167	24	1.07	26	Sulawesi Tenggara	154	18	1.16
10	Riau	217	27	1.04	27	Maluku	159	26	1.04
11	Kepulauan Riau	204	23	1.21	28	Maluku Utara	139	22	1.06
12	Jambi	179	24	1.13	29	Bali	175	25	1.11
13	Sumatera Selatan	211	27	1.14	30	NTB	183	28	1.05
14	Bangka Belitung	190	24	1.12	31	NTT	169	24	1.02
15	Bengkulu	183	27	1.04	32	Papua	144	22	1.08
16	Lampung	224	31	1.05	33	Papua Barat	126	22	1.16
17	Kalimantan Barat	158	22	1.15		Indonesia	188	26	1.12

Perbandingan R-S/Sek SD provinsi dengan norma nasional menunjukkan bahwa terdapat 10 provinsi (30,30%) memiliki R-S/Sek lebih tinggi atau lebih padat dari nasional, yaitu 1) Banten, 2) DKI Jakarta, 3) Jawa Barat, 4) Lampung, 5) Riau, 6) Sumatera Selatan, 7) Kepulauan Riau, 8) Sumatera Utara, 9) Kalimantan Timur, dan 10) Bangka Belitung. Sebanyak 23 provinsi lainnya (69,70%) memiliki R-S/Sek lebih kecil atau lebih jarang dari nasional.

R-S/K SD berkisar antara 18 terendah (Sulawesi Tenggara) sampai 35 tertinggi (Banten) dengan angka nasional sebesar 26. Dengan demikian, pendayagunaan kelas hanya 92,86%. Kisaran ini jauh dari standar ideal R-S/K sebesar 28. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 10 provinsi (30,30%) memiliki R-S/K di atas angka nasional atau lebih padat, yaitu 1) Banten, 2) DKI Jakarta, 3) Lampung, 4) Jawa Barat, 5) Gorontalo, 6) NTB, 7) Sumatera Utara, 8) Sumatera Selatan, 9) Riau, dan 10) Bengkulu, sedangkan 23 provinsi lainnya (69,70%) memiliki R-S/K lebih rendah atau sama dengan angka nasional.

Tingginya R-S/K SD menunjukkan bahwa sekolah telah terisi sesuai dengan kapasitas yang ada karena perbedaan daerah dan geografis. Bila keadaan ini dikaitkan dengan tingginya APM tingkat SD makin memperkuat adanya indikasi bahwa jumlah anak usia SD yang bersekolah semakin banyak sehingga R-S/K pun makin besar.

Tabel 4.5
Ketersediaan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	Nilai
1	DKI Jakarta	100,00	100,00	78,60	92,87
2	Jawa Barat	100,00	100,00	78,65	92,88
3	Banten	100,00	100,00	79,20	93,07
4	Jawa Tengah	72,92	90,35	93,74	85,67
5	DI Yogyakarta	66,67	80,34	97,30	81,44
6	Jawa Timur	69,90	87,68	93,36	83,64
7	Aceh	68,23	84,60	95,68	82,84
8	Sumatera Utara	82,44	98,83	87,07	89,45
9	Sumatera Barat	69,48	86,40	93,42	83,10
10	R i a u	90,28	94,84	96,39	93,84
11	Kepulauan Riau	84,92	82,15	82,46	83,18
12	J a m b i	74,39	85,55	88,41	82,78
13	Sumatera Selatan	87,94	97,03	88,10	91,03
14	Bangka Belitung	79,17	86,40	89,30	84,96
15	Bengkulu	76,37	94,71	96,00	89,03
16	Lampung	93,44	100,00	94,96	96,13
17	Kalimantan Barat	66,00	79,11	87,13	77,41
18	Kalimantan Tengah	55,38	71,32	91,82	72,84
19	Kalimantan Selatan	61,15	76,13	93,15	76,81
20	Kalimantan Timur	82,04	85,86	91,64	86,51
21	Sulawesi Utara	52,94	68,62	95,91	72,49
22	Gorontalo	77,16	100,00	94,93	90,70
23	Sulawesi Tengah	55,20	71,36	89,73	72,10
24	Sulawesi Selatan	69,07	83,71	90,74	81,17
25	Sulawesi Barat	58,36	81,91	89,67	76,65
26	Sulawesi Tenggara	64,23	65,51	85,92	71,89
27	Maluku	66,17	92,69	95,76	84,88
28	Maluku Utara	57,77	78,81	94,75	77,11
29	B a l i	72,87	88,23	89,95	83,68
30	NTB	76,29	100,00	95,67	90,65
31	NTT	70,27	85,86	98,37	84,83
32	Papua	60,00	78,04	92,55	76,86
33	Papua Barat	52,35	76,96	85,99	71,77
	Indonesia	78,28	92,89	89,47	86,88

R-K/RK SD berkisar antara 1,02 terendah (NTT) sampai 1,27 tertinggi (DKI Jakarta dan Jawa Barat) dengan angka nasional sebesar 1,12. Apabila dibandingkan dengan angka nasional, terdapat 12 provinsi (36,36%) memiliki R-K/RK sama atau di atas nasional, yaitu 1) DKI Jakarta, 2) Jawa Barat, 3) Banten, 4) Kepulauan Riau, 5) Sulawesi Tenggara, 6) Papua Barat, 7) Sumatera Utara, 8) Kalimantan Barat, 9) Sumatera Selatan, 10) Jambi, 11) Bangka Belitung, dan 12) Sulawesi Barat, yang berarti setiap ruang kelas

yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar lebih dari satu kali. Sisanya, sebanyak 21 provinsi lainnya (63,64%) memiliki R-K/RK di bawah nasional walaupun nilainya juga lebih dari 1,00.

Tabel 4.5 merupakan tiga indikator ketersediaan layanan pendidikan yang telah dikonversi sehingga menghasilkan nilai ketersediaan layanan SD. Pada tingkat nasional, R-S/Sek sebesar 78,28, R-S/K sebesar 92,89, R-K/RK sebesar 89,47 sehingga nilai ketersediaan layanan pendidikan SD menjadi 86,88. Hal ini berarti ketersediaan layanan SD sebesar 87% dengan nilai terendah (71,77) terjadi di Papua Barat dan nilai tertinggi (96,13) terjadi di Lampung.

Berdasarkan standar ideal maka terdapat 6 provinsi (18,18%), dengan kondisi layanan paripurna (91-100), terdapat 17 provinsi (51,52%) dengan kondisi utama (81-90), 5 provinsi (15,15%) dengan kondisi madya (76-80) dan 5 provinsi (15,15%) dengan kondisi pratama (71-75). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal ketersediaan layanan pendidikan SD adalah 86,88 berarti termasuk kategori utama. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena pendidikan SD termasuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan sudah termasuk daerah pedesaan tetapi ketersediaannya belum paripurna.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Hasil analisis lima indikator ketersediaan layanan pendidikan SMP tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.6. R-S/Sek SMP berkisar antara 129 terendah (Kalimantan Tengah) sampai 447 tertinggi (Bali) dengan angka nasional sebesar 280. Dengan demikian, sekolah hanya didayagunakan sebesar 77,78%. Kisaran ini sangat lebar (318) mengindikasikan variasi yang tinggi antarprovinsi. Meskipun standar ideal R-S/Sek SMP adalah 360, namun hanya 4 provinsi memiliki rasio lebih besar dari ideal, yaitu 1) DKI Jakarta, 2) Jawa Tengah, 3) Jawa Barat, dan 4) Bali yang merupakan daerah padat. Provinsi yang memiliki R-S/Sek kurang dari 240 (standar sekolah kecil di SMP) terjadi di 19 provinsi, yaitu 1) Riau, 2) Kepulauan Riau, 3) Kalimantan Timur, 4) Bengkulu, 5) NTT, 6) Aceh, 7) Sulawesi Barat, 8) Jambi, 9) Papua, 10) Sulawesi Tenggara, 11) Kalimantan Selatan, 12) Kalimantan Barat, 13) Papua Barat, 14) Sulawesi Tengah, 15) Maluku, 16) Sulawesi Utara, 17) Maluku Utara, 18) Gorontalo, dan 19) Kalimantan Tengah. Sisanya, sebanyak 10 provinsi (30,30%) memiliki R-K/RK di bawah standar ideal dan di atas 240.

Perbandingan R-S/Sek SMP provinsi dengan norma nasional menunjukkan bahwa terdapat 6 provinsi (18,18%) memiliki R-S/Sek lebih tinggi dari R-S/Sek nasional, yaitu 1) Bali, 2) Jawa Barat, 3) Jawa Tengah, 4) DKI Jakarta, 5) Banten dan 6) Jawa Timur. Sisanya, sebanyak 27 provinsi (81,82%) lebih rendah dari R-S/Sek nasional.

Tabel 4.6
Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpust	% Lab
1	DKI Jakarta	364	31	0,98	35,84	121,95
2	Jawa Barat	403	39	0,93	41,89	50,19
3	Banten	334	35	0,97	34,82	51,89
4	Jawa Tengah	378	33	0,97	53,90	81,33
5	DI Yogyakarta	261	31	1,03	48,85	115,30
6	Jawa Timur	298	33	0,98	50,37	73,60
7	Aceh	217	30	1,09	39,03	69,46
8	Sumatera Utara	277	33	0,97	35,78	63,68
9	Sumatera Barat	280	31	1,01	36,93	74,39
10	Riau	237	36	1,00	40,38	30,87
11	Kepulauan Riau	223	32	1,06	41,42	54,10
12	Jambi	201	33	1,06	38,46	39,63
13	Sumatera Selatan	278	33	1,05	39,97	65,29
14	Bangka Belitung	246	31	1,10	35,45	67,72
15	Bengkulu	222	31	1,09	36,01	52,85
16	Lampung	257	34	0,97	40,58	37,12
17	Kalimantan Barat	181	33	1,01	38,59	41,00
18	Kalimantan Tengah	129	32	1,07	30,31	34,47
19	Kalimantan Selatan	185	30	1,11	34,27	44,58
20	Kalimantan Timur	222	34	1,12	35,79	42,29
21	Sulawesi Utara	166	30	1,06	36,72	35,67
22	Gorontalo	147	30	1,13	31,58	19,08
23	Sulawesi Tengah	167	37	1,04	26,75	14,74
24	Sulawesi Selatan	268	39	0,97	34,77	23,77
25	Sulawesi Barat	204	38	1,08	32,28	38,25
26	Sulawesi Tenggara	185	34	1,04	33,75	31,88
27	Maluku	166	31	1,08	38,28	44,32
28	Maluku Utara	152	38	1,13	27,48	49,11
29	Bali	447	36	1,00	37,53	81,11
30	NTB	251	37	0,98	32,43	52,71
31	NTT	221	36	1,09	30,09	22,13
32	Papua	201	32	1,14	33,52	39,46
33	Papua Barat	180	33	1,13	31,67	45,70
	Indonesia	280	34	0,99	40,08	55,79

R-S/K SMP berkisar antara 30 terendah (Gorontalo, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara) sampai 39 tertinggi (Jawa Barat dan Sulawesi Selatan) dengan angka nasional sebesar 34. Dengan demikian, kelas telah didayagunakan secara maksimal karena nilainya sebesar 106,25% lebih dari 100%. Kisaran ini telah melebihi dari standar ideal R-S/K, yaitu 32. R-S/K lebih tinggi atau sama dengan nasional terdapat di 13 provinsi (39,39%), yaitu 1) Jawa Barat, 2) Sulawesi Selatan, 3) Maluku Utara, 4) Sulawesi Barat, 5) Sulawesi Tengah, 6) NTB, 7) NTT, 8) Riau, 9) Bali, 10) Banten, 11) Sulawesi Tenggara, 12) Kalimantan Timur, dan 13) Lampung. Sisanya, sebanyak 20 provinsi (60,61%) lebih rendah dari R-S/K nasional. Rendahnya R-S/K menunjukkan bahwa sekolah tidak terisi sesuai dengan kapasitas yang ada.

R-K/RK SMP berkisar antara 0,93 terendah (Jawa Barat) sampai 1,14 tertinggi (Papua) dengan angka nasional sebesar 0,99. Hal ini berarti bahwa secara nasional terjadi kelebihan ruang kelas sebesar 1%. R-K/RK pada provinsi Riau dan Bali dalam kondisi ideal. Terdapat 9 provinsi (27,27%)

lebih rendah dari standar ideal atau di bawah 1,00 yang berarti telah kelebihan ruang kelas. Sisanya, sebanyak 22 provinsi (66,67%) memiliki R-K/RK lebih tinggi dari standar ideal (1,00), yaitu 1) Papua, 2) Gorontalo, 3) Papua Barat, 4) Maluku Utara, 5) Kalimantan Timur, 6) Kalimantan Selatan, 7) Bangka Belitung, 8) Bengkulu, 9) NTT, 10) Aceh, 11) Sulawesi Barat, 12) Maluku, 13) Kalimantan Tengah, 14) Sulawesi Utara, 15) Jambi, 16) Kepulauan Riau, 17) Sumatera Selatan, 18) Sulawesi Tengah, 19) Sulawesi Tenggara, 20) DI Yogyakarta, 21) Kalimantan Barat, dan 22) Sumatera Barat yang berarti masih ada ruang kelas yang digunakan lebih dari satu kali kegiatan belajar.

%Perpus SMP berkisar antara 26,75% terendah (Sulawesi Tengah) hingga 53,90% tertinggi (Jawa Tengah), dengan angka nasional sebesar 40,08%. Hal ini berarti masih 59,92% sekolah belum memiliki laboratorium. Bila dibandingkan antarprovinsi, %Perpus SMP yang lebih baik dari nasional terdapat di 7 provinsi (21,21%), yaitu 1) Jawa Tengah, 2) Jawa Timur, 3) DI Yogyakarta, 4) Jawa Barat, 5) Kepulauan Riau, 6) Lampung dan 7) Riau. Sisanya, sebanyak 26 provinsi (78,79%) lebih rendah dari %perpus nasional. Adanya 59,92% sekolah yang belum memiliki laboratorium menunjukkan mutu pendidikan belum menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan di SMP padahal SMP termasuk dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

%Lab SMP berkisar antara 14,74% terendah (Sulawesi Tengah) hingga 121,95% tertinggi (DKI Jakarta), dengan angka nasional sebesar 55,79%. Hal ini berarti masih 44,21% sekolah belum memiliki laboratorium. Sebanyak 2 provinsi memiliki %Lab melebihi 100% akibat sekolah memiliki laboratorium lebih dari 1, (IPA dan Bahasa), yaitu DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Bila dibandingkan antarprovinsi, %Lab SMP yang lebih baik dari nasional terdapat di 10 provinsi (30,30%), yaitu termasuk provinsi yang memiliki melebihi 100% dan 3)Jawa Tengah, 4) Bali, 5) Sumatera Barat, 6) Jawa Timur, 7) Aceh, 8) Bangka Belitung, 9) Sumatera Selatan, dan 10) Sumatera Utara. Adanya 44,21% sekolah yang belum memiliki laboratorium menunjukkan mutu pendidikan belum menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan di SMP padahal SMP termasuk dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Tabel 4.7 merupakan lima indikator ketersediaan layanan pendidikan SMP yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai ketersediaan layanan pendidikan SMP. Pada tingkat nasional, R-S/Sek sebesar 77,76, R-S/K sebesar 100,00, R-K/RK sebesar 99,27, %Perpus sebesar 40,08, dan %Lab sebesar 55,79 sehingga nilai ketersediaan layanan pendidikan SMP menjadi 74,58. Hal ini berarti ketersediaan layanan pendidikan SMP tercapai sekitar 75% dengan nilai terendah (54,89) terjadi di Gorontalo dan tertinggi (86,46) terjadi di Jawa Tengah.

Tabel 4.7
Ketersediaan Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpust	% Lab	Nilai
1	DKI Jakarta	100,00	95,86	97,99	35,84	100,00	85,94
2	Jawa Barat	100,00	100,00	92,66	41,89	50,19	76,95
3	Banten	92,65	100,00	96,60	34,82	51,89	75,19
4	Jawa Tengah	100,00	100,00	97,07	53,90	81,33	86,46
5	DI Yogyakarta	72,63	96,81	97,52	48,85	100,00	83,16
6	Jawa Timur	82,68	100,00	97,55	50,37	73,60	80,84
7	Aceh	60,26	94,12	91,74	39,03	69,46	70,92
8	Sumatera Utara	77,07	100,00	97,00	35,78	63,68	74,71
9	Sumatera Barat	77,70	97,80	98,69	36,93	74,39	77,10
10	R i a u	65,87	100,00	99,90	40,38	30,87	67,40
11	Kepulauan Riau	62,06	99,26	94,27	41,42	54,10	70,22
12	J a m b i	55,89	100,00	94,07	38,46	39,63	65,61
13	Sumatera Selatan	77,29	100,00	95,48	39,97	65,29	75,60
14	Bangka Belitung	68,24	97,57	90,65	35,45	67,72	71,93
15	Bengkulu	61,62	97,88	91,62	36,01	52,85	68,00
16	Lampung	71,51	100,00	97,01	40,58	37,12	69,24
17	Kalimantan Barat	50,32	100,00	98,63	38,59	41,00	65,71
18	Kalimantan Tengah	35,96	100,00	93,09	30,31	34,47	58,77
19	Kalimantan Selatan	51,34	92,92	90,10	34,27	44,58	62,64
20	Kalimantan Timur	61,76	100,00	89,03	35,79	42,29	65,77
21	Sulawesi Utara	46,03	92,54	94,05	36,72	35,67	61,00
22	Gorontalo	40,87	94,64	88,29	31,58	19,08	54,89
23	Sulawesi Tengah	46,29	100,00	96,24	26,75	14,74	56,80
24	Sulawesi Selatan	74,40	100,00	96,77	34,77	23,77	65,94
25	Sulawesi Barat	56,54	100,00	92,62	32,28	38,25	63,94
26	Sulawesi Tenggara	51,52	100,00	96,33	33,75	31,88	62,69
27	Maluku	46,18	96,42	92,83	38,28	44,32	63,60
28	Maluku Utara	42,28	100,00	88,89	27,48	49,11	61,55
29	B a l i	100,00	100,00	99,58	37,53	81,11	83,64
30	NTB	69,70	100,00	97,76	32,43	52,71	70,52
31	NTT	61,34	100,00	91,69	30,09	22,13	61,05
32	Papua	55,78	100,00	87,80	33,52	39,46	63,31
33	Papua Barat	50,11	100,00	88,71	31,67	45,70	63,24
	Indonesia	77,76	100,00	99,27	40,08	55,79	74,58

Berdasarkan standar ideal maka terdapat 4 provinsi (12,12%) yang ketersediaan layanan pendidikan kondisi utama (81-90), 3 provinsi (9,09%) kondisi madya (76-80), 4 provinsi (12,12%) kondisi pratama (71-75), dan 22 provinsi (66,67%) provinsi kurang (≤ 70). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal pendidikan di SMP adalah 74,58 termasuk kategori pratama. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena pendidikan SMP termasuk dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tetapi ternyata secara nasional ketersediaan layanan masih kurang.

4. Sekolah Menengah (SM)

Hasil analisis lima indikator ketersediaan layanan pendidikan SM tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.8. R-S/Sek SM berkisar antara 184 terendah (Maluku Utara) dan 474 tertinggi (Jawa Tengah) dengan rata-rata nasional 375. Bila digunakan standar ideal sebesar 480, belum ada yang melampaui standar ideal yang berarti sekolah belum didayagunakan secara maksimal. Terdapat 8 Provinsi (24,24%) yang telah melebihi nasional, yaitu 1) Jawa

Tengah, 2) Bali, 3) Sumatera Barat, 4) Jawa Timur, 5) Jawa Barat, 6) Gorontalo, 7) DKI Jakarta, dan 8) NTT. Sisanya, sebanyak 25 provinsi (75,76%) memiliki R-S/K lebih rendah atau sama dengan nasional.

Tabel 4.8
Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpust	% Lab
1	DKI Jakarta	385	37	0,98	80,91	42,67
2	Jawa Barat	413	34	1,05	50,63	26,48
3	Banten	347	34	0,95	53,01	26,55
4	Jawa Tengah	474	34	0,96	67,71	41,71
5	DI Yogyakarta	364	32	0,96	86,90	43,85
6	Jawa Timur	428	37	0,98	70,98	32,37
7	Aceh	336	32	1,03	60,26	32,65
8	Sumatera Utara	355	36	1,00	53,75	31,23
9	Sumatera Barat	467	32	1,08	76,99	34,29
10	Riau	357	32	1,06	79,08	22,11
11	Kepulauan Riau	292	30	0,94	57,32	35,85
12	Jambi	318	32	0,97	61,14	25,66
13	Sumatera Selatan	371	34	1,03	56,99	30,07
14	Bangka Belitung	362	35	0,84	58,41	46,55
15	Bengkulu	353	32	0,98	70,20	30,20
16	Lampung	309	34	0,99	52,48	25,46
17	Kalimantan Barat	288	36	0,92	42,31	26,88
18	Kalimantan Tengah	237	31	1,05	27,85	26,98
19	Kalimantan Selatan	331	32	0,97	64,44	33,11
20	Kalimantan Timur	303	35	0,96	56,83	27,20
21	Sulawesi Utara	282	34	0,90	44,07	25,08
22	Gorontalo	402	30	1,13	59,57	32,34
23	Sulawesi Tengah	301	35	1,00	46,74	19,93
24	Sulawesi Selatan	363	36	1,14	38,28	42,48
25	Sulawesi Barat	313	32	1,31	15,33	22,19
26	Sulawesi Tenggara	300	35	1,12	36,66	18,89
27	Maluku	264	37	0,95	42,86	21,86
28	Maluku Utara	184	28	1,05	36,89	15,49
29	Bali	473	37	0,97	78,37	42,13
30	NTB	328	32	1,26	42,61	22,52
31	NTT	379	29	1,14	54,29	24,81
32	Papua	278	29	0,98	65,89	28,53
33	Papua Barat	252	34	1,08	35,14	20,68
	Indonesia	375	34	1,01	58,63	31,14

R-S/K SM berkisar antara 28 (Maluku Utara) terendah dan 37 (Maluku, DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur) tertinggi, dengan rata-rata nasional sebesar 34. Apabila dikaitkan dengan standar ideal (32) maka norma nasional lebih tinggi dan berarti pendayagunaannya mencapai 106,25%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makin rendah R-S/K maka proses belajar mengajar makin baik karena perhatian guru terhadap siswa akan lebih banyak jika dibandingkan R-S/K yang lebih tinggi. Terdapat 11 provinsi (33,33%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu 1) Maluku, 2) DKI Jakarta, 3) Bali, 4) Jawa Timur, 5) Kalimantan Barat, 6) Sumatera Utara, 7) Sulawesi Selatan, 8) Sulawesi Tenggara, 9) Bangka Belitung, 10) Kalimantan Tengah, dan 11) Sulawesi Tengah. Sebaliknya, provinsi dengan R-S/K lebih rendah dari norma nasional terdapat di 22 provinsi (66,67%).

R-K/RK SM berkisar antara 0,84 terendah (Bangka Belitung) dan 1,31 tertinggi (Sulawesi Barat) dengan rata-rata nasional sebesar 1,01. Rata-rata nasional menunjukkan terdapat 1% ruang kelas yang digunakan lebih dari satu kali. Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah telah ideal (1,00). Sementara itu, terdapat 17 provinsi (51,52%) dengan rasio kurang dari 1,00 menunjukkan terdapat ruang kelas SM belum digunakan atau digunakan untuk kegiatan lain, yaitu 1) Lampung, 2) Jawa Timur, 3) DKI Jakarta, 4) Bengkulu, 5) Papua, 6) Jambi, 7) Bali, 8) Kalimantan Selatan, 9) DI Yogyakarta, 10) Kalimantan Timur, 11) Jawa Tengah, 12) Banten, 13) Maluku, 14) Kepulauan Riau, 15) Kalimantan Barat, 16) Sulawesi Utara dan 17) Bangka Belitung. Sisanya, 14 provinsi lainnya masih banyak ruang kelas yang digunakan lebih dari satu kali kegiatan belajar.

%Perpus SM berkisar antara 15,33% terendah (Sulawesi Barat) hingga 86,90% tertinggi (DI Yogyakarta), dengan angka nasional sebesar 58,63%. Hal ini berarti masih 41,37% sekolah belum memiliki laboratorium. Bila dibandingkan antarprovinsi, %Perpus SM yang lebih baik dari nasional terdapat di 13 provinsi (39,39%), yaitu 1) DI Yogyakarta, 2) DKI Jakarta, 3) Riau, 4) Bali, 5) Sumatera Barat, 6) Jawa Timur, 7) Bengkulu, 8) Jawa Tengah, 9) Papua, 10) Kalimantan Selatan, 11) Jambi, 12) Aceh, dan 13) Gorontalo. Sisanya, sebanyak 20 provinsi (60,61%) lebih rendah dari %perpus nasional.

%Lab SM berkisar antara 15,49% terendah (Maluku Utara) hingga 46,55% tertinggi (Bangka Belitung), dengan angka nasional sebesar 31,14%. Hal ini berarti masih 68,86% sekolah belum memiliki laboratorium. Kecilnya %Lab ini dikarenakan dalam perhitungan satu sekolah harus mempunyai 5 laboratorium. Bila dibandingkan antarprovinsi, %Lab SM yang lebih baik dari nasional terdapat di 13 provinsi (39,39%), yaitu 1) Bangka Belitung, 2) DI Yogyakarta, 3) DKI Jakarta, 4) Sulawesi Selatan, 5) Bali, 6) Jawa Tengah, 7) Kepulauan Riau, 8) Sumatera Barat, 9) Kalimantan Selatan, 10) Aceh, 11) Jawa Timur, 12) Gorontalo, dan 13) Sumatera Utara. Sisanya, 20 provinsi (60,61%) lainnya lebih rendah dari standar nasional.

Tabel 4.9 merupakan lima indikator ketersediaan layanan pendidikan yang telah dikonversi sehingga menghasilkan nilai ketersediaan layanan pendidikan di SM. Pada tingkat nasional R-S/Sek sebesar 78,12, R-S/K sebesar 100, R-K/RK sebesar 98,99, %Perpus sebesar 58,63, dan %Lab sebesar 31,14 sehingga nilai ketersediaan layanan pendidikan SM menjadi 73,38. Hal ini berarti ketersediaan layanan pendidikan SM sebesar 73% dengan nilai tertinggi di (83,27) terjadi di Bali dan terendah (54,92) terjadi di Maluku Utara.

Berdasarkan standar ideal terdapat 1 provinsi (3,03%) yang pendidikan di SM dalam kondisi utama (81-90), 5 provinsi (15,15%) kondisi madya (76-80), dan 9 provinsi (27,27%) kondisi pratama (71-75), sedangkan sisanya sebanyak 18 provinsi (54,55%) kondisi kurang (≤ 70). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal ketersediaan layanan pendidikan SM sebesar

73,38 adalah termasuk kategori pratama. Kondisi ini terjadi akibat pendidikan di SM lebih ditekankan pada peningkatan mutu.

Tabel 4.9
Ketersediaan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpust	% Lab	Nilai
1	DKI Jakarta	80,16	100,00	98,12	80,91	42,67	80,37
2	Jawa Barat	86,06	100,00	95,39	50,63	26,48	71,71
3	Banten	72,32	100,00	95,45	53,01	26,55	69,46
4	Jawa Tengah	98,74	100,00	95,60	67,71	41,71	80,75
5	DI Yogyakarta	75,89	100,00	96,49	86,90	43,85	80,63
6	Jawa Timur	89,24	100,00	98,27	70,98	32,37	78,17
7	Aceh	69,93	100,00	97,54	60,26	32,65	72,08
8	Sumatera Utara	74,05	100,00	99,97	53,75	31,23	71,80
9	Sumatera Barat	97,29	100,00	92,61	76,99	34,29	80,24
10	Riau	74,36	99,49	93,91	79,08	22,11	73,79
11	Kepulauan Riau	60,77	94,98	94,25	57,32	35,85	68,64
12	Jambi	66,35	100,00	97,43	61,14	25,66	70,12
13	Sumatera Selatan	77,26	100,00	96,82	56,99	30,07	72,23
14	Bangka Belitung	75,34	100,00	83,65	58,41	46,55	72,79
15	Bengkulu	73,44	99,97	98,11	70,20	30,20	74,39
16	Lampung	64,45	100,00	99,45	52,48	25,46	68,37
17	Kalimantan Barat	60,08	100,00	92,35	42,31	26,88	64,32
18	Kalimantan Tengah	49,39	96,36	95,68	27,85	26,98	59,25
19	Kalimantan Selatan	69,00	100,00	96,63	64,44	33,11	72,64
20	Kalimantan Timur	63,07	100,00	96,45	56,83	27,20	68,71
21	Sulawesi Utara	58,74	100,00	90,34	44,07	25,08	63,65
22	Gorontalo	83,77	94,20	88,84	59,57	32,34	71,74
23	Sulawesi Tengah	62,80	100,00	99,61	46,74	19,93	65,82
24	Sulawesi Selatan	75,66	100,00	87,71	38,28	42,48	68,83
25	Sulawesi Barat	65,26	99,93	76,08	15,33	22,19	55,76
26	Sulawesi Tenggara	62,41	100,00	89,34	36,66	18,89	61,46
27	Maluku	54,90	100,00	94,79	42,86	21,86	62,88
28	Maluku Utara	38,36	89,02	94,86	36,89	15,49	54,92
29	Bali	98,50	100,00	97,36	78,37	42,13	83,27
30	NTB	68,41	98,73	79,33	42,61	22,52	62,32
31	NTT	78,92	90,78	87,48	54,29	24,81	67,26
32	Papua	57,87	90,56	97,79	65,89	28,53	68,13
33	Papua Barat	52,51	100,00	92,62	35,14	20,68	60,19
	Indonesia	78,12	100,00	98,99	58,63	31,14	73,38

5. Perguruan Tinggi (PT)

Hasil analisis satu indikator ketersediaan layanan pendidikan PT tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.10. R-Mhs/Lbg PT berkisar antara 598 terkecil (Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung) dan 3.749 tertinggi (Kalimantan Tengah), dengan rata-rata nasional 1.772. Hal ini berarti rata-rata setiap lembaga terdapat 1.772 mahasiswa. Perbedaan antara R-Mhs/Lbg PT terendah dan tertinggi menunjukkan variasi yang besar antarprovinsi. Bila digunakan norma nasional 1.772, terdapat 10 Provinsi (30,30%) yang telah mencapai norma nasional, yaitu 1) Kalimantan Tengah, 2) DKI Jakarta, 3) Gorontalo, 4) Bengkulu, 5) NTB, 6) Sulawesi Tengah, 7) Jawa Timur, 8) Maluku, 9) DI Yogyakarta, dan 10) Sulawesi Tenggara. Sisanya, sebanyak 23 provinsi (69,70%) memiliki R-Mhs/Lbg lebih rendah dari nasional.

Tabel 4.10
Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	R-M/L	No.	Provinsi	R-M/L
1	DKI Jakarta	3.036	18	Kalimantan Tengah	3.749
2	Jawa Barat	1.637	19	Kalimantan Selatan	598
3	Banten	1.092	20	Kalimantan Timur	1.348
4	Jawa Tengah	1.571	21	Sulawesi Utara	1.141
5	DI Yogyakarta	1.938	22	Gorontalo	2.969
6	Jawa Timur	2.035	23	Sulawesi Tengah	2.091
7	Aceh	1.631	24	Sulawesi Selatan	1.569
8	Sumatera Utara	1.459	25	Sulawesi Barat	1.663
9	Sumatera Barat	1.463	26	Sulawesi Tenggara	1.787
10	Riau	1.524	27	Maluku	1.959
11	Kepulauan Riau	1.115	28	Maluku Utara	1.673
12	Jambi	1.194	29	Bali	1.445
13	Sumatera Selatan	1.519	30	NTB	2.277
14	Bangka Belitung	598	31	NTT	1.762
15	Bengkulu	2.912	32	Papua	1.127
16	Lampung	1.523	33	Papua Barat	1.305
17	Kalimantan Barat	1.410		Indonesia	1.772

Tabel 4.11 merupakan indikator ketersediaan layanan pendidikan yang telah dikonversi menghasilkan nilai ketersediaan layanan pendidikan PT. Pada tingkat nasional, R-Mhs/L sebesar 100,00, sehingga nilai ketersediaan layanan pendidikan PT juga sebesar 100,00. Nilai ketersediaan layanan pendidikan PT dengan nilai tertinggi (100,00) telah maksimal terjadi di 20 provinsi (60,61%) dan terendah (39,78) terjadi di Kalimantan Selatan.

Tabel 4.11
Ketersediaan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	R-M/L	Nilai	No.	Provinsi	R-M/L	Nilai
1	DKI Jakarta	100,00	100,00	18	Kalimantan Tengah	100,00	100,00
2	Jawa Barat	100,00	100,00	19	Kalimantan Selatan	39,78	39,78
3	Banten	72,68	72,68	20	Kalimantan Timur	89,65	89,65
4	Jawa Tengah	100,00	100,00	21	Sulawesi Utara	75,89	75,89
5	DI Yogyakarta	100,00	100,00	22	Gorontalo	100,00	100,00
6	Jawa Timur	100,00	100,00	23	Sulawesi Tengah	100,00	100,00
7	Aceh	100,00	100,00	24	Sulawesi Selatan	100,00	100,00
8	Sumatera Utara	97,08	97,08	25	Sulawesi Barat	100,00	100,00
9	Sumatera Barat	97,32	97,32	26	Sulawesi Tenggara	100,00	100,00
10	R i a u	100,00	100,00	27	Maluku	100,00	100,00
11	Kepulauan Riau	74,21	74,21	28	Maluku Utara	100,00	100,00
12	J a m b i	79,46	79,46	29	B a l i	96,11	96,11
13	Sumatera Selatan	100,00	100,00	30	NTB	100,00	100,00
14	Bangka Belitung	39,80	39,80	31	NTT	100,00	100,00
15	Bengkulu	100,00	100,00	32	Papua	74,98	74,98
16	Lampung	100,00	100,00	33	Papua Barat	86,82	86,82
17	Kalimantan Barat	93,78	93,78		Indonesia	100,00	100,00

Berdasarkan standar ideal maka terdapat 24 provinsi (72,73%) dalam kondisi paripurna (91-100), terdapat 2 provinsi (6,06%) dalam kondisi utama (81-90), 1 provinsi (3,03%) dalam kondisi madya (76-80), 4 provinsi (12,12%) dalam kondisi pratama (71-75), dan 2 provinsi (6,06%) dalam kondisi kurang (≤ 70). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal ketersediaan layanan PT sebesar 100 termasuk kategori paripurna.

6. Semua Jenjang

Dengan melihat kebijakan pemerintah di mana SD dan SMP termasuk dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun seharusnya ketersediaan layanan pendidikan pada SD dan SMP paling besar. Untuk SM dan PT dapat terjadi ketersediaan kurang karena kebijakan pemerintah untuk kedua jenjang pendidikan tersebut lebih ditekankan pada mutu pendidikan. Pada TK saat sekarang adalah peningkatan peserta didik. Namun, pada kenyataannya dapat dilihat apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi di setiap provinsi.

Tabel 4.12
Kinerja Ketersediaan Layanan Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TK	SD	SMP	SM	PT	Rata-rata
1	DKI Jakarta	99,88	92,87	85,94	80,37	100,00	91,81
2	Jawa Barat	96,97	92,88	76,95	71,71	100,00	87,70
3	Banten	90,05	93,07	75,19	69,46	72,68	80,09
4	Jawa Tengah	97,84	85,67	86,46	80,75	100,00	90,14
5	DI Yogyakarta	99,74	81,44	83,16	80,63	100,00	88,99
6	Jawa Timur	99,88	83,64	80,84	78,17	100,00	88,51
7	Aceh	96,97	82,84	70,92	72,08	100,00	84,56
8	Sumatera Utara	86,71	89,45	74,71	71,80	97,08	83,95
9	Sumatera Barat	99,11	83,10	77,10	80,24	97,32	87,37
10	Riau	86,53	93,84	67,40	73,79	100,00	84,31
11	Kepulauan Riau	97,54	83,18	70,22	68,64	74,21	78,76
12	Jambi	97,93	82,78	65,61	70,12	79,46	79,18
13	Sumatera Selatan	95,27	91,03	75,60	72,23	100,00	86,82
14	Bangka Belitung	97,51	84,96	71,93	72,79	39,80	73,40
15	Bengkulu	90,00	89,03	68,00	74,39	100,00	84,28
16	Lampung	99,94	96,13	69,24	68,37	100,00	86,74
17	Kalimantan Barat	84,23	77,41	65,71	64,32	93,78	77,09
18	Kalimantan Tengah	98,07	72,84	58,77	59,25	100,00	77,79
19	Kalimantan Selatan	91,12	76,81	62,64	72,64	39,78	68,60
20	Kalimantan Timur	99,37	86,51	65,77	68,71	89,65	82,00
21	Sulawesi Utara	98,70	72,49	61,00	63,65	75,89	74,35
22	Gorontalo	97,70	90,70	54,89	71,74	100,00	83,01
23	Sulawesi Tengah	97,50	72,10	56,80	65,82	100,00	78,44
24	Sulawesi Selatan	97,05	81,17	65,94	68,83	100,00	82,60
25	Sulawesi Barat	93,37	76,65	63,94	55,76	100,00	77,94
26	Sulawesi Tenggara	84,80	71,89	62,69	61,46	100,00	76,17
27	Maluku	96,70	84,88	63,60	62,88	100,00	81,61
28	Maluku Utara	92,66	77,11	61,55	54,92	100,00	77,25
29	Bali	82,66	83,68	83,64	83,27	96,11	85,87
30	NTB	98,46	90,65	70,52	62,32	100,00	84,39
31	NTT	95,30	84,83	61,05	67,26	100,00	81,69
32	Papua	98,54	76,86	63,31	68,13	74,98	76,37
33	Papua Barat	72,90	71,77	63,24	60,19	86,82	70,98
	Indonesia	98,47	86,88	74,58	73,38	100,00	86,66

Tabel 4.12 menunjukkan ketersediaan layanan pendidikan provinsi untuk 5 jenjang pendidikan. Berdasarkan angka nasional maka ketersediaan layanan pendidikan sebesar 86,66 berarti hampir 87% dengan nilai terendah (68,60) terjadi di Kalimantan Selatan dan nilai tertinggi (91,81) terjadi di DKI Jakarta.

Berdasarkan standar ideal maka 1 provinsi (3,03%) termasuk paripurna (91-100), 18 provinsi (54,55%) termasuk utama (81-90), 10 provinsi (30,30%) termasuk madya (76-80), dan 2 provinsi (6,06%) termasuk pratama (71-75), dan 2 provinsi (6,06%) termasuk kurang (≤ 70). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal ketersediaan layanan pendidikan sebesar 86,66 termasuk kategori madya.

B. Misi K-2: Keterjangkauan Layanan Pendidikan

Misi K-2 keterjangkauan layanan pendidikan menggunakan dua indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui kinerja keterjangkauan layanan. Tabel 4.13 menunjukkan perbandingan indikator keterjangkauan layanan pendidikan antara jenjang pendidikan. Dari segi pelayanan, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan TPS makin tinggi kecuali TK yang berarti semakin besar angkanya semakin buruk pelayanannya. TPS sebesar 276 di TK menurun menjadi 41 di SD menjadi 87 di SMP, dan menjadi 78 di SM. Hal ini menunjukkan bahwa TK mempunyai pelayanan yang paling buruk, sedangkan SD mempunyai pelayanan yang terbaik. Dari segi keterjangkauan, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan DT makin tinggi. DT sebesar 181 di SD meningkat menjadi 376 di SMP, meningkat menjadi 576 di SM dan menjadi 696 di PT. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi jenjang pendidikan DT semakin besar yang berarti makin luas jangkauannya.

Tabel 4.13
Perbandingan Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan
Tahun 2011/2012

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal	Angka Nasional				
			TK	SD	SMP	SM	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	TPS	341/45/88/67	276	41	87	78	-
2.	DT	166/364/576/6231	-	181	376	576	696

1. TK

Hasil analisis indikator keterjangkauan layanan pendidikan TK di tiap provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 4.14. TPS berkisar antara 106 terkecil (Bali) yang berarti terbaik hingga 648 tertinggi (NTT) yang berarti terburuk, dengan angka nasional 276. Hal ini berarti setiap sekolah melayani sebanyak 276 anak.

Tabel 4.14
Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TPS	No.	Provinsi	TPS
1	DKI Jakarta	364	18	Kalimantan Tengah	225
2	Jawa Barat	520	19	Kalimantan Selatan	165
3	Banten	410	20	Kalimantan Timur	312
4	Jawa Tengah	219	21	Sulawesi Utara	271
5	DI Yogyakarta	207	22	Gorontalo	134
6	Jawa Timur	150	23	Sulawesi Tengah	204
7	Aceh	414	24	Sulawesi Selatan	230
8	Sumatera Utara	393	25	Sulawesi Barat	220
9	Sumatera Barat	292	26	Sulawesi Tenggara	161
10	Riau	235	27	Maluku	646
11	Kepulauan Riau	342	28	Maluku Utara	405
12	Jambi	374	29	Bali	106
13	Sumatera Selatan	575	30	NTB	537
14	Bangka Belitung	222	31	NTT	648
15	Bengkulu	216	32	Papua	433
16	Lampung	318	33	Papua Barat	257
17	Kalimantan Barat	515		Indonesia	276

Bila dibandingkan antarprovinsi, TPS TK yang lebih buruk dari nasional terdapat di 17 provinsi (53,54%) sedangkan 16 provinsi lainnya (48,48%) memiliki TPS lebih baik dari nasional, yaitu 1) Bali, 2) Gorontalo, 3) Jawa Timur, 4) Sulawesi Tenggara, 5) Kalimantan Selatan, 6) Sulawesi Tengah, 7) DI Yogyakarta, 8) Bengkulu, 9) Jawa Tengah, 10) Sulawesi Barat, 11) Bangka Belitung, 12) Kalimantan Tengah, 13) Sulawesi Selatan, 14) Riau, 15) Papua Barat, dan 16) Sulawesi Utara.

Tabel 4.15
Keterjangkauan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TPS	Nilai	No.	Provinsi	TPS	Nilai
1	DKI Jakarta	93,62	93,62	18	Kalimantan Tengah	98,49	98,49
2	Jawa Barat	65,60	65,60	19	Kalimantan Selatan	97,93	97,93
3	Banten	83,26	83,26	20	Kalimantan Timur	98,91	98,91
4	Jawa Tengah	98,44	98,44	21	Sulawesi Utara	98,74	98,74
5	DI Yogyakarta	98,36	98,36	22	Gorontalo	97,46	97,46
6	Jawa Timur	97,72	97,72	23	Sulawesi Tengah	98,33	98,33
7	Aceh	82,28	82,28	24	Sulawesi Selatan	98,52	98,52
8	Sumatera Utara	86,72	86,72	25	Sulawesi Barat	98,45	98,45
9	Sumatera Barat	98,83	98,83	26	Sulawesi Tenggara	97,88	97,88
10	R i a u	98,55	98,55	27	Maluku	52,82	52,82
11	Kepulauan Riau	99,59	99,59	28	Maluku Utara	84,15	84,15
12	J a m b i	91,12	91,12	29	B a l i	96,79	96,79
13	Sumatera Selatan	59,30	59,30	30	NTB	63,54	63,54
14	Bangka Belitung	98,47	98,47	31	NTT	52,66	52,66
15	Bengkulu	98,42	98,42	32	Papua	78,80	78,80
16	Lampung	98,93	98,93	33	Papua Barat	98,67	98,67
17	Kalimantan Barat	66,27	66,27		Indonesia	98,76	98,76

Tabel 4.15 merupakan satu indikator keterjangkauan layanan pendidikan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai keterjangkauan layanan pendidikan TK. Pada tingkat nasional, TPS sebesar 98,76, sehingga nilai keterjangkauan juga sebesar 98,76. Hal ini berarti keterjangkauan layanan pendidikan TK sebesar 99% dengan nilai keterjangkauan layanan pendidikan TK tertinggi di Kepulauan Riau (99,59) dan terendah di NTT (52,66).

Dengan menggunakan standar ideal maka 22 provinsi (66,67%) termasuk paripurna (91-100), 4 provinsi (12,12%) termasuk utama (81-90), 1 provinsi (3,03%) termasuk madya (76-80), dan 6 provinsi (18,18%) termasuk kurang (≤ 70). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal dapat disimpulkan bahwa keterjangkauan layanan pendidikan TK sebesar 98,76 termasuk paripurna.

2. SD

Hasil analisis dua indikator keterjangkauan layanan pendidikan SD di tiap provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 4.16. TPS berkisar antara 26 terkecil (Sulawesi Tenggara) yang berarti terbaik hingga 55 tertinggi (Banten) yang berarti terburuk, dengan angka nasional 41. Hal ini berarti setiap sekolah melayani sebanyak 41 anak. Bila dibandingkan antarprovinsi, TPS SD yang lebih buruk dari nasional terdapat di 10 provinsi (30,30%), yaitu 1) Banten, 2) DKI Jakarta, 3) Jawa Barat, 4) NTB, 5) Lampung, 6) Riau, 7) Sumatera Utara, 8) Jawa Timur, 9) Jawa Tengah, dan 10) Sumatera Selatan, sedangkan 23 provinsi lainnya (69,70%) memiliki TPS lebih baik atau sama dari nasional.

Tabel 4.16
Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TPS	DT	No.	Provinsi	TPS	DT
1	DKI Jakarta	52	262	18	Kalimantan Tengah	27	115
2	Jawa Barat	49	229	19	Kalimantan Selatan	34	143
3	Banten	55	275	20	Kalimantan Timur	36	184
4	Jawa Tengah	42	169	21	Sulawesi Utara	27	116
5	DI Yogyakarta	32	140	22	Gorontalo	36	154
6	Jawa Timur	42	179	23	Sulawesi Tengah	30	131
7	Aceh	41	179	24	Sulawesi Selatan	36	157
8	Sumatera Utara	42	184	25	Sulawesi Barat	33	139
9	Sumatera Barat	34	143	26	Sulawesi Tenggara	26	139
10	Riau	43	211	27	Maluku	34	143
11	Kepulauan Riau	40	191	28	Maluku Utara	31	127
12	Jambi	34	158	29	Bali	34	151
13	Sumatera Selatan	42	197	30	NTB	48	187
14	Bangka Belitung	36	171	31	NTT	35	158
15	Bengkulu	36	155	32	Papua	37	163
16	Lampung	45	199	33	Papua Barat	41	136
17	Kalimantan Barat	33	148		Indonesia	41	181

DT SD berkisar antara 115 terkecil (Kalimantan Tengah) yang berarti terburuk hingga 275 terbesar (Banten) yang berarti terbaik, dengan angka nasional 181. Hal ini berarti setiap jangkauan layanan sekolah sebanyak 181. Bila dibandingkan antarprovinsi, DT SD yang lebih baik dari nasional terdapat di 10 provinsi (30,30%), yaitu 1) Banten, 2) DKI Jakarta, 3) Jawa Barat, 4) Riau, 5) Lampung, 6) Sumatera Selatan, 7) Kepulauan Riau, 8) NTB, 9) Sumatera Utara, dan 10) Kalimantan Timur, sedangkan 23 provinsi lainnya (69,70%) memiliki DT lebih buruk dari nasional.

Tabel 4.17
Keterjangkauan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TPS	DT	Nilai	No.	Provinsi	TPS	DT	Nilai
1	DKI Jakarta	87.36	63.44	75.40	18	Kalimantan Tengah	98.34	98.56	98.45
2	Jawa Barat	92.26	72.48	82.37	19	Kalimantan Selatan	98.67	98.84	98.76
3	Banten	82.31	60.39	71.35	20	Kalimantan Timur	98.74	90.20	94.47
4	Jawa Tengah	98.92	98.20	98.56	21	Sulawesi Utara	98.34	98.57	98.45
5	DI Yogyakarta	98.60	98.82	98.71	22	Gorontalo	98.76	98.92	98.84
6	Jawa Timur	98.92	92.56	95.74	23	Sulawesi Tengah	98.51	98.73	98.62
7	Aceh	98.91	92.96	95.93	24	Sulawesi Selatan	98.74	98.94	98.84
8	Sumatera Utara	98.93	90.19	94.56	25	Sulawesi Barat	98.63	98.81	98.72
9	Sumatera Barat	98.68	98.84	98.76	26	Sulawesi Tenggara	98.29	98.81	98.55
10	R i a u	98.94	78.57	88.76	27	Maluku	98.68	98.84	98.76
11	Kepulauan Riau	98.86	86.77	92.82	28	Maluku Utara	98.53	98.69	98.61
12	J a m b i	98.67	98.95	98.81	29	B a l i	98.69	98.90	98.80
13	Sumatera Selatan	98.92	84.42	91.67	30	NTB	94.28	88.73	91.50
14	Bangka Belitung	98.74	97.08	97.91	31	NTT	98.70	98.95	98.82
15	Bengkulu	98.76	98.93	98.85	32	Papua	98.79	98.98	98.88
16	Lampung	98.99	83.38	91.19	33	Papua Barat	98.90	98.78	98.84
17	Kalimantan Barat	98.63	98.88	98.75		Indonesia	98.90	91.94	95.42

Tabel 4.17 merupakan 2 indikator keterjangkauan layanan pendidikan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai keterjangkauan layanan SD. Pada tingkat nasional, TPS sebesar 98,90 dan DT sebesar 91,94 sehingga nilai keterjangkauan sebesar 95,42. Hal ini berarti keterjangkauan layanan SD sebesar 95% dengan nilai keterjangkauan layanan pendidikan SD terkecil terjadi di Banten (71,35) dan terbesar terjadi di Papua (98,88).

Berdasarkan standar ideal maka 29 provinsi (87,88%) termasuk paripurna (91-100), 2 provinsi (6,06%) termasuk utama (81-90), dan 2 provinsi (6,06%) termasuk pratama (71-75). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal dapat disimpulkan bahwa keterjangkauan layanan pendidikan SD sebesar 95,42 termasuk paripurna.

3. SMP

Hasil analisis dua indikator keterjangkauan layanan SMP di tiap provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 4.18. TPS SMP berkisar antara 63 terkecil (Kepulauan Riau) yang berarti terbaik hingga 108 tertinggi (NTB) yang berarti terburuk, dengan angka nasional 87. Hal ini berarti setiap sekolah

melayani sebanyak 87 anak. Bila dibandingkan antarprovinsi, TPS SMP yang lebih buruk dari nasional terdapat di 15 provinsi (45,45%) sedangkan 18 provinsi lainnya (54,55%) memiliki TPS lebih baik dari nasional, yaitu 1) Jawa Tengah, 2) Sumatera Utara, 3) Sumatera Selatan, 4) Jawa Timur, 5) NTT, 6) Gorontalo, 7) Maluku, 8) Bangka Belitung, 9) Kalimantan Timur, 10) Bengkulu, 11) Bali, 12) Aceh, 13) Papua, 14) DKI Jakarta, 15) Sulawesi Utara, 16) DI Yogyakarta, 17) Papua Barat, dan 18) Kepulauan Riau.

Tabel 4.18
Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TPS	DT	No.	Provinsi	TPS	DT
1	DKI Jakarta	70	368	18	Kalimantan Tengah	98	207
2	Jawa Barat	94	570	19	Kalimantan Selatan	94	353
3	Banten	99	494	20	Kalimantan Timur	76	264
4	Jawa Tengah	87	542	21	Sulawesi Utara	66	180
5	DI Yogyakarta	65	276	22	Gorontalo	81	206
6	Jawa Timur	83	424	23	Sulawesi Tengah	99	241
7	Aceh	73	292	24	Sulawesi Selatan	94	332
8	Sumatera Utara	87	342	25	Sulawesi Barat	98	273
9	Sumatera Barat	90	344	26	Sulawesi Tenggara	91	222
10	Riau	93	303	27	Maluku	80	194
11	Kepulauan Riau	63	232	28	Maluku Utara	96	200
12	Jambi	102	278	29	Bali	74	431
13	Sumatera Selatan	86	361	30	NTB	108	363
14	Bangka Belitung	79	303	31	NTT	83	277
15	Bengkulu	76	264	32	Papua	70	267
16	Lampung	96	371	33	Papua Barat	65	276
17	Kalimantan Barat	90	252		Indonesia	87	376

DT SMP berkisar antara 180 terkecil (Sulawesi Utara) yang berarti terburuk hingga 570 terbesar (Jawa Barat) yang berarti terbaik, dengan angka nasional 376. Hal ini berarti jangkauan layanan sekolah sebanyak 376. Bila dibandingkan antarprovinsi, DT SMP yang lebih baik dari nasional terdapat di 5 provinsi (15,15%) yaitu 1) Jawa Barat, 2) Jawa Tengah, 3) Banten, 4) Bali, dan 5) Jawa Timur, sedangkan 28 provinsi lainnya (84,85%) memiliki DT lebih buruk dari nasional.

Tabel 4.19 merupakan 2 indikator keterjangkauan layanan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai keterjangkauan layanan pendidikan SMP. Pada tingkat nasional, TPS sebesar 98,99 dan DT sebesar 96,70 sehingga nilai keterjangkauan layanan pendidikan SMP menjadi 97,85. Hal ini berarti keterjangkauan SMP tercapai sebesar 97% dengan keterjangkauan terbesar di Sumatera Selatan (98,99) dan terkecil di Jawa Barat (78,34).

Tabel 4.19
Keterjangkauan Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TPS	DT	Nilai	No.	Provinsi	TPS	DT	Nilai
1	DKI Jakarta	98.75	98.89	98.82	18	Kalimantan Tengah	90.11	98.24	94.18
2	Jawa Barat	93.81	63.91	78.86	19	Kalimantan Selatan	93.44	98.97	96.20
3	Banten	88.61	73.64	81.13	20	Kalimantan Timur	98.85	98.62	98.73
4	Jawa Tengah	98.99	67.21	83.10	21	Sulawesi Utara	98.67	97.98	98.33
5	DI Yogyakarta	98.65	98.68	98.67	22	Gorontalo	98.92	98.23	98.57
6	Jawa Timur	98.94	85.80	92.37	23	Sulawesi Tengah	89.16	98.49	93.82
7	Aceh	98.79	98.75	98.77	24	Sulawesi Selatan	93.23	98.90	96.07
8	Sumatera Utara	98.98	98.94	98.96	25	Sulawesi Barat	89.46	98.67	94.06
9	Sumatera Barat	97.94	98.94	98.44	26	Sulawesi Tenggara	96.68	98.36	97.52
10	R i a u	94.49	98.80	96.64	27	Maluku	98.90	98.12	98.51
11	Kepulauan Riau	98.61	98.43	98.52	28	Maluku Utara	91.38	98.18	94.78
12	J a m b i	86.00	98.69	92.35	29	B a l i	98.81	84.41	91.61
13	Sumatera Selatan	98.98	98.99	98.99	30	NTB	81.77	99.00	90.38
14	Bangka Belitung	98.89	98.80	98.84	31	NTT	98.94	98.69	98.81
15	Bengkulu	98.84	98.62	98.73	32	Papua	98.75	98.64	98.69
16	Lampung	92.01	98.24	95.12	33	Papua Barat	98.64	98.68	98.66
17	Kalimantan Barat	98.29	98.56	98.42		Indonesia	98.99	96.70	97.85

Dengan menggunakan standar ideal maka terdapat 29 provinsi (87,88%) termasuk kriteria paripurna (91-100), 3 provinsi (9,09%) termasuk kategori utama (81-90), dan 1 provinsi (3,03%) termasuk madya (76-80). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterjangkauan layanan pendidikan SMP sebesar 97,85 termasuk dalam kategori paripurna.

4. SM

Hasil analisis dua indikator keterjangkauan layanan pendidikan SM di tiap provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 4.20. TPS SM berkisar antara 53 terkecil (Papua Barat) yang berarti terbaik hingga 94 tertinggi (Lampung dan Kalimantan Barat) yang berarti terburuk, dengan angka nasional 78. Hal ini berarti setiap sekolah melayani sebanyak 78 anak. Bila dibandingkan antarprovinsi, TPS SM yang lebih baik atau sama dengan angka nasional terdapat di 23 provinsi (69,70%) sedangkan 10 provinsi lainnya (30,30%) memiliki TPS lebih buruk dari nasional, yaitu 1) Lampung, 2) Kalimantan Barat, 3) Bali, 4) Jawa Tengah, 5) Jawa Barat, 6) Maluku, 7) Sumatera Selatan, 8) Sulawesi Tenggara, 9) Sulawesi Barat, dan 10) Banten.

DT SM berkisar antara 285 terkecil (Maluku Utara) yang berarti terburuk hingga 781 terbesar (Jawa Tengah) yang berarti terbaik, dengan angka nasional 576. Hal ini berarti jangkauan layanan sekolah sebanyak 576. Bila dibandingkan antarprovinsi, DT SM yang lebih baik dari nasional terdapat di 10 provinsi (30,30%), yaitu 1) Jawa Tengah, 2) Kalimantan Selatan, 3) Jawa Barat, 4) NTT, 5) Sumatera Barat, 6) Gorontalo, 7) Jawa Timur, 8) Banten, 9) Lampung, dan 10) NTB, sedangkan 23 provinsi lainnya (69,70%) memiliki DT lebih buruk dari nasional.

Tabel 4.20
Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TPS	DT	No.	Provinsi	TPS	DT
1	DKI Jakarta	66	438	18	Kalimantan Tengah	72	390
2	Jawa Barat	83	694	19	Kalimantan Selatan	71	764
3	Banten	79	605	20	Kalimantan Timur	73	407
4	Jawa Tengah	86	781	21	Sulawesi Utara	73	338
5	DI Yogyakarta	61	392	22	Gorontalo	71	656
6	Jawa Timur	78	656	23	Sulawesi Tengah	74	530
7	Aceh	68	445	24	Sulawesi Selatan	78	540
8	Sumatera Utara	74	446	25	Sulawesi Barat	79	448
9	Sumatera Barat	69	658	26	Sulawesi Tenggara	80	390
10	Riau	67	531	27	Maluku	83	315
11	Kepulauan Riau	69	485	28	Maluku Utara	59	285
12	Jambi	72	517	29	Bali	89	492
13	Sumatera Selatan	82	562	30	NTB	70	592
14	Bangka Belitung	65	520	31	NTT	72	666
15	Bengkulu	73	465	32	Papua	75	518
16	Lampung	94	603	33	Papua Barat	53	459
17	Kalimantan Barat	94	549		Indonesia	78	576

Tabel 4.21 merupakan 2 indikator keterjangkauan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai keterjangkauan layanan pendidikan di SM. Pada tingkat nasional, TPS sebesar 86,13, DT sebesar 99,93 sehingga nilai keterjangkauan menjadi 93,03. Hal ini berarti keterjangkauan SM tercapai sebesar 93% dengan nilai keterjangkauan layanan pendidikan SM terbesar terdapat di Riau (98,96) dan terkecil terdapat di Jawa Tengah (75,79).

Tabel 4.21
Keterjangkauan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TPS	DT	Nilai	No.	Provinsi	TPS	DT	Nilai
1	DKI Jakarta	98.99	98.68	98.84	18	Kalimantan Tengah	92.48	98.52	95.50
2	Jawa Barat	80.99	83.04	82.02	19	Kalimantan Selatan	94.66	75.35	85.01
3	Banten	85.19	95.18	90.19	20	Kalimantan Timur	91.29	98.58	94.93
4	Jawa Tengah	77.79	73.79	75.79	21	Sulawesi Utara	91.93	98.30	95.11
5	DI Yogyakarta	98.90	98.53	98.72	22	Gorontalo	94.59	87.75	91.17
6	Jawa Timur	85.92	87.85	86.88	23	Sulawesi Tengah	90.67	98.91	94.79
7	Aceh	99.00	98.70	98.85	24	Sulawesi Selatan	85.59	98.93	92.26
8	Sumatera Utara	90.07	98.71	94.39	25	Sulawesi Barat	85.09	98.71	91.90
9	Sumatera Barat	97.42	87.54	92.48	26	Sulawesi Tenggara	83.34	98.52	90.93
10	Riau	99.00	98.92	98.96	27	Maluku	81.09	98.17	89.63
11	Kepulauan Riau	96.68	98.81	97.75	28	Maluku Utara	98.87	97.98	98.42
12	Jambi	93.40	98.89	96.14	29	Bali	75.18	98.83	87.01
13	Sumatera Selatan	81.74	98.98	90.36	30	NTB	95.66	97.23	96.45
14	Bangka Belitung	98.97	98.89	98.93	31	NTT	92.84	86.45	89.64
15	Bengkulu	91.51	98.76	95.14	32	Papua	89.28	98.89	94.08
16	Lampung	70.95	95.55	83.25	33	Papua Barat	98.73	98.74	98.74
17	Kalimantan Barat	71.26	98.95	85.10		Indonesia	86.13	99.93	93.03

Dengan menggunakan standar ideal maka terdapat 21 provinsi (63,64%) termasuk kriteria paripurna (91-100), 11 provinsi (33,33%) termasuk kategori utama (81-90), dan 1 provinsi (3,03%) termasuk madya (76-80). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterjangkauan layanan pendidikan SM sebesar 93,03 termasuk dalam kategori paripurna.

5. PT

Hasil analisis indikator keterjangkauan layanan pendidikan PT di tiap provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 4.22. DT PT berkisar antara 355 terkecil (Sulawesi Selatan) yang berarti terbaik hingga 10.479 terbesar (Banten) yang berarti terburuk, dengan angka nasional 696. Hal ini berarti jangkauan layanan sekolah sebanyak 696 penduduk. Bila dibandingkan antarprovinsi, DT PT yang lebih baik dari nasional terdapat di 9 provinsi (27,27%), yaitu 1) Papua, 2) Maluku Utara, 3) Sulawesi Tenggara, 4) Maluku, 5) Kalimantan Timur, 6) Papua Barat, 7) Bali, 8) Sulawesi Utara, dan 9) Sulawesi Selatan, sedangkan 24 provinsi lainnya (72,73%) memiliki DT lebih buruk dari nasional.

Tabel 4.22
Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	R-M/L	No.	Provinsi	R-M/L
1	DKI Jakarta	2.880	18	Kalimantan Tengah	1.039
2	Jawa Barat	9.138	19	Kalimantan Selatan	803
3	Banten	10.479	20	Kalimantan Timur	568
4	Jawa Tengah	9.296	21	Sulawesi Utara	371
5	DI Yogyakarta	2.444	22	Gorontalo	828
6	Jawa Timur	8.089	23	Sulawesi Tengah	776
7	Aceh	4.273	24	Sulawesi Selatan	355
8	Sumatera Utara	4.372	25	Sulawesi Barat	869
9	Sumatera Barat	3.351	26	Sulawesi Tenggara	580
10	Riau	6.654	27	Maluku	572
11	Kepulauan Riau	6.093	28	Maluku Utara	628
12	Jambi	6.937	29	Bali	532
13	Sumatera Selatan	6.270	30	NTB	892
14	Bangka Belitung	859	31	NTT	999
15	Bengkulu	1.029	32	Papua	657
16	Lampung	988	33	Papua Barat	552
17	Kalimantan Barat	966		Indonesia	696

Tabel 4.23 merupakan 1 indikator keterjangkauan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai keterjangkauan layanan pendidikan yang sama di PT. Pada tingkat nasional, DT sebesar 91,05 sehingga nilai keterjangkauan sama 91,05. Hal ini berarti keterjangkauan PT tercapai sebesar 91% dengan nilai keterjangkauan layanan pendidikan PT terbesar terdapat di Sumatera Selatan (99,38) dan terkecil terdapat di Banten (59,46).

Dengan menggunakan standar ideal maka terdapat 19 provinsi (57,58%) termasuk kriteria paripurna (91-100), 10 provinsi (30,30%) termasuk kategori utama (81-90), 1 provinsi (3,03%) termasuk madya (76-80), dan 3 provinsi (9,09%) termasuk kurang (≤ 70). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterjangkauan layanan pendidikan PT sebesar 91,05 termasuk dalam kategori paripurna.

Tabel 4.23
Keterjangkauan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	DT	Nilai	No.	Provinsi	DT	Nilai
1	DKI Jakarta	97,84	97,84	18	Kalimantan Tengah	94,00	94,00
2	Jawa Barat	68,19	68,19	19	Kalimantan Selatan	92,24	92,24
3	Banten	59,46	59,46	20	Kalimantan Timur	89,03	89,03
4	Jawa Tengah	67,03	67,03	21	Sulawesi Utara	83,21	83,21
5	DI Yogyakarta	97,45	97,45	22	Gorontalo	92,47	92,47
6	Jawa Timur	77,03	77,03	23	Sulawesi Tengah	91,97	91,97
7	Aceh	98,54	98,54	24	Sulawesi Selatan	82,46	82,46
8	Sumatera Utara	98,57	98,57	25	Sulawesi Barat	92,83	92,83
9	Sumatera Barat	98,14	98,14	26	Sulawesi Tenggara	89,25	89,25
10	Ri a u	93,64	93,64	27	Maluku	89,10	89,10
11	Kepulauan Riau	98,98	98,98	28	Maluku Utara	90,08	90,08
12	J a m b i	89,83	89,83	29	B a l i	88,28	88,28
13	Sumatera Selatan	99,38	99,38	30	NTB	93,01	93,01
14	Bangka Belitung	92,75	92,75	31	NTT	93,76	93,76
15	Bengkulu	93,94	93,94	32	Papua	90,52	90,52
16	Lampung	93,70	93,70	33	Papua Barat	88,71	88,71
17	Kalimantan Barat	93,55	93,55		Indonesia	91,05	91,05

6. Semua Jenjang

Tabel 4.24 merupakan keterjangkauan layanan pendidikan menurut lima jenjang pendidikan dan pada tingkat nasional sebesar 95,22. Namun, TK dan SMP sebesar 98,76 dan 97,85 lebih terjangkau jika dibandingkan dengan SD sebesar 95,42, SM sebesar 93,03, dan PT sebesar 91,05. Bila keterjangkauan layanan pendidikan dibandingkan antarjenjang pendidikan TK, SD, SMP, SM dan PT maka diperoleh provinsi mana yang memiliki keterjangkauan layanan pendidikan yang baik.

Pada Tabel 4.24 keterjangkauan provinsi untuk 5 jenjang pendidikan secara nasional sebesar 95,22 dengan nilai tertinggi (98,38) terjadi di DI Yogyakarta dan terendah terjadi di Jawa Barat (75,41). Hal ini berarti keterjangkauan layanan pendidikan nasional tercapai 95%. Berdasarkan standar ideal maka 24 provinsi (72,73%) termasuk paripurna (91-100), 7 provinsi (21,21%) termasuk utama (81-90), 1 provinsi (3,03%) termasuk madya (76-80), dan 1 provinsi (3,03%) termasuk pratama (71-75). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterjangkauan layanan pendidikan sebesar 95,22 termasuk kategori paripurna.

Tabel 4.24
Kinerja Keterjangkauan Layanan Pendidikan Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TK	SD	SMP	SM	PT	Rata-rata
1	DKI Jakarta	93,62	75,40	98,82	98,84	97,84	92,90
2	Jawa Barat	65,60	82,37	78,86	82,02	68,19	75,41
3	Banten	83,26	71,35	81,13	90,19	59,46	77,08
4	Jawa Tengah	98,44	98,56	83,10	75,79	67,03	84,58
5	DI Yogyakarta	98,36	98,71	98,67	98,72	97,45	98,38
6	Jawa Timur	97,72	95,74	92,37	86,88	77,03	89,95
7	Aceh	82,28	95,93	98,77	98,85	98,54	94,88
8	Sumatera Utara	86,72	94,56	98,96	94,39	98,57	94,64
9	Sumatera Barat	98,83	98,76	98,44	92,48	98,14	97,33
10	R i a u	98,55	88,76	96,64	98,96	93,64	95,31
11	Kepulauan Riau	99,59	92,82	98,52	97,75	98,98	97,53
12	J a m b i	91,12	98,81	92,35	96,14	89,83	93,65
13	Sumatera Selatan	59,30	91,67	98,99	90,36	99,38	87,94
14	Bangka Belitung	98,47	97,91	98,84	98,93	92,75	97,38
15	Bengkulu	98,42	98,85	98,73	95,14	93,94	97,01
16	Lampung	98,93	91,19	95,12	83,25	93,70	92,44
17	Kalimantan Barat	66,27	98,75	98,42	85,10	93,55	88,42
18	Kalimantan Tengah	98,49	98,45	94,18	95,50	94,00	96,12
19	Kalimantan Selatan	97,93	98,76	96,20	85,01	92,24	94,03
20	Kalimantan Timur	98,91	94,47	98,73	94,93	89,03	95,22
21	Sulawesi Utara	98,74	98,45	98,33	95,11	83,21	94,77
22	Gorontalo	97,46	98,84	98,57	91,17	92,47	95,70
23	Sulawesi Tengah	98,33	98,62	93,82	94,79	91,97	95,51
24	Sulawesi Selatan	98,52	98,84	96,07	92,26	82,46	93,63
25	Sulawesi Barat	98,45	98,72	94,06	91,90	92,83	95,19
26	Sulawesi Tenggara	97,88	98,55	97,52	90,93	89,25	94,83
27	Maluku	52,82	98,76	98,51	89,63	89,10	85,76
28	Maluku Utara	84,15	98,61	94,78	98,42	90,08	93,21
29	B a i i	96,79	98,80	91,61	87,01	88,28	92,50
30	NTB	63,54	91,50	90,38	96,45	93,01	86,98
31	NTT	52,66	98,82	98,81	89,64	93,76	86,74
32	Papua	78,80	98,88	98,69	94,08	90,52	92,20
33	Papua Barat	98,67	98,84	98,66	98,74	88,71	96,72
	Indonesia	98,76	95,42	97,85	93,03	91,05	95,22

C. Misi K-3: Kualitas Layanan Pendidikan

Kualitas layanan pendidikan menggunakan empat indikator yang dianggap penting untuk mengetahui kinerja kualitas layanan pendidikan. Tabel 4.25 menunjukkan perbandingan keenam indikator kualitas layanan pendidikan antara lima jenjang pendidikan. Dilihat dari segi guru, %GL sebesar 28,76% di TK meningkat menjadi 52,91% di SD menjadi 84,54% di SMP dan menjadi 91,88% di SM. Hal ini menunjukkan bahwa makin rendah jenjang pendidikan ternyata guru yang berkualifikasi S1/Diploma 4 makin kecil.

Hal ini dapat dipahami karena standar guru layak di TK dan SD mengalami peningkatan dari Diploma 2 menjadi sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4). %DL PT sebesar 70,71% dikarenakan masih banyak dosen yang belum memiliki ijazah S2 atau lebih. Masih dari segi guru, ternyata makin tinggi

jenjang pendidikan R S/G makin tinggi. R-S/G sebesar 13 di TK meningkat menjadi 18 di SD dan SMP dan menjadi 19 di SM. Hal ini menunjukkan bahwa makin rendah jenjang pendidikan ternyata siswa yang ditangani guru semakin kecil. Hal ini dapat dipahami karena jumlah sekolah SM semakin kecil pula.

Dari segi siswa, ternyata AL tidak menunjukkan perbedaan yang berarti antara SD, SMP dan SM, yaitu 99,29, 99,47%, dan 99,55% sedangkan TK dan PT yang paling rendah, yaitu 65,54% dan 15,42% karena menggunakan rumusan yang berbeda, yaitu jumlah lulusan dibagi dengan seluruh siswa/mahasiswa sehingga hasilnya kecil.

Tabel 4.25
Perbandingan Indikator Kualitas Layanan Pendidikan
Tahun 2011/2012

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal	Angka Nasional				
			TK	SD	SMP	SM	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	% GL atau DL	100.00	28.76	52.91	84.54	91.88	70.71
2.	R-S/G atau R-M/D	11/17/15/12/30	13	18	18	19	29
3.	AL	100.00	65.54	99.29	99.47	99.55	15.42
4.	AU	0.00	-	2.99	0.26	0.31	-
5.	APS	0.00	-	0.90	1.57	2.20	-
6.	% RKb	100.00	61.83	75.85	84.19	88.98	-

Berbeda untuk untuk AU ternyata makin tinggi jenjang pendidikan makin kecil siswa yang mengulang, yaitu 2,99% di SD, 0,26% di SMP, dan 0,31% di SM. Sebaliknya, APS semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula siswa putus sekolah, yaitu 0,90% di SD, 1,57% di SMP dan 2,20% di SM. Besarnya APS di SD karena bersekolah di SD sudah mencukupi untuk bisa membaca dan menulis, padahal makin kecil APS makin baik dengan standar ideal (0,00%).

%RKb TK sebesar 61,83% dan selanjutnya makin tinggi jenjang pendidikan kondisinya makin baik. %RKb sebesar 75,85% di SD meningkat menjadi 84,19% di SMP dan menjadi 88,98% di SM. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan lokasi SM berada di daerah kota atau ibukota kabupaten sehingga memudahkan untuk rehabilitasi sedangkan lokasi SD banyak di daerah sulit dan terpencil.

1. TK

Hasil analisis empat indikator kualitas layanan pendidikan TK di tiap provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 4.26. %GL berkisar antara 6,32% terkecil (Maluku Utara) hingga 47,63% tertinggi (DI Yogyakarta), dengan angka nasional 28,76%. Hal ini berarti 71,24% guru di TK tidak layak

mengajar dikarenakan syarat kelayakan mengajar yang mengalami peningkatan sesuai UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen bahwa guru TK harus memiliki ijazah sarjana (S1) atau diploma IV (D-IV). Bila dibandingkan antarprovinsi, %GL TK yang lebih buruk dari nasional terdapat di 26 provinsi (78,79%) sedangkan 7 provinsi lainnya (21,21%) memiliki %GL lebih baik dari nasional, yaitu 1) DI Yogyakarta, 2) Jawa Timur, 3) DKI Jakarta, 4) Bali, 5) Sulawesi Selatan, 6) Jawa Barat, dan 7) Jawa Tengah .

Tabel 4.26
Indikator Kualitas Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	% GL	R S/G	AL	% RKB
1	DKI Jakarta	38,74	10	71,04	92,57
2	Jawa Barat	30,31	11	59,09	67,86
3	Banten	22,44	11	62,12	78,77
4	Jawa Tengah	29,24	16	66,96	45,64
5	DI Yogyakarta	47,63	14	87,17	78,95
6	Jawa Timur	39,89	14	58,97	61,50
7	Aceh	13,65	10	71,65	67,18
8	Sumatera Utara	26,71	15	72,36	73,69
9	Sumatera Barat	19,08	14	72,07	60,95
10	Riau	16,57	11	56,39	64,53
11	Kepulauan Riau	16,27	12	62,90	86,77
12	Jambi	12,22	14	82,56	57,74
13	Sumatera Selatan	18,60	11	59,96	69,86
14	Bangka Belitung	21,02	20	81,37	70,73
15	Bengkulu	26,02	13	71,83	47,68
16	Lampung	19,81	12	61,77	62,35
17	Kalimantan Barat	18,25	12	63,21	73,64
18	Kalimantan Tengah	18,11	10	65,01	70,92
19	Kalimantan Selatan	25,13	12	65,08	59,63
20	Kalimantan Timur	21,37	11	60,55	76,84
21	Sulawesi Utara	16,31	16	69,52	48,19
22	Gorontalo	18,87	14	60,80	50,69
23	Sulawesi Tengah	17,88	14	85,05	50,61
24	Sulawesi Selatan	33,62	13	72,48	55,46
25	Sulawesi Barat	24,11	13	63,21	52,68
26	Sulawesi Tenggara	8,37	12	71,37	57,84
27	Maluku	6,50	14	90,74	81,42
28	Maluku Utara	6,32	11	84,51	66,87
29	Bali	38,10	12	55,85	67,90
30	NTB	22,81	14	73,21	51,56
31	NTT	8,67	16	78,91	54,22
32	Papua	14,02	16	74,00	74,78
33	Papua Barat	19,26	17	61,83	62,86
	Indonesia	28,76	13	65,54	61,83

R-S/G TK berkisar antara 10 terendah tiga provinsi (Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Aceh) sampai 20 tertinggi (Bangka Belitung) dengan angka nasional sebesar 13. Dengan demikian, satu orang guru menangani rata-rata 13 siswa. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 15 provinsi (45,45%) yang memiliki R-S/G TK di atas angka nasional yang berarti kekurangan guru, yaitu 1) Bangka Belitung, 2) Papua Barat, 3) NTT, 4) Jawa Tengah, 5) Papua, 6) Sulawesi Utara, 7) Sumatera Utara, 8) Sulawesi Tengah, 9) NTB, 10) Maluku, 11) DI Yogyakarta, 12) Gorontalo, 13) Jawa Timur, 14) Jambi, dan

15) Sumatera Barat. Sebaliknya, 18 provinsi (54,55%) memiliki R-S/G lebih kecil atau sama dengan angka nasional. Sejalan dengan rendahnya R-S/G TK, kondisi ini menunjukkan bahwa guru TK di setiap sekolah menangani siswa TK lebih baik jika dibandingkan dengan angka nasional.

AL TK berkisar antara 55,85% terendah (Bali) hingga 90,74% tertinggi (Maluku) dengan angka nasional 65,54%. Hal ini berarti 34,46% siswa tidak lulus TK. Bila dibandingkan antarprovinsi, terdapat 18 Provinsi (54,55%) yang memiliki AL lebih baik dari angka nasional. Sisanya, sebanyak 15 provinsi (45,45%) AL TK lebih rendah atau lebih buruk dari angka nasional, yaitu 1) Kalimantan Selatan, 2) Kalimantan Tengah, 3) Sulawesi Barat, 4) Kalimantan Barat, 5) Kepulauan Riau, 6) Banten, 7) Papua Barat, 8) Lampung, 9) Gorontalo, 10) Kalimantan Timur, 11) Sumatera Selatan, 12) Jawa Barat, 13) Jawa Timur, 14) Riau, dan 15) Bali.

Tabel 4.27
Kualitas Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	% GL	R S/G	AL	% RKB	Nilai
1	DKI Jakarta	38,74	93,96	71,04	92,57	74,08
2	Jawa Barat	30,31	100,00	59,09	67,86	64,31
3	Banten	22,44	99,58	62,12	78,77	65,73
4	Jawa Tengah	29,24	100,00	66,96	45,64	60,46
5	DI Yogyakarta	47,63	100,00	87,17	78,95	78,44
6	Jawa Timur	39,89	100,00	58,97	61,50	65,09
7	Aceh	13,65	87,49	71,65	67,18	60,00
8	Sumatera Utara	26,71	100,00	72,36	73,69	68,19
9	Sumatera Barat	19,08	100,00	72,07	60,95	63,02
10	R i a u	16,57	97,13	56,39	64,53	58,66
11	Kepulauan Riau	16,27	100,00	62,90	86,77	66,48
12	J a m b i	12,22	100,00	82,56	57,74	63,13
13	Sumatera Selatan	18,60	99,58	59,96	69,86	62,00
14	Bangka Belitung	21,02	100,00	81,37	70,73	68,28
15	Bengkulu	26,02	100,00	71,83	47,68	61,38
16	Lampung	19,81	100,00	61,77	62,35	60,98
17	Kalimantan Barat	18,25	100,00	63,21	73,64	63,77
18	Kalimantan Tengah	18,11	94,51	65,01	70,92	62,14
19	Kalimantan Selatan	25,13	100,00	65,08	59,63	62,46
20	Kalimantan Timur	21,37	98,34	60,55	76,84	64,28
21	Sulawesi Utara	16,31	100,00	69,52	48,19	58,51
22	Gorontalo	18,87	100,00	60,80	50,69	57,59
23	Sulawesi Tengah	17,88	100,00	85,05	50,61	63,39
24	Sulawesi Selatan	33,62	100,00	72,48	55,46	65,39
25	Sulawesi Barat	24,11	100,00	63,21	52,68	60,00
26	Sulawesi Tenggara	8,37	100,00	71,37	57,84	59,39
27	Maluku	6,50	100,00	90,74	81,42	69,67
28	Maluku Utara	6,32	100,00	84,51	66,87	64,43
29	B a l i	38,10	100,00	55,85	67,90	65,46
30	NTB	22,81	100,00	73,21	51,56	61,90
31	NTT	8,67	100,00	78,91	54,22	60,45
32	Papua	14,02	100,00	74,00	74,78	65,70
33	Papua Barat	19,26	100,00	61,83	62,86	60,99
	Indonesia	28,76	100,00	65,54	61,83	64,03

%Rkb TK berkisar antara 45,64% terkecil (Jawa Tengah) hingga 92,57% (DKI Jakarta), dengan angka nasional 61,83%. Hal ini berarti hampir tiga per empat ruang kelas TK dalam kondisi baik atau 38,17% dalam kondisi rusak. Bila dibandingkan antarprovinsi, %Rkb TK yang lebih buruk daripada angka nasional terdapat di 14 provinsi (42,42%), yaitu 1) Jawa Timur, 2) Sumatera Barat, 3) Kalimantan Selatan, 4) Sulawesi Tenggara, 5) Jambi, 6) Sulawesi Selatan, 7) NTT, 8) Sulawesi Barat, 9) NTB, 10) Gorontalo, 11) Sulawesi Tengah, 12) Sulawesi Utara, 13) Bengkulu, dan 14) Jawa Tengah. Sisanya, 19 provinsi (57,58%) memiliki %Rkb lebih baik dari angka nasional. Selain itu, fakta ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut apakah rendahnya %Rkb TK akibat tidak ada pemeliharaan, pemeliharaan yang kurang baik, mutu fisik/bangunan yang kurang baik, atau faktor-faktor lainnya.

Tabel 4.27 merupakan empat jenis indikator kualitas layanan pendidikan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai kualitas layanan pendidikan TK. Pada tingkat nasional, %GL menjadi 28,76, R-S/G menjadi 100,00, AL menjadi 65,54, dan % Rkb menjadi 61,83 sehingga layanan pendidikan menjadi 64,03. Hal ini berarti kualitas layanan pendidikan TK sekitar 64% dengan tertinggi terjadi di DI Yogyakarta (78,44) dan terendah terjadi di Gorontalo (57,59).

Berdasarkan standar ideal, terdapat 1 provinsi (3,03%) termasuk madya (76-80), 1 provinsi (3,03%) termasuk pratama (71-75), dan sisanya sebanyak 31 provinsi (93,94%) termasuk kinerja kurang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas layanan pendidikan TK sebesar 64,03 termasuk kategori kurang.

2. SD

Hasil analisis enam indikator kualitas layanan pendidikan SD di tiap provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 4.28. %GL berkisar antara 14,69% terkecil (NTT) hingga 78,81% tertinggi (DKI Jakarta), dengan angka nasional 52,91%. Hal ini berarti 47,09% guru di SD tidak layak mengajar dikarenakan syarat kelayakan mengajar yang mengalami peningkatan sesuai UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen bahwa guru SD harus memiliki ijazah sarjana (S1) atau diploma IV (D-IV). Bila dibandingkan antarprovinsi, %GL SD yang lebih buruk dari nasional terdapat di 25 provinsi (75,76%) sedangkan 8 provinsi lainnya (24,24%) memiliki %GL lebih baik dari nasional, yaitu 1) DKI Jakarta, 2) Jawa Timur, 3) Bali, 4) Jawa Barat, 5) DI Yogyakarta, 6) Banten, 7) Sulawesi Selatan, dan 8) Jawa Tengah.

R-S/G SD berkisar antara 12 terendah (Aceh) sampai 25 tertinggi (Papua) dengan angka nasional sebesar 18. Dengan demikian, satu orang guru menangani rata-rata 18 siswa. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 10 provinsi (30,30%) yang memiliki R-S/G SD di atas angka nasional atau berarti kekurangan guru, yaitu 1) Papua, 2) Jawa Barat, 3) Banten, 4) Papua

Barat, 5) DKI Jakarta, 6) Kalimantan Barat, 7) Maluku Utara, 8) NTT, 9) Jawa Tengah, dan 10) Gorontalo, sedangkan 23 provinsi (69,70%) memiliki R-S/G lebih kecil dengan angka nasional. Sejalan dengan rendahnya R-S/G SD, kondisi ini menunjukkan bahwa guru SD di setiap sekolah menangani siswa kurang dari 18 siswa dan berarti telah kelebihan guru.

Tabel 4.28
Indikator Kualitas Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	% GL	R S/G	AL	AU	APS	% RKB
1	DKI Jakarta	78,81	22	98,72	1,27	0,74	76,26
2	Jawa Barat	66,08	23	99,88	1,11	0,74	72,76
3	Banten	64,13	23	99,43	2,29	0,96	81,33
4	Jawa Tengah	58,26	19	99,61	3,24	0,75	72,15
5	DI Yogyakarta	65,98	15	97,17	2,43	0,70	87,20
6	Jawa Timur	71,04	15	99,84	2,35	0,63	71,95
7	Aceh	33,56	12	99,50	3,14	0,98	83,54
8	Sumatera Utara	42,01	18	99,30	1,98	0,83	81,85
9	Sumatera Barat	49,34	16	99,52	5,87	0,97	75,80
10	Riau	47,03	17	98,64	2,00	1,35	73,57
11	Kepulauan Riau	47,36	17	99,68	4,12	1,09	87,10
12	Jambi	33,34	17	99,60	3,94	1,03	83,25
13	Sumatera Selatan	38,08	16	99,54	2,79	0,83	74,27
14	Bangka Belitung	34,48	16	98,34	8,80	1,14	87,50
15	Bengkulu	48,90	16	98,33	4,29	1,07	81,94
16	Lampung	40,44	17	99,59	2,28	1,21	69,26
17	Kalimantan Barat	31,97	20	98,61	8,09	1,38	77,79
18	Kalimantan Tengah	45,70	14	99,42	4,22	1,08	76,82
19	Kalimantan Selatan	48,56	13	99,16	5,53	0,58	79,84
20	Kalimantan Timur	50,11	15	99,41	3,88	1,41	74,52
21	Sulawesi Utara	35,30	15	97,76	2,60	0,65	89,34
22	Gorontalo	41,98	19	97,49	7,41	1,49	78,31
23	Sulawesi Tengah	33,24	15	99,35	5,90	1,05	67,40
24	Sulawesi Selatan	60,38	16	99,12	3,60	0,85	77,00
25	Sulawesi Barat	46,66	16	96,08	4,48	1,21	73,19
26	Sulawesi Tenggara	33,95	15	99,25	4,09	1,15	76,70
27	Maluku	18,82	16	98,87	1,12	0,75	74,83
28	Maluku Utara	17,28	19	97,90	2,63	1,58	72,24
29	Bali	69,96	17	98,63	2,03	1,36	85,88
30	NTB	51,70	17	99,52	3,31	1,34	95,36
31	NTT	14,69	19	97,01	8,02	1,16	72,85
32	Papua	21,62	25	96,09	4,94	1,52	68,30
33	Papua Barat	27,35	23	93,17	6,57	1,60	76,73
	Indonesia	52,91	18	99,29	2,99	0,90	75,85

AL SD berkisar antara 93,17% terendah (Papua Barat) hingga 99,88% tertinggi (Jawa Barat) dengan angka nasional 99,29%. Hal ini berarti 0,71% siswa tidak lulus SD. Dengan menggunakan norma nasional maka AL SD yang lebih baik dari nasional terdapat 15 provinsi (45,45%), yaitu 1) Jawa Barat, 2) Jawa Timur, 3) Kepulauan Riau, 4) Jawa Tengah, 5) Jambi, 6) Lampung, 7) Sumatera Selatan, 8) NTB, 9) Sumatera Barat, 10) Aceh, 11) Banten, 12) Kalimantan Tengah, 13) Kalimantan Timur, 14) Sulawesi Tengah, dan 15) Sumatera Utara. Sisanya, sebanyak 18 provinsi (54,55%) menunjukkan AL lebih buruk daripada nasional. Jika AL merupakan hasil UAS SD maka hasil lulusan tersebut kurang baik karena hanya sepertiga provinsi memiliki AL lebih baik dari nasional.

AU SD berkisar antara 1,11% terbaik (Jawa Barat) dan 8,80% terburuk (Bangka Belitung) dengan rata-rata nasional sebesar 2,99%. Hal ini berarti masih terdapat 2,99% siswa mengulang. Dengan menggunakan norma nasional maka AU SD lebih baik dari nasional terdapat di 13 provinsi (39,39%), yaitu 1) Sumatera Selatan, 2) Maluku Utara, 3) Sulawesi Utara, 4) DI Yogyakarta, 5) Jawa Timur, 6) Banten, 7) Lampung, 8) Bali, 9) Riau, 10) Sumatera Utara, 11) DKI Jakarta, 12) Maluku, dan 13) Jawa Barat. Sisanya, 20 provinsi (60,61%) memiliki AU SD lebih buruk daripada nasional.

APS SD berkisar antara 0,58% terbaik (Kalimantan Selatan) dan 1,60% terburuk (Papua Barat) dengan rata-rata nasional sebesar 0,90%. Hal ini berarti terdapat 0,90% siswa putus sekolah. Dengan menggunakan norma nasional maka APS SD lebih baik dari norma nasional terdapat di 11 provinsi (33,33%), yaitu 1) Sulawesi Selatan, 2) Sumatera Utara, 3) Sumatera Selatan, 4) Jawa Tengah, 5) Maluku, 6) Jawa Barat, 7) DKI Jakarta, 8) DI Yogyakarta, 9) Sulawesi Utara, 10) Jawa Timur, dan 11) Kalimantan Selatan. Sisanya, 22 provinsi (66,67%) memiliki APS lebih buruk daripada nasional.

%Rkb SD berkisar antara 67,40% terkecil (Sulawesi Tengah) hingga 95,36% (Nusa Tenggara Barat), dengan angka nasional 75,85%. Hal ini berarti tiga perempat lebih ruang kelas SD dalam kondisi baik. %Rkb SD yang lebih rendah dari nasional terdapat di 14 Provinsi (42,42%), yaitu 1) Sumatera Barat, 2) Maluku, 3) Kalimantan Timur, 4) Sumatera Selatan, 5) Riau, 6) Sulawesi Barat, 7) NTT, 8) Jawa Barat, 9) Maluku Utara, 10) Jawa Tengah, 11) Jawa Timur, 12) Lampung, 13) Papua, dan 14) Sulawesi Tengah. Sisanya, 19 provinsi (57,58%) memiliki %Rkb lebih baik dari nasional. Rendahnya kondisi baik pada ruang kelas di SD akibat bangunan SD banyak berasal dari program Inpres yang dibangun secara besar-besaran pada tahun 1973/1974 sampai 1983/1984, kurangnya perawatan karena letaknya banyak di daerah sulit.

Tabel 4.29 merupakan enam jenis indikator kualitas layanan pendidikan SD yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai. Pada tingkat nasional, % GL menjadi 52,91, R-S/G menjadi 100,00, AL menjadi 99,29, AU menjadi 97,01, APS menjadi 99,10, dan % Rkb menjadi 75,85 sehingga nilai kualitas layanan pendidikan SD sebesar 87,36. Hal ini berarti kualitas layanan pendidikan SD sekitar 87% dengan nilai kualitas layanan pendidikan tertinggi terjadi di DKI Jakarta (91,97) dan terendah terjadi di NTT (79,23).

Berdasarkan standar ideal, terdapat 2 provinsi (6,06%) termasuk paripurna (91-100), 25 provinsi (75,76%) termasuk utama (81-90), dan 6 provinsi (18,18%) termasuk madya (76-80). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal kualitas layanan pendidikan SD sebesar 87,36 termasuk kategori utama.

Tabel 4.29
Kualitas Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	% GL	R S/G	AL	AU	APS	% RKB	Nilai
1	DKI Jakarta	78,81	100,00	98,72	98,73	99,26	76,26	91,97
2	Jawa Barat	66,08	100,00	99,88	98,89	99,26	72,76	89,48
3	Banten	64,13	100,00	99,43	97,71	99,04	81,33	90,27
4	Jawa Tengah	58,26	100,00	99,61	96,76	99,25	72,15	87,67
5	DI Yogyakarta	65,98	87,21	97,17	97,57	99,30	87,20	89,07
6	Jawa Timur	71,04	89,22	99,84	97,65	99,37	71,95	88,18
7	Aceh	33,56	67,83	99,50	96,86	99,02	83,54	80,05
8	Sumatera Utara	42,01	100,00	99,30	98,02	99,17	81,85	86,72
9	Sumatera Barat	49,34	93,43	99,52	94,13	99,03	75,80	85,21
10	R i a u	47,03	99,19	98,64	98,00	98,65	73,57	85,84
11	Kepulauan Riau	47,36	98,68	99,68	95,88	98,91	87,10	87,94
12	J a m b i	33,34	99,59	99,60	96,06	98,97	83,25	85,13
13	Sumatera Selatan	38,08	95,23	99,54	97,21	99,17	74,27	83,92
14	Bangka Belitung	34,48	95,23	98,34	91,20	98,86	87,50	84,27
15	Bengkulu	48,90	94,47	98,33	95,71	98,93	81,94	86,38
16	Lampung	40,44	100,00	99,59	97,72	98,79	69,26	84,30
17	Kalimantan Barat	31,97	100,00	98,61	91,91	98,62	77,79	83,15
18	Kalimantan Tengah	45,70	80,78	99,42	95,78	98,92	76,82	82,90
19	Kalimantan Selatan	48,56	78,99	99,16	94,47	99,42	79,84	83,41
20	Kalimantan Timur	50,11	90,45	99,41	96,12	98,59	74,52	84,87
21	Sulawesi Utara	35,30	86,11	97,76	97,40	99,35	89,34	84,21
22	Gorontalo	41,98	100,00	97,49	92,59	98,51	78,31	84,81
23	Sulawesi Tengah	33,24	85,81	99,35	94,10	98,95	67,40	79,81
24	Sulawesi Selatan	60,38	93,84	99,12	96,40	99,15	77,00	87,65
25	Sulawesi Barat	46,66	93,59	96,08	95,52	98,79	73,19	83,97
26	Sulawesi Tenggara	33,95	85,51	99,25	95,91	98,85	76,70	81,69
27	Maluku	18,82	94,04	98,87	98,88	99,25	74,83	80,78
28	Maluku Utara	17,28	100,00	97,90	97,37	98,42	72,24	80,53
29	B a l i	69,96	99,51	98,63	97,97	98,64	85,88	91,76
30	NTB	51,70	98,23	99,52	96,69	98,66	95,36	90,03
31	NTT	14,69	100,00	97,01	91,98	98,84	72,85	79,23
32	Papua	21,62	100,00	96,09	95,06	98,48	68,30	79,92
33	Papua Barat	27,35	100,00	93,17	93,43	98,40	76,73	81,51
	Indonesia	52,91	100,00	99,29	97,01	99,10	75,85	87,36

2. SMP

Hasil analisis enam indikator kualitas layanan pendidikan di tiap provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 4.30. %GL SMP berkisar antara 46,54% terendah (Maluku) hingga 93,06% tertinggi (Jawa Timur), dengan angka nasional 84,54%. Hal ini berarti masih terdapat 15,46% guru yang belum layak mengajar. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka perlu diprioritaskan kelayakan guru mengajar sehingga akan dihasilkan siswa yang bermutu dan pada akhirnya pendidikan akan bermutu. Bila dibandingkan antarprovinsi, %GL SMP lebih rendah dari nasional terdapat di 17 provinsi (51,52%) dan 16 provinsi (48,48%) lebih baik dari nasional, yaitu 1) Jawa Timur, 2) Jawa Barat, 3) Sulawesi Barat, 4) Jawa Tengah, 5) Sulawesi Selatan, 6) DKI Jakarta, 7) Sulawesi Tengah, 8) Bengkulu, 9) Bali, 10) Kalimantan Selatan, 11) Kalimantan Timur, 12) Banten, 13) DI Yogyakarta, 14) NTB, 15) Kalimantan Tengah, dan 16) Sulawesi Tenggara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyebaran guru layak terkonsentrasi di perkotaan atau daerah-daerah yang memiliki perkembangan ekonomi relatif lebih baik.

Tabel 4.30
Indikator Kualitas Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	% GL	R S/G	AL	AU	APS	% RKB
1	DKI Jakarta	88,65	19	100,00	0,27	1,46	87,16
2	Jawa Barat	89,38	27	99,97	0,06	0,99	84,55
3	Banten	86,98	25	99,89	0,18	2,05	87,74
4	Jawa Tengah	89,16	20	99,17	0,15	1,05	88,48
5	DI Yogyakarta	86,01	13	99,28	0,27	1,97	85,99
6	Jawa Timur	93,06	17	99,84	0,14	1,01	87,23
7	Aceh	76,21	11	99,40	0,51	2,53	80,83
8	Sumatera Utara	80,10	17	99,87	0,20	2,56	83,82
9	Sumatera Barat	79,49	13	98,20	0,49	1,97	77,43
10	Riau	78,34	16	99,77	0,49	1,17	82,29
11	Kepulauan Riau	79,21	18	97,96	0,70	1,94	89,11
12	Jambi	78,23	16	99,78	0,52	2,25	86,24
13	Sumatera Selatan	82,72	17	99,87	0,39	0,97	80,17
14	Bangka Belitung	74,84	17	98,31	0,97	2,39	91,77
15	Bengkulu	88,53	15	99,52	0,73	2,46	76,54
16	Lampung	76,02	17	99,83	0,27	2,57	81,87
17	Kalimantan Barat	71,67	23	97,81	0,49	1,04	84,34
18	Kalimantan Tengah	85,79	13	99,01	0,28	5,18	83,76
19	Kalimantan Selatan	87,98	12	99,85	0,41	4,94	77,81
20	Kalimantan Timur	87,03	17	99,94	0,24	1,84	88,24
21	Sulawesi Utara	68,28	14	99,92	0,27	3,11	81,06
22	Gorontalo	78,62	13	99,82	1,21	1,66	79,95
23	Sulawesi Tengah	88,64	17	98,23	0,72	2,07	87,37
24	Sulawesi Selatan	89,04	16	99,81	0,29	1,86	77,26
25	Sulawesi Barat	89,35	19	99,63	0,37	2,11	78,10
26	Sulawesi Tenggara	85,48	15	99,43	0,71	0,46	72,68
27	Maluku	46,54	15	99,79	0,55	1,89	69,66
28	Maluku Utara	79,08	19	99,67	0,81	2,14	81,64
29	Bali	88,48	17	99,76	0,06	0,41	89,17
30	NTB	85,91	18	99,74	0,34	1,61	86,75
31	NTT	61,00	22	97,66	0,37	1,94	71,94
32	Papua	74,57	21	98,76	0,89	2,38	77,85
33	Papua Barat	78,93	19	77,45	0,69	2,16	84,47
	Indonesia	84,54	18	99,47	0,26	1,57	84,19

R-S/G SMP berkisar antara 11 terendah (Aceh) sampai 27 tertinggi (Jawa Barat) dengan angka nasional sebesar 18. Dengan demikian, satu orang guru menangani rata-rata 18 siswa. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 10 provinsi (30,30%) yang memiliki R-S/G SMP di atas angka nasional atau berarti kekurangan guru, yaitu 1) Jawa Barat, 2) Banten, 3) Kalimantan Barat, 4) NTT, 5) Papua, 6) Jawa Tengah, 7) DKI Jakarta, 8) Maluku Utara, 9) Papua Barat, dan 10) Sulawesi Barat, sedangkan 23 provinsi (69,70%) memiliki R-S/G lebih kecil atau sama dengan angka nasional.

AL SMP berkisar antara 77,45% terendah (Papua Barat) hingga 100,00% tertinggi (DKI Jakarta), dengan angka nasional 99,47%. Hal ini berarti terdapat 0,53% siswa tingkat IX yang tidak lulus. Bila dibandingkan antarprovinsi, AL SMP lebih rendah dari nasional terdapat di 13 Provinsi (39,39%), yaitu 1) Sulawesi Tenggara, 2) Aceh, 3) DI Yogyakarta, 4) Jawa Tengah, 5) Kalimantan Tengah, 6) Papua, 7) Bangka Belitung, 8) Sulawesi Tengah, 9) Sumatera Barat, 10) Kepulauan Riau, 11) Kalimantan Barat, 12) NTT, dan 13) Papua Barat. Sisanya, sebanyak 20 provinsi (60,61%) memiliki

AL yang lebih baik dari nasional. Jika kondisi ini merupakan hasil UN maka hasil lulusan tergolong cukup baik.

AU SMP berkisar antara 0,06% terbaik (Bali) dan 1,21% terburuk (Gorontalo), dengan rata-rata nasional sebesar 0,26%. Hal ini berarti masih terdapat 0,26% siswa yang mengulang. Dengan menggunakan norma nasional, AU SMP yang lebih baik dari nasional terdapat di 7 provinsi (21,21%), yaitu 1) Kalimantan Timur, 2) Sumatera Utara, 3) Banten, 4) Jawa Tengah, 5) Jawa Timur, 6) Jawa Barat, dan 7) Bali. Sisanya, 26 provinsi (78,79%) memiliki AU lebih buruk dari nasional.

APS SMP berkisar antara 0,41% terbaik (Bali) dan 5,18% terburuk (Kalimantan Tengah) dengan rata-rata nasional sebesar 1,57%. Hal ini berarti masih terdapat 1,57% siswa yang putus sekolah. Dengan menggunakan norma nasional, APS SMP lebih baik dari norma nasional terdapat di 9 provinsi (27,27%), yaitu 1) DKI Jakarta, 2) Riau, 3) Jawa Tengah, 4) Kalimantan Barat, 5) Jawa Timur, 6) Jawa Barat, 7) Sumatera Selatan, 8) Sulawesi Tenggara, dan 9) Bali. Sisanya, 24 provinsi (72,73%) memiliki APS lebih buruk dari nasional.

%RKb SMP berkisar antara 69,66% terkecil (Maluku) hingga 91,77% terbesar (Bangka Belitung) dengan angka nasional 84,19%. Hal ini berarti terdapat 15,81% ruang kelas dalam kondisi rusak. Bila dibandingkan antarprovinsi, %RKb SMP lebih buruk dari nasional terdapat di 18 Provinsi (54,55%). Sisanya, 15 provinsi (45,45%) dengan %RKb lebih baik dari nasional, yaitu 1) Bangka Belitung, 2) Bali, 3) Kepulauan Riau, 4) Jawa Tengah, 5) Kalimantan Timur, 6) Banten, 7) Sulawesi Tengah, 8) Jawa Timur, 9) DKI Jakarta, 10) NTB, 11) Jambi, 12) DI Yogyakarta, 13) Jawa Barat, 14) Papua Barat, dan 15) Kalimantan Barat. Fakta ini juga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, apakah rendahnya %RKb sebagai akibat dari pemeliharaan yang kurang baik, kualitas fisik/bangunan yang kurang baik, atau faktor-faktor lainnya.

Tabel 4.31 merupakan enam indikator kualitas layanan pendidikan yang telah dikonversi sehingga menghasilkan nilai kualitas layanan pendidikan SMP. Pada tingkat nasional, %GL menjadi 84,54, R-S/G menjadi 100,00, AL menjadi 99,47, AU menjadi 99,74, APS menjadi 98,43, dan %RKb menjadi 84,19 sehingga nilai kualitas layanan pendidikan SMP menjadi 94,40. Hal ini berarti kualitas layanan pendidikan SMP telah tercapai 94% dengan nilai kualitas layanan pendidikan tertinggi terjadi di Jawa Timur (96,50%) dan terendah terjadi di Maluku (85,49).

Berdasarkan standar ideal maka terdapat 25 (75,76%) provinsi termasuk kriteria paripurna (91-100) dan 8 provinsi (24,24%) termasuk dalam kriteria utama (81-90). Hal ini berarti kondisi kualitas layanan pendidikan SMP sebesar 94,40 termasuk kategori paripurna.

Tabel 4.31
Kualitas Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	% GL	R S/G	AL	AU	APS	% RKB	Nilai
1	DKI Jakarta	88,65	100,00	100,00	99,73	98,54	87,16	95,68
2	Jawa Barat	89,38	100,00	99,97	99,94	99,01	84,55	95,48
3	Banten	86,98	100,00	99,89	99,82	97,95	87,74	95,39
4	Jawa Tengah	89,16	100,00	99,17	99,85	98,95	88,48	95,93
5	DI Yogyakarta	86,01	85,96	99,28	99,73	98,03	85,99	92,50
6	Jawa Timur	93,06	100,00	99,84	99,86	98,99	87,23	96,50
7	Aceh	76,21	75,68	99,40	99,49	97,47	80,83	88,18
8	Sumatera Utara	80,10	100,00	99,87	99,80	97,44	83,82	93,50
9	Sumatera Barat	79,49	85,42	98,20	99,51	98,03	77,43	89,68
10	R i a u	78,34	100,00	99,77	99,51	98,83	82,29	93,12
11	Kepulauan Riau	79,21	100,00	97,96	99,30	98,06	89,11	93,94
12	J a m b i	78,23	100,00	99,78	99,48	97,75	86,24	93,58
13	Sumatera Selatan	82,72	100,00	99,87	99,61	99,03	80,17	93,57
14	Bangka Belitung	74,84	100,00	98,31	99,03	97,61	91,77	93,60
15	Bengkulu	88,53	97,34	99,52	99,27	97,54	76,54	93,12
16	Lampung	76,02	100,00	99,83	99,73	97,43	81,87	92,48
17	Kalimantan Barat	71,67	100,00	97,81	99,51	98,96	84,34	92,05
18	Kalimantan Tengah	85,79	85,07	99,01	99,72	94,82	83,76	91,36
19	Kalimantan Selatan	87,98	82,42	99,85	99,59	95,06	77,81	90,45
20	Kalimantan Timur	87,03	100,00	99,94	99,76	98,16	88,24	95,52
21	Sulawesi Utara	68,28	91,43	99,92	99,73	96,89	81,06	89,55
22	Gorontalo	78,62	85,10	99,82	98,79	98,34	79,95	90,11
23	Sulawesi Tengah	88,64	100,00	98,23	99,28	97,93	87,37	95,24
24	Sulawesi Selatan	89,04	100,00	99,81	99,71	98,14	77,26	93,99
25	Sulawesi Barat	89,35	100,00	99,63	99,63	97,89	78,10	94,10
26	Sulawesi Tenggara	85,48	99,24	99,43	99,29	99,54	72,68	92,61
27	Maluku	46,54	99,38	99,79	99,45	98,11	69,66	85,49
28	Maluku Utara	79,08	100,00	99,67	99,19	97,86	81,64	92,91
29	B a l i	88,48	100,00	99,76	99,94	99,59	89,17	96,16
30	NTB	85,91	100,00	99,74	99,66	98,39	86,75	95,08
31	NTT	61,00	100,00	97,66	99,63	98,06	71,94	88,05
32	Papua	74,57	100,00	98,76	99,11	97,62	77,85	91,32
33	Papua Barat	78,93	100,00	77,45	99,31	97,84	84,47	89,67
	Indonesia	84,54	100,00	99,47	99,74	98,43	84,19	94,40

3. SM

Hasil analisis enam indikator kualitas layanan pendidikan di tiap provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 4.32. %GL SM berkisar antara 83,05% terkecil (Maluku) dan 97,94% terbesar (Jawa Timur) dengan angka nasional sebesar 91,88%. Dengan demikian, masih terdapat 8,12% guru yang belum layak mengajar. Dengan menggunakan standar ideal (100%) maka tidak ada satu provinsi pun yang mencapai standar tersebut. Apabila digunakan norma nasional, %GL SM yang lebih baik dari nasional terdapat di 13 provinsi (39,39%), yaitu 1) Jawa Timur, 2) Sulawesi Selatan, 3) Sulawesi Tengah, 4) NTB, 5) Sumatera Barat, 6) Jawa Tengah, 7) DI Yogyakarta, 8) DKI Jakarta, 9) Sulawesi Tenggara, 10) Bali, 11) Kalimantan Selatan, 12) Gorontalo, dan 13) Bengkulu. Sisanya, sebanyak 20 provinsi (60,61%) memiliki %GL lebih buruk dari nasional.

R-S/G SM berkisar antara 12 terendah (DI Yogyakarta) sampai 25 tertinggi (Banten) dengan angka nasional sebesar 19. Dengan demikian, satu orang guru menangani rata-rata 19 siswa. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 6 provinsi (18,18%) yang memiliki R-S/G SM di atas angka nasional atau kekurangan guru, yaitu 1) Banten, 2) Jawa Barat, 3) Papua Barat, 4) Jawa Timur, 5) Sulawesi Barat, dan 6) Jawa Tengah, sedangkan 27 provinsi lainnya (81,82%) memiliki R-S/G lebih kecil atau sama dengan angka nasional.

Tabel 4.32
Indikator Kualitas Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	% GL	R S/G	AL	AU	APS	% RKB
1	DKI Jakarta	93,24	18	99,80	0,28	2,57	94,82
2	Jawa Barat	91,18	24	99,94	0,15	1,28	90,84
3	Banten	90,25	25	99,67	0,13	1,77	93,51
4	Jawa Tengah	93,53	20	99,80	0,22	1,05	90,75
5	DI Yogyakarta	93,34	12	99,56	0,30	2,76	95,27
6	Jawa Timur	97,94	21	99,95	0,22	1,09	90,97
7	Aceh	89,96	14	98,65	0,91	3,14	85,03
8	Sumatera Utara	88,12	19	99,92	0,18	1,95	90,18
9	Sumatera Barat	94,07	14	98,55	0,48	3,12	86,21
10	Riau	90,70	15	99,41	0,36	2,72	84,24
11	Kepulauan Riau	90,61	16	98,69	0,45	3,33	91,73
12	Jambi	91,02	16	98,81	0,29	2,90	84,25
13	Sumatera Selatan	89,98	18	99,85	0,22	2,36	89,72
14	Bangka Belitung	84,05	18	98,64	0,72	5,05	89,27
15	Bengkulu	91,99	14	98,63	0,29	5,12	83,09
16	Lampung	85,96	16	99,50	0,25	2,35	83,48
17	Kalimantan Barat	84,09	19	98,83	0,67	3,75	83,66
18	Kalimantan Tengah	89,88	13	98,18	0,32	4,08	89,72
19	Kalimantan Selatan	92,16	16	99,03	0,51	5,09	89,42
20	Kalimantan Timur	90,09	16	99,39	0,44	4,31	90,80
21	Sulawesi Utara	90,98	16	99,91	0,23	5,07	84,41
22	Gorontalo	92,09	17	98,70	0,41	2,80	93,13
23	Sulawesi Tengah	94,88	18	98,26	0,77	5,06	81,28
24	Sulawesi Selatan	95,05	18	99,20	0,39	2,11	83,26
25	Sulawesi Barat	90,80	20	99,09	0,34	3,57	87,55
26	Sulawesi Tenggara	93,18	15	99,05	0,44	3,99	80,10
27	Maluku	83,05	13	98,66	0,39	3,71	75,00
28	Maluku Utara	89,49	17	98,46	0,67	4,84	80,42
29	Bali	92,73	17	99,88	0,08	1,45	92,43
30	NTB	94,43	19	98,67	0,44	3,22	88,72
31	NTT	85,83	18	98,29	0,80	3,86	77,85
32	Papua	88,86	16	99,28	1,48	5,42	80,06
33	Papua Barat	91,76	23	98,33	0,95	6,77	89,02
	Indonesia	91,88	19	99,55	0,31	2,20	88,98

AL SM berkisar antara 98,18% terendah (Kalimantan Tengah) dan 99,95% tertinggi (Jawa Timur) dengan rata-rata nasional sebesar 99,55%. Hal ini berarti masih terdapat 0,45% siswa tingkat XII tidak lulus. Bila menggunakan standar ideal 100% maka tidak ada provinsi pun yang mencapai ideal. Bila menggunakan norma nasional maka terdapat 10 provinsi (30,30%) telah mencapai norma nasional, yaitu 1) Jawa Timur, 2) Jawa Barat, 3) Sumatera Utara, 4) Sulawesi Utara, 5) Bali, 6) Sumatera Selatan, 7) Jawa Tengah, 8) DKI Jakarta, 9) Banten dan 10) DI Yogyakarta.

Sisanya, sebanyak 23 provinsi (69,70%) memiliki AL SM lebih rendah dari norma nasional.

AU SM berkisar antara 0,08% terbaik (Bali) dan 1,48% terburuk (Papua), dengan rata-rata nasional sebesar 0,31%. Hal ini berarti masih ada 0,31% siswa yang putus sekolah. Dengan menggunakan norma nasional, AU SM yang lebih baik dari norma nasional terdapat di 13 provinsi (39,39%), yaitu 1) DI Yogyakarta, 2) Jambi, 3) Bengkulu, 4) DKI Jakarta, 5) Lampung, 6) Sulawesi Utara, 7) Sumatera Selatan, 8) Jawa Tengah, 9) Jawa Timur, 10) Sumatera Utara, 11) Jawa Barat, 12) Banten, dan 13) Bali. Sisanya, sebanyak 20 provinsi (60,69%) memiliki AU SM lebih buruk daripada nasional.

APS SM berkisar antara 1,05% terbaik (Jawa Tengah) dan 6,77% terburuk (Papua Barat) dengan rata-rata nasional sebesar 2,20%. Hal ini berarti masih terdapat 2,20% siswa putus sekolah. Dengan menggunakan norma nasional, APS SM yang lebih baik dari norma nasional terdapat di 7 provinsi (21,21%), yaitu 1) Sulawesi Selatan, 2) Sumatera Utara, 3) Banten, 4) Bali, 5) Jawa Barat, 6) Jawa Timur, dan 7) Jawa Tengah. Sisanya, 26 provinsi (78,79%) memiliki APS lebih buruk daripada nasional.

%Rkb SM berkisar antara 75,00% terendah (Maluku) dan 95,27% tertinggi (DI Yogyakarta) dengan rata-rata nasional sebesar 88,98%. Hal ini berarti masih terdapat 11,02% ruang kelas dalam kondisi rusak. %Rkb SM pada setiap provinsi menunjukkan bahwa 16 provinsi (48,48%) mencapai lebih baik dari norma nasional, yaitu 1) DI Yogyakarta, 2) DKI Jakarta, 3) Banten, 4) Gorontalo 5) Bali, 6) Kepulauan Riau, 7) Jawa Timur, 8) Jawa Barat, 9) Kalimantan Timur, 10) Jawa Tengah, 11) Sumatera Utara, 12) Sumatera Selatan, 13) Kalimantan Tengah, 14) Kalimantan Selatan, 15) Bangka Belitung, dan 16) Papua Barat. Sisanya, sebanyak 17 provinsi (51,52%) %Rkb lebih buruk dari nasional.

Tabel 4.33 merupakan enam indikator kualitas layanan pendidikan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai. Pada tingkat nasional, %GL menjadi 91,88, R-S/G menjadi 100,00, AL menjadi 99,55, AU menjadi 99,69, APS menjadi 97,80, dan % Rkb menjadi 84,19 sehingga nilai kualitas layanan pendidikan menjadi 95,52. Hal ini berarti kualitas layanan pendidikan SM telah tercapai 96% dengan nilai kualitas layanan pendidikan terendah (91,21) terjadi di Maluku dan tertinggi (97,30%) terjadi di Jawa Timur.

Berdasarkan standar ideal maka layanan pendidikan SM keseluruhan telah dalam kondisi paripurna dan ditandai oleh persentase 100% pada nilai dan 91-100.

Tabel 4.33
Kinerja Kualitas Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	% GL	R S/G	AL	AU	APS	% RKB	Nilai
1	DKI Jakarta	93,24	100,00	99,80	99,72	97,43	87,16	96,23
2	Jawa Barat	91,18	100,00	99,94	99,85	98,72	84,55	95,71
3	Banten	90,25	100,00	99,67	99,87	98,23	87,74	95,96
4	Jawa Tengah	93,53	100,00	99,80	99,78	98,95	88,48	96,76
5	DI Yogyakarta	93,34	97,97	99,56	99,70	97,24	85,99	95,63
6	Jawa Timur	97,94	100,00	99,95	99,78	98,91	87,23	97,30
7	Aceh	89,96	100,00	98,65	99,09	96,86	80,83	94,23
8	Sumatera Utara	88,12	100,00	99,92	99,82	98,05	83,82	94,95
9	Sumatera Barat	94,07	100,00	98,55	99,52	96,88	77,43	94,41
10	R i a u	90,70	100,00	99,41	99,64	97,28	82,29	94,89
11	Kepulauan Riau	90,61	100,00	98,69	99,55	96,67	89,11	95,77
12	J a m b i	91,02	100,00	98,81	99,71	97,10	86,24	95,48
13	Sumatera Selatan	89,98	100,00	99,85	99,78	97,64	80,17	94,57
14	Bangka Belitung	84,05	100,00	98,64	99,28	94,95	91,77	94,78
15	Bengkulu	91,99	100,00	98,63	99,71	94,88	76,54	93,63
16	Lampung	85,96	100,00	99,50	99,75	97,65	81,87	94,12
17	Kalimantan Barat	84,09	100,00	98,83	99,33	96,25	84,34	93,81
18	Kalimantan Tengah	89,88	100,00	98,18	99,68	95,92	83,76	94,57
19	Kalimantan Selatan	92,16	100,00	99,03	99,49	94,91	77,81	93,90
20	Kalimantan Timur	90,09	100,00	99,39	99,56	95,69	88,24	95,49
21	Sulawesi Utara	90,98	100,00	99,91	99,77	94,93	81,06	94,44
22	Gorontalo	92,09	100,00	98,70	99,59	97,20	79,95	94,59
23	Sulawesi Tengah	94,88	100,00	98,26	99,23	94,94	87,37	95,78
24	Sulawesi Selatan	95,05	100,00	99,20	99,61	97,89	77,26	94,84
25	Sulawesi Barat	90,80	100,00	99,09	99,66	96,43	78,10	94,01
26	Sulawesi Tenggara	93,18	100,00	99,05	99,56	96,01	72,68	93,42
27	Maluku	83,05	100,00	98,66	99,61	96,29	69,66	91,21
28	Maluku Utara	89,49	100,00	98,46	99,33	95,16	81,64	94,01
29	B a l i	92,73	100,00	99,88	99,92	98,55	89,17	96,71
30	NTB	94,43	100,00	98,67	99,56	96,78	86,75	96,03
31	NTT	85,83	100,00	98,29	99,20	96,14	71,94	91,90
32	Papua	88,86	100,00	99,28	98,52	94,58	77,85	93,18
33	Papua Barat	91,76	100,00	98,33	99,05	93,23	84,47	94,47
	Indonesia	91,88	100,00	99,55	99,69	97,80	84,19	95,52

4. PT

Hasil analisis tiga indikator kualitas layanan pendidikan di tiap provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 4.34. %DL PT berkisar antara 56,62% terkecil (Sulawesi Barat) dan 80,47% terbesar (Bali) dengan angka nasional sebesar 70,71%. Dengan demikian, masih terdapat 29,29% dosen yang belum layak mengajar.

Dengan menggunakan standar ideal (100%) maka tidak ada satu provinsi pun yang mencapai standar tersebut. Apabila digunakan norma nasional, %DL PT yang lebih baik dari nasional terdapat di 12 provinsi (36,36%), yaitu 1) Bali, 2) DI Yogyakarta, 3) Maluku Utara, 4) Kalimantan Timur, 5) Jawa Tengah, 6) Kalimantan Selatan, 7) Jawa Timur, 8) Gorontalo, 9) Bengkulu, 10) Maluku, 11) Sumatera Barat, dan 12) Jawa Barat. Sisanya, sebanyak 21 provinsi (63,64%) memiliki %DL lebih buruk dari nasional.

Tabel 4.34
Indikator Kualitas Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	% DL	R-M/D	AL	No.	Provinsi	% DL	R-M/D	AL
1	DKI Jakarta	69.45	45.20	17.33	18	Kalimantan Tengah	68.61	33.67	16.68
2	Jawa Barat	71.13	26.87	15.25	19	Kalimantan Selatan	75.13	16.81	12.85
3	Banten	69.02	23.52	21.48	20	Kalimantan Timur	76.04	27.09	12.50
4	Jawa Tengah	75.33	26.32	16.07	21	Sulawesi Utara	69.37	14.10	13.38
5	DI Yogyakarta	80.05	26.31	15.77	22	Gorontalo	72.66	28.63	11.12
6	Jawa Timur	74.47	27.52	14.05	23	Sulawesi Tengah	68.65	24.54	13.67
7	Aceh	65.11	24.39	10.70	24	Sulawesi Selatan	68.24	32.70	13.21
8	Sumatera Utara	63.90	27.98	14.97	25	Sulawesi Barat	56.62	36.21	8.77
9	Sumatera Barat	71.64	28.48	16.23	26	Sulawesi Tenggara	68.18	30.57	13.39
10	Riau	70.30	32.77	19.69	27	Maluku	71.77	22.93	16.32
11	Kepulauan Riau	64.27	28.40	13.21	28	Maluku Utara	77.94	21.25	14.77
12	Jambi	68.68	25.57	10.22	29	Bali	80.47	18.96	20.11
13	Sumatera Selatan	67.87	30.75	15.19	30	NTB	60.65	28.53	15.42
14	Bangka Belitung	60.63	31.26	10.78	31	NTT	69.97	23.86	14.84
15	Bengkulu	71.91	28.73	16.37	32	Papua	62.11	27.11	7.93
16	Lampung	65.40	30.51	16.68	33	Papua Barat	63.73	18.93	10.67
17	Kalimantan Barat	65.19	28.05	12.97		Indonesia	70.71	29.11	15.42

R-M/D sebesar 29,11 dengan nilai terendah yang terbaik sebesar 14,10 (Sulawesi Utara) dan nilai tertinggi yang terburuk sebesar 45,20 (DKI Jakarta). Bila digunakan norma nasional maka DKI Jakarta masih sangat kekurangan dosen karena nilainya jauh dari 29,11 sedangkan Sulawesi Utara sudah kelebihan dosen. R-M/D yang lebih buruk dari nasional atau kondisi kurang terdapat di 9 provinsi, yaitu 1) Lampung, 2) Sulawesi Tenggara, 3) Sumatera Selatan, 4) Bangka Belitung, 5) Sulawesi Selatan, 6) Riau, 7) Kalimantan Tengah, 8) Sulawesi Barat, dan 9) DKI Jakarta.

AL PT berkisar antara 7,93% terendah (Papua) dan 21,48% tertinggi (Banten) dengan rata-rata nasional sebesar 15,42%. Hal ini berarti bahwa mahasiswa yang lulus baru mencapai 15,42% dari mahasiswa yang ada. Bila menggunakan standar ideal 100% maka tidak ada provinsi pun yang mencapai ideal. Bila menggunakan norma nasional maka terdapat 11 provinsi (33,33%) lebih baik dari norma nasional, yaitu 1) Banten, 2) Bali, 3) Riau, 4) DKI Jakarta, 5) Kalimantan Tengah, 6) Lampung, 7) Bengkulu, 8) Maluku, 9) Sumatera Barat, 10) Jawa Tengah, dan 11) DI Yogyakarta. Sisanya, sebanyak 22 provinsi (66,67%) memiliki AL PT lebih rendah dari norma nasional.

Tabel 4.35 merupakan tiga indikator kualitas layanan pendidikan PT yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai. Pada tingkat nasional, %DL menjadi sebesar 70,71, R-M/D sebesar 97,03, dan AL sebesar 15,42 sehingga nilai kualitas layanan pendidikan PT adalah 65,62. Hal ini berarti kualitas layanan pendidikan di PT tercapai sekitar 66% sedangkan tertinggi terjadi di DKI Jakarta (71,55) dan terendah terjadi di Sulawesi Utara (43,49).

Berdasarkan standar ideal maka dapat dikatakan 1 provinsi, yaitu DKI Jakarta termasuk kategori pratama (71-75) dan 32 provinsi (96,97%)

termasuk kategori kurang (≤ 70). Dengan demikian dapat dikatakan kualitas layanan PT sebesar 65,62 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.35
Kinerja Kualitas Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	% DL	R-M/D	AL	Nilai
1	DKI Jakarta	69.45	100.00	45.20	71.55
2	Jawa Barat	71.13	89.57	26.87	62.52
3	Banten	69.02	78.39	23.52	56.98
4	Jawa Tengah	75.33	87.73	26.32	63.13
5	DI Yogyakarta	80.05	87.70	26.31	64.69
6	Jawa Timur	74.47	91.73	27.52	64.57
7	Aceh	65.11	81.32	24.39	56.94
8	Sumatera Utara	63.90	93.26	27.98	61.71
9	Sumatera Barat	71.64	94.95	28.48	65.02
10	Riau	70.30	100.00	32.77	67.69
11	Kepulauan Riau	64.27	94.66	28.40	62.44
12	Jambi	68.68	85.25	25.57	59.84
13	Sumatera Selatan	67.87	100.00	30.75	66.21
14	Bangka Belitung	60.63	100.00	31.26	63.96
15	Bengkulu	71.91	95.77	28.73	65.47
16	Lampung	65.40	100.00	30.51	65.30
17	Kalimantan Barat	65.19	93.51	28.05	62.25
18	Kalimantan Tengah	68.61	100.00	33.67	67.43
19	Kalimantan Selatan	75.13	56.05	16.81	49.33
20	Kalimantan Timur	76.04	90.30	27.09	64.48
21	Sulawesi Utara	69.37	46.99	14.10	43.49
22	Gorontalo	72.66	95.42	28.63	65.57
23	Sulawesi Tengah	68.65	81.80	24.54	58.33
24	Sulawesi Selatan	68.24	100.00	32.70	66.98
25	Sulawesi Barat	56.62	100.00	36.21	64.28
26	Sulawesi Tenggara	68.18	100.00	30.57	66.25
27	Maluku	71.77	76.44	22.93	57.05
28	Maluku Utara	77.94	70.83	21.25	56.67
29	Bali	80.47	63.20	18.96	54.21
30	NTB	60.65	95.11	28.53	61.43
31	NTT	69.97	79.53	23.86	57.79
32	Papua	62.11	90.38	27.11	59.87
33	Papua Barat	63.73	63.10	18.93	48.59
	Indonesia	70.71	97.03	29.11	65.62

6. Semua Jenjang

Dengan melihat kebijakan pemerintah di mana pada jenjang yang lebih tinggi seperti SM dan PT termasuk dalam program peningkatan kualitas maka seharusnya SM dan PT yang paling berkualitas kemudian SMP dan terakhir adalah SD dan TK.

Kebijakan tersebut memang didukung dengan kondisi pada Tabel 4.36, di mana secara nasional SM (95,52%) lebih berkualitas jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah. Namun, masalah yang terjadi adalah pada PT (61,06) ternyata belum berkualitas. Bila mutu pendidikan dibandingkan antarjenjang pendidikan TK, SD, SMP, SM dan PT maka

diperoleh provinsi mana yang memiliki pendidikan berkualitas. Tabel 4.36 juga menunjukkan bahwa mutu provinsi untuk 5 jenjang pendidikan dengan nilai nasional sebesar 80,47, nilai tertinggi terjadi di DKI Jakarta (84,04) dan terendah terjadi di Sulawesi Utara (73,99). Hal ini berarti kualitas pendidikan nasional tercapai 80%.

Tabel 4.36
Kinerja Kualitas Layanan Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TK	SD	SMP	SM	PT	Rata-rata
1	DKI Jakarta	74.08	91.97	95.68	96.23	62.26	84.04
2	Jawa Barat	64.31	89.48	95.48	95.71	58.65	80.73
3	Banten	65.73	90.27	95.39	95.96	56.30	80.73
4	Jawa Tengah	60.46	87.67	95.93	96.76	59.71	80.11
5	DI Yogyakarta	78.44	89.07	92.50	95.63	61.18	83.36
6	Jawa Timur	65.09	88.18	96.50	97.30	60.08	81.43
7	Aceh	60.00	80.05	88.18	94.23	52.37	74.97
8	Sumatera Utara	68.19	86.72	93.50	94.95	57.38	80.15
9	Sumatera Barat	63.02	85.21	89.68	94.41	60.94	78.65
10	Riau	58.66	85.84	93.12	94.89	63.33	79.17
11	Kepulauan Riau	66.48	87.94	93.94	95.77	57.38	80.30
12	Jambi	63.13	85.13	93.58	95.48	54.72	78.41
13	Sumatera Selatan	62.00	83.92	93.57	94.57	61.02	79.01
14	Bangka Belitung	68.28	84.27	93.60	94.78	57.14	79.61
15	Bengkulu	61.38	86.38	93.12	93.63	61.35	79.17
16	Lampung	60.98	84.30	92.48	94.12	60.70	78.52
17	Kalimantan Barat	63.77	83.15	92.05	93.81	57.23	78.00
18	Kalimantan Tengah	62.14	82.90	91.36	94.57	61.77	78.55
19	Kalimantan Selatan	62.46	83.41	90.45	93.90	48.01	75.65
20	Kalimantan Timur	64.28	84.87	95.52	95.49	59.61	79.95
21	Sulawesi Utara	58.51	84.21	89.55	94.44	43.25	73.99
22	Gorontalo	57.59	84.81	90.11	94.59	59.73	77.37
23	Sulawesi Tengah	63.39	79.81	95.24	95.78	54.71	77.78
24	Sulawesi Selatan	65.39	87.65	93.99	94.84	60.49	80.47
25	Sulawesi Barat	60.00	83.97	94.10	94.01	55.13	77.44
26	Sulawesi Tenggara	59.39	81.69	92.61	93.42	60.52	77.53
27	Maluku	69.67	80.78	85.49	91.21	54.84	76.40
28	Maluku Utara	64.43	80.53	92.91	94.01	54.51	77.28
29	Bali	65.46	91.76	96.16	96.71	54.59	80.94
30	NTB	61.90	90.03	95.08	96.03	57.06	80.02
31	NTT	60.45	79.23	88.05	91.90	54.78	74.88
32	Papua	65.70	79.92	91.32	93.18	53.47	76.72
33	Papua Barat	60.99	81.51	89.67	94.47	45.83	74.50
	Indonesia	64.03	87.36	94.40	95.52	61.06	80.47

Berdasarkan standar ideal maka terdapat 3 provinsi (9,09%) termasuk kriteria madya (76-80) dan 25 provinsi (75,76%) termasuk dalam kriteria pratama (71-75), dan 5 provinsi (9,09%) termasuk kriteria pratama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa layanan kualitas pendidikan sebesar 80,47 termasuk kategori madya.

D. Misi K-4: Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan

Misi K-4 kesetaraan memperoleh layanan pendidikan menggunakan tiga indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui kinerja kesetaraan layanan pendidikan. Tabel 4.37 menunjukkan perbandingan ketiga indikator kesetaraan layanan pendidikan antara lima jenjang pendidikan. PG APK TK

sebesar -0,63, SD sebesar -0,23, SMP sebesar 0,28, SM sebesar 0,88 dan PT sebesar 1,51. Hal ini berarti di semua jenjang masih terjadi perbedaan gender.

Tabel 4.37
Perbandingan Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan
Tahun 2011/2012

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal	Angka Nasional				
			TK	SD	SMP	SM	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PG APK	0.00	-0.63	-0.23	0.28	0.88	1.51
2.	IPG APK	1.00	1.02	1.00	1.00	0.99	0.95
3.	% S-Swt	97/9/24/47/62	97.06	9.23	23.90	47.40	67.66

Masih pada Tabel 4.37 ternyata makin tinggi jenjang pendidikan APK laki-laki semakin besar jika dibandingkan dengan perempuan dengan ditunjukkan nilai PG (Perbedaan Gender) APK dari negatif yang berarti APK perempuan lebih besar dibanding laki-laki menjadi positif yang berarti APK laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan untuk sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. PG APK di PT tertinggi sebesar 1,51 sedangkan SD terkecil sebesar -0,23. Hal ini berarti makin rendah jenjang pendidikan makin kecil perbedaan gender (kecuali TK).

Untuk IPG (Indeks Paritas Gender) APK ternyata untuk SD dan SMP telah setara antara laki-laki dan perempuan yang bersekolah. IPG APK TK (1,02) dan SM (0,99) mendekati setara, sedangkan PT sebesar 0,95 yang kesetaraannya terburuk.

Dalam partisipasi sekolah swasta, ternyata % S-Swt (persentase sekolah Swasta) terkecil pada SD sebesar 9,23 dan terbesar pada TK sebesar 97,06. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar partisipasi terhadap penyelenggaraan sekolah, dengan ditunjukkan % S-Swt terbesar 67,66 pada PT dan terkecil 9,23 pada SD kecuali TK sebesar 97,06. Hal ini juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di TK lebih banyak ditangani oleh masyarakat.

1. Taman Kanak-kanak (TK)

Hasil analisis tiga indikator kesetaraan layanan pendidikan TK tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.38. PG APK TK berkisar antara -3,20 terendah (Kalimantan Tengah) berarti laki-laki lebih kecil daripada perempuan, sampai 10,81 tertinggi (Sulawesi Utara) berarti perempuan lebih kecil daripada laki-laki, dengan angka nasional sebesar -0,63. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 24 provinsi (72,73%) memiliki PG APK dengan

perempuan lebih besar dengan ditandai nilai negatif, sedangkan 9 provinsi lainnya (27,27%) memiliki PG APK dengan perempuan lebih kecil dengan ditandai nilai positif dan satu provinsi tak ada perbedaan gender.

Tabel 4.38
Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt	No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt
1	DKI Jakarta	3.28	0.91	99.35	18	Kalimantan Tengah	-3.20	1.08	95.70
2	Jawa Barat	-0.84	1.04	98.25	19	Kalimantan Selatan	-2.66	1.05	97.51
3	Banten	-1.05	1.05	97.77	20	Kalimantan Timur	-1.33	1.04	96.68
4	Jawa Tengah	-1.39	1.03	98.55	21	Sulawesi Utara	10.81	0.84	97.60
5	DI Yogyakarta	7.12	0.93	98.92	22	Gorontalo	-2.20	1.04	97.50
6	Jawa Timur	-2.86	1.04	98.91	23	Sulawesi Tengah	3.66	0.91	97.02
7	Aceh	3.63	0.89	92.90	24	Sulawesi Selatan	-1.12	1.03	97.56
8	Sumatera Utara	-0.95	1.05	90.91	25	Sulawesi Barat	-1.51	1.03	92.59
9	Sumatera Barat	-1.63	1.05	95.89	26	Sulawesi Tenggara	-1.12	1.03	92.12
10	Riau	-1.99	1.09	95.53	27	Maluku	-0.18	1.01	90.82
11	Kepulauan Riau	-0.81	1.03	90.91	28	Maluku Utara	-1.34	1.06	89.47
12	Jambi	4.96	0.86	95.11	29	Bali	-2.78	1.06	97.22
13	Sumatera Selatan	-0.72	1.04	91.74	30	NTB	0.89	0.97	95.18
14	Bangka Belitung	-1.84	1.05	81.82	31	NTT	1.39	0.92	93.03
15	Bengkulu	-1.90	1.07	88.07	32	Papua	1.65	0.92	90.89
16	Lampung	-1.35	1.05	97.04	33	Papua Barat	0.00	1.00	92.78
17	Kalimantan Barat	-0.54	1.04	89.74		Indonesia	-0.63	1.02	97.06

IPG APK TK berkisar antara 0,84 terendah (Sulawesi Utara) berarti laki-laki lebih besar, sampai 1,09 tertinggi (Riau) berarti perempuan lebih besar, dengan angka nasional sebesar 1,02. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 9 provinsi (27,27%) memiliki IPG APK dengan perempuan lebih kecil ditandai dengan nilai kurang dari 1,00, dan 24 provinsi (72,73%) memiliki IPG APK dengan perempuan lebih besar ditandai dengan nilai lebih besar dari 1,00 dan satu provinsi telah seimbang.

% S-Swt TK berkisar antara 81,82% terendah (Bangka Belitung) sampai 99,35% tertinggi (DKI Jakarta) dengan angka nasional sebesar 97,06%. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di TK sangat tinggi. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 11 provinsi (33,33%) yang memiliki % S-Swt TK di atas angka nasional, sedangkan 22 provinsi (66,67%) memiliki % S-Swt lebih kecil dari angka nasional. Sejalan dengan tingginya % S-Swt TK, kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah TK negeri di setiap provinsi relatif kecil, sehingga masih memerlukan perhatian dari pemerintah untuk membangun sekolah TK negeri yang sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah di PAUD.

Tabel 4.39 merupakan tiga jenis indikator kesetaraan memperoleh layanan pendidikan TK yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai. Pada tingkat nasional, PG APK menjadi 99,37, IPG APK menjadi 98,26, dan % S-Swt menjadi 99,65 sehingga nilai kesetaraan TK sebesar 99,09. Hal ini berarti kesetaraan memperoleh layanan pendidikan TK sekitar 99% dengan nilai

kualitas tertinggi (98,62) terjadi di Jawa Tengah (98,62) dan terendah terjadi di Sulawesi Utara (90,93).

Tabel 4.39
Kesetaraan Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt	Nilai
1	DKI Jakarta	96,72	91,20	100,00	95,97
2	Jawa Barat	99,16	96,24	100,00	98,47
3	Banten	98,95	95,23	100,00	98,06
4	Jawa Tengah	98,61	97,25	100,00	98,62
5	DI Yogyakarta	92,88	92,62	100,00	95,17
6	Jawa Timur	97,14	96,14	100,00	97,76
7	Aceh	96,37	89,14	95,38	93,63
8	Sumatera Utara	99,05	95,38	93,34	95,92
9	Sumatera Barat	98,37	95,64	98,45	97,49
10	Riau	98,01	92,11	98,08	96,07
11	Kepulauan Riau	99,19	96,87	93,34	96,47
12	Jambi	95,04	85,57	97,65	92,75
13	Sumatera Selatan	99,28	95,75	94,19	96,41
14	Bangka Belitung	98,16	95,49	84,00	92,55
15	Bengkulu	98,10	93,57	90,42	94,03
16	Lampung	98,65	95,48	99,64	97,92
17	Kalimantan Barat	99,46	95,99	92,13	95,86
18	Kalimantan Tengah	96,80	92,85	98,25	95,97
19	Kalimantan Selatan	97,34	94,96	100,00	97,43
20	Kalimantan Timur	98,67	96,16	99,26	98,03
21	Sulawesi Utara	89,19	83,59	100,00	90,93
22	Gorontalo	97,80	96,56	100,00	98,12
23	Sulawesi Tengah	96,34	91,37	99,61	95,77
24	Sulawesi Selatan	98,88	96,89	100,00	98,59
25	Sulawesi Barat	98,49	96,80	95,06	96,78
26	Sulawesi Tenggara	98,88	97,11	94,58	96,86
27	Maluku	99,82	99,16	93,24	97,41
28	Maluku Utara	98,66	93,91	91,86	94,81
29	Bali	97,22	94,40	99,82	97,15
30	NTB	99,11	96,69	97,72	97,84
31	NTT	98,61	91,91	95,51	95,34
32	Papua	98,35	91,52	93,31	94,40
33	Papua Barat	100,00	99,98	95,26	98,41
	Indonesia	99,37	98,26	99,65	99,09

Berdasarkan standar ideal maka terdapat 32 provinsi (96,97%) termasuk paripurna (91-100) dan 1 provinsi (3,03%) termasuk utama (81-90) dalam kesetaraan layanan pendidikan. Dengan demikian, berdasarkan standar ideal kesetaraan memperoleh layanan pendidikan di TK sebesar 99,09 adalah termasuk kategori paripurna.

2. Sekolah Dasar (SD)

Hasil analisis tiga indikator kesetaraan layanan pendidikan SD tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.40. PG APK SD berkisar antara -3,42 terendah (Maluku) berarti laki-laki lebih kecil daripada perempuan, sampai 2,15 tertinggi (Sumatera Barat) berarti perempuan lebih kecil daripada

perempuan, dengan angka nasional sebesar -0,23. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 17 provinsi (51,52%) memiliki PG APK dengan perempuan lebih besar dengan ditandai nilai negatif, sedangkan 16 provinsi lainnya (48,48%) memiliki PG APK dengan perempuan lebih kecil dengan ditandai nilai positif.

Tabel 4.40
Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt	No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt
1	DKI Jakarta	0.10	1.00	21.30	18	Kalimantan Tengah	-1.19	1.01	7.53
2	Jawa Barat	-1.07	1.01	5.55	19	Kalimantan Selatan	0.59	0.99	4.81
3	Banten	-1.16	1.01	8.09	20	Kalimantan Timur	0.34	1.00	10.51
4	Jawa Tengah	1.36	0.99	4.74	21	Sulawesi Utara	-0.80	1.01	37.69
5	DI Yogyakarta	0.74	0.99	20.90	22	Gorontalo	-1.93	1.02	1.44
6	Jawa Timur	1.69	0.98	6.53	23	Sulawesi Tengah	-1.03	1.01	6.13
7	Aceh	0.79	0.99	3.04	24	Sulawesi Selatan	-0.53	1.01	3.70
8	Sumatera Utara	0.03	1.00	13.53	25	Sulawesi Barat	1.08	0.99	1.15
9	Sumatera Barat	2.15	0.98	4.07	26	Sulawesi Tenggara	-1.70	1.02	1.35
10	Riau	1.17	0.99	12.45	27	Maluku	-3.41	1.04	26.90
11	Kepulauan Riau	-2.58	1.03	28.52	28	Maluku Utara	1.61	0.98	16.28
12	Jambi	-0.63	1.01	3.38	29	Bali	0.04	1.00	7.23
13	Sumatera Selatan	-1.72	1.02	4.38	30	NTB	0.01	1.00	1.52
14	Bangka Belitung	-1.20	1.01	6.34	31	NTT	-0.35	1.00	43.79
15	Bengkulu	-1.16	1.01	2.76	32	Papua	-0.35	1.00	46.43
16	Lampung	-0.01	1.00	4.54	33	Papua Barat	1.76	0.98	44.00
17	Kalimantan Barat	0.13	1.00	6.33		Indonesia	-0.23	1.00	9.23

IPG APK SD berkisar antara 0,98 terendah (Sumatera Barat, Papua Barat, Jawa Timur, Maluku Utara) berarti laki-laki lebih besar daripada perempuan, sampai 1,04 tertinggi (Maluku) berarti perempuan lebih besar daripada laki-laki, dengan angka nasional sebesar 1,00 berarti sudah setara antara laki-laki dan perempuan yang bersekolah di SD. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 10 provinsi (30,30%) memiliki IPG APK dengan perempuan lebih kecil ditandai dengan nilai kurang dari 1,00, dan 14 provinsi (42,42%) memiliki IPG APK dengan perempuan lebih besar ditandai dengan nilai lebih besar dari 1,00, sedangkan 9 provinsi lainnya (27,27%) memiliki IPG APK yang setara dengan nilai 1,00.

% S-Swt SD berkisar antara 1,15% terendah (Sulawesi Barat) sampai 46,43% tertinggi (Papua) dengan angka nasional sebesar 9,23%. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SD sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya pencanangan wajib belajar 6 tahun dengan pembangunan SD secara besar-besaran dalam rangka inpres sejak tahun 1973/1974 sampai 1983/1984. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 12 provinsi (36,36%) yang memiliki % S-Swt SD di atas angka nasional, sedangkan 21 provinsi (63,64%) memiliki % S-Swt lebih kecil dari angka nasional. Sejalan dengan rendahnya % S-Swt SD, kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah SD negeri di setiap provinsi sangat besar,

sehingga masih diperlukan perhatian dari masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pendidikan di SD.

Tabel 4.41
Kesetaraan Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt	Nilai
1	DKI Jakarta	99,90	99,90	100,00	99,93
2	Jawa Barat	98,93	98,90	60,38	86,07
3	Banten	98,84	98,80	87,94	95,19
4	Jawa Tengah	98,64	98,61	51,51	82,92
5	DI Yogyakarta	99,26	99,23	100,00	99,50
6	Jawa Timur	98,31	98,13	71,02	89,15
7	Aceh	99,21	99,17	33,06	77,14
8	Sumatera Utara	99,97	99,97	100,00	99,98
9	Sumatera Barat	97,85	97,74	44,25	79,95
10	R i a u	98,83	98,79	100,00	99,21
11	Kepulauan Riau	97,42	97,27	100,00	98,23
12	J a m b i	99,37	99,35	36,77	78,50
13	Sumatera Selatan	98,28	98,17	47,59	81,35
14	Bangka Belitung	98,80	98,77	68,89	88,82
15	Bengkulu	98,84	98,79	29,97	75,87
16	Lampung	99,99	99,99	49,38	83,12
17	Kalimantan Barat	99,87	99,86	68,78	89,51
18	Kalimantan Tengah	98,81	98,75	81,81	93,13
19	Kalimantan Selatan	99,41	99,38	52,27	83,69
20	Kalimantan Timur	99,66	99,65	100,00	99,77
21	Sulawesi Utara	99,20	99,13	100,00	99,45
22	Gorontalo	98,07	98,06	15,63	70,59
23	Sulawesi Tengah	98,97	98,89	66,59	88,15
24	Sulawesi Selatan	99,47	99,43	40,26	79,72
25	Sulawesi Barat	98,92	98,82	12,50	70,08
26	Sulawesi Tenggara	98,30	98,27	14,70	70,42
27	Maluku	96,59	96,57	100,00	97,72
28	Maluku Utara	98,39	98,34	100,00	98,91
29	B a l i	99,96	99,96	78,58	92,84
30	NTB	99,99	99,99	16,52	72,16
31	NTT	99,65	99,64	100,00	99,76
32	Papua	99,65	99,61	100,00	99,76
33	Papua Barat	98,24	98,07	100,00	98,77
	Indonesia	99,77	99,76	100,00	99,85

Tabel 4.41 merupakan tiga jenis indikator kesetaraan memperoleh layanan pendidikan SD yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai. Pada tingkat nasional, PG APK menjadi 99,77, IPG APK menjadi 99,76 dan % S-Swt menjadi 100,00 sehingga nilai kesetaraan memperoleh layanan pendidikan secara nasional menjadi 99,85. Hal ini berarti kesetaraan memperoleh layanan pendidikan SD sudah mendekati 100% dengan tertinggi terjadi di Sumatera Utara (99,98) dan terendah terjadi di Sulawesi Barat (70,08).

Berdasarkan standar ideal, terdapat 15 provinsi (45,45%) dalam kondisi paripurna (91-100), 9 provinsi (27,27%) termasuk utama (81-90), 4 provinsi (12,12%) termasuk madya (76-80), 2 provinsi (6,06%) termasuk pratama (71-75), dan 3 provinsi (9,09%) termasuk kurang (≤ 70). Dengan demikian,

berdasarkan standar ideal kesetaraan memperoleh layanan pendidikan SD sebesar 99,85 termasuk kriteria paripurna.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Hasil analisis tiga indikator kesetaraan layanan pendidikan SMP tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.42. PG APK SMP berkisar antara -7,39 terendah (Riau) berarti laki-laki lebih kecil, sampai 5,39 tertinggi (DKI Jakarta) berarti perempuan lebih kecil, dengan angka nasional sebesar 0,28. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 17 provinsi (51,52%) memiliki PG APK dengan perempuan lebih besar dengan ditandai nilai negatif, sedangkan 16 provinsi lainnya (48,49%) memiliki PG APK dengan perempuan lebih kecil dengan ditandai nilai positif.

Tabel 4.42
Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt	No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt
1	DKI Jakarta	5.93	0.95	35.94	18	Kalimantan Tengah	-5.13	1.06	11.83
2	Jawa Barat	-2.39	1.03	28.54	19	Kalimantan Selatan	0.09	1.00	9.00
3	Banten	1.39	0.99	34.93	20	Kalimantan Timur	-1.46	1.02	17.21
4	Jawa Tengah	5.24	0.95	22.05	21	Sulawesi Utara	0.12	1.00	25.26
5	DI Yogyakarta	2.36	0.98	28.39	22	Gorontalo	2.66	0.97	3.11
6	Jawa Timur	1.11	0.99	28.80	23	Sulawesi Tengah	-2.43	1.03	7.86
7	Aceh	2.27	0.98	9.36	24	Sulawesi Selatan	5.26	0.95	13.87
8	Sumatera Utara	-0.99	1.01	33.72	25	Sulawesi Barat	1.26	0.99	9.74
9	Sumatera Barat	2.08	0.98	8.55	26	Sulawesi Tenggara	-1.10	1.01	3.44
10	Riau	-7.39	1.07	17.87	27	Maluku	-3.07	1.03	21.77
11	Kepulauan Riau	-1.86	1.02	18.72	28	Maluku Utara	-1.13	1.01	20.87
12	Jambi	0.73	0.99	8.55	29	Bali	-1.19	1.01	24.26
13	Sumatera Selatan	-3.16	1.03	20.83	30	NTB	-1.27	1.01	7.97
14	Bangka Belitung	1.67	0.98	14.71	31	NTT	-2.08	1.03	28.82
15	Bengkulu	-6.29	1.06	4.29	32	Papua	-1.97	1.02	25.42
16	Lampung	-2.10	1.02	29.46	33	Papua Barat	4.08	0.95	24.88
17	Kalimantan Barat	1.91	0.98	21.21		Indonesia	0.28	1.00	23.90

IPG APK SMP berkisar antara 0,95 terendah (Sulawesi Selatan) berarti laki-laki lebih besar, sampai 1,07 tertinggi (Riau) berarti perempuan lebih besar, dengan angka nasional sebesar 1,00 berarti sudah setara antara laki-laki dan siswa bersekolah di SMP. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 14 provinsi (42,42%) memiliki IPG APK dengan perempuan lebih kecil ditandai dengan nilai kurang dari 1,00, dan 17 provinsi (51,52%) memiliki IPG APK dengan perempuan lebih besar ditandai dengan nilai lebih besar dari 1,00, sedangkan 2 provinsi lainnya (6,06%) memiliki IPG APK yang setara dengan nilai 1,00.

% S-Swt SMP berkisar antara 3,11% terendah (Gorontalo) sampai 35,94% tertinggi (DKI Jakarta) dengan angka nasional sebesar 23,90%. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya pencanangan

wajib belajar 12 tahun dengan banyak dibangunnya SMP negeri di setiap kecamatan. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 12 provinsi (36,36%) yang memiliki % S-Swt SMP di atas angka nasional, sedangkan 21 provinsi (63,64%) memiliki % S-Swt lebih kecil dari angka nasional. Sejalan dengan rendahnya % S-Swt SMP, maka diperlukan perhatian dari masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pendidikan di SMP.

Tabel 4.43 merupakan tiga jenis indikator kesetaraan memperoleh layanan pendidikan SD yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai. Pada tingkat nasional, PG APK menjadi 99,77, IPG APK menjadi 99,76 dan % S-Swt menjadi 100,00 sehingga nilai kesetaraan memperoleh layanan pendidikan secara nasional menjadi 99,85. Hal ini berarti kesetaraan memperoleh layanan pendidikan SD sudah mendekati 100% dengan nilai tertinggi terjadi di Sumatera Utara (99,98) dan terendah terjadi di Sulawesi Barat (70,08).

Tabel 4.43
Kesetaraan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt	Nilai
1	DKI Jakarta	96,27	96,31	100,00	97,53
2	Jawa Barat	99,56	99,35	100,00	99,64
3	Banten	95,31	93,79	100,00	96,37
4	Jawa Tengah	97,02	95,88	100,00	97,63
5	DI Yogyakarta	99,61	99,62	95,15	98,13
6	Jawa Timur	95,90	95,02	100,00	96,97
7	Aceh	99,09	99,05	24,49	74,21
8	Sumatera Utara	98,11	97,77	100,00	98,63
9	Sumatera Barat	92,44	90,62	51,19	78,08
10	R i a u	94,16	93,60	69,73	85,83
11	Kepulauan Riau	92,65	90,71	64,03	82,46
12	J a m b i	95,10	93,70	50,19	79,66
13	Sumatera Selatan	97,80	97,15	90,94	95,30
14	Bangka Belitung	89,64	88,24	73,58	83,82
15	Bengkulu	85,09	84,54	40,76	70,13
16	Lampung	91,26	87,11	100,00	92,79
17	Kalimantan Barat	92,51	87,89	88,36	89,59
18	Kalimantan Tengah	96,31	95,08	42,80	78,06
19	Kalimantan Selatan	99,57	99,30	51,64	83,50
20	Kalimantan Timur	98,86	98,62	68,93	88,80
21	Sulawesi Utara	96,29	96,05	71,35	87,90
22	Gorontalo	98,67	98,17	20,58	72,47
23	Sulawesi Tengah	96,03	94,21	47,30	79,18
24	Sulawesi Selatan	95,93	94,95	61,77	84,22
25	Sulawesi Barat	97,33	96,88	47,05	80,42
26	Sulawesi Tenggara	91,57	91,37	26,82	69,92
27	Maluku	93,39	93,19	59,35	81,98
28	Maluku Utara	94,50	94,60	60,96	83,36
29	B a l i	95,68	96,02	87,48	93,06
30	NTB	87,91	85,67	46,54	73,38
31	NTT	85,76	79,31	94,20	86,42
32	Papua	93,83	91,16	77,31	87,44
33	Papua Barat	98,68	97,77	64,03	86,83
	Indonesia	99,12	98,86	100,00	99,33

Berdasarkan standar ideal, terdapat 15 provinsi (45,45%) dalam kondisi paripurna (91-100), 9 provinsi (27,27%) termasuk utama (81-90), 4 provinsi (12,12%) termasuk madya (76-80), 2 provinsi (6,06%) termasuk pratama (71-75), dan 3 provinsi (9,09%) termasuk kurang (≤ 70). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal kesetaraan memperoleh kesetaraan layanan pendidikan di SD sebesar 99,33 termasuk kategori paripurna.

4. Sekolah Menengah (SM)

Hasil analisis tiga indikator kesetaraan layanan pendidikan SM tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.44. PG APK SM berkisar antara -8,43 terendah (Sulawesi Tenggara) berarti laki-laki lebih kecil, sampai 14,91 tertinggi (Bengkulu) berarti perempuan lebih kecil, dengan angka nasional sebesar 0,88. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 13 provinsi (39,39%) memiliki PG APK dengan perempuan lebih besar dengan ditandai nilai negatif, sedangkan 20 provinsi lainnya (60,61%) memiliki PG APK dengan perempuan lebih kecil dengan ditandai nilai positif.

Tabel 4.44
Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt	No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt
1	DKI Jakarta	-3.73	1.04	66.95	18	Kalimantan Tengah	-3.69	1.05	20.29
2	Jawa Barat	0.44	0.99	59.99	19	Kalimantan Selatan	-0.43	1.01	24.48
3	Banten	-4.69	1.07	60.96	20	Kalimantan Timur	1.14	0.99	32.68
4	Jawa Tengah	2.98	0.96	55.62	21	Sulawesi Utara	3.71	0.96	33.82
5	DI Yogyakarta	-0.39	1.00	45.10	22	Gorontalo	1.33	0.98	9.75
6	Jawa Timur	-4.10	1.05	54.78	23	Sulawesi Tengah	-3.97	1.06	22.42
7	Aceh	0.91	0.99	11.61	24	Sulawesi Selatan	-4.07	1.05	29.28
8	Sumatera Utara	1.89	0.98	56.46	25	Sulawesi Barat	2.67	0.97	22.30
9	Sumatera Barat	-7.56	1.10	24.26	26	Sulawesi Tenggara	-8.43	1.09	12.71
10	Riau	5.84	0.94	33.05	27	Maluku	-6.61	1.07	28.13
11	Kepulauan Riau	7.35	0.91	30.35	28	Maluku Utara	-5.50	1.06	28.90
12	Jambi	4.90	0.94	23.79	29	Bali	4.32	0.96	41.46
13	Sumatera Selatan	2.20	0.97	43.11	30	NTB	12.09	0.86	22.06
14	Bangka Belitung	10.36	0.88	34.88	31	NTT	14.24	0.79	44.65
15	Bengkulu	14.91	0.85	19.32	32	Papua	6.17	0.91	36.65
16	Lampung	8.74	0.87	53.00	33	Papua Barat	-1.32	1.02	30.35
17	Kalimantan Barat	7.49	0.88	41.88		Indonesia	0.88	0.99	47.40

IPG APK SM berkisar antara 0,79 terendah (NTT) berarti laki-laki lebih besar, sampai 1,10 tertinggi (Sumatera Barat) berarti perempuan lebih besar, dengan angka nasional sebesar 0,99. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 20 provinsi (60,61%) memiliki IPG APK dengan perempuan lebih kecil ditandai dengan nilai kurang dari 1,00, dan 12 provinsi (36,36%) memiliki IPG APK dengan perempuan lebih besar ditandai dengan nilai lebih besar dari 1,00, sedangkan 1 provinsi lainnya (3,03%) memiliki IPG APK yang setara dengan nilai 1,00.

% S-Swt SM berkisar antara 9,75% terendah (Gorontalo) sampai 66,95% tertinggi (DKI Jakarta) dengan angka nasional sebesar 47,40%. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SM cukup tinggi. Hal ini dikarenakan angka % S-Swt mencapai hampir 50%. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 7 provinsi (21,21%) yang memiliki % S-Swt SM di atas angka nasional, sedangkan 26 provinsi (78,79%) memiliki % S-Swt lebih kecil dari angka nasional. Sejalan dengan tingginya % S-Swt SM, yang berarti bahwa partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di SM cukup tinggi.

Tabel 4.45 merupakan tiga indikator kesetaraan memperoleh layanan pendidikan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai kesetaraan SM. Pada tingkat nasional, PG APK menjadi 99,12, IPG APK menjadi 98,86, dan % S-Swt menjadi 100,00 sehingga nilai kesetaraan memperoleh layanan pendidikan menjadi 99,33. Hal ini berarti kesetaraan memperoleh layanan pendidikan SM telah tercapai hampir 100% dengan nilai tertinggi terjadi di Jawa Barat (99,64%) dan terendah terjadi di Sulawesi Tenggara (69,92).

Tabel 4.45
Kesetaraan Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt	Nilai
1	DKI Jakarta	96,27	96,31	100,00	97,53
2	Jawa Barat	99,56	99,35	100,00	99,64
3	Banten	95,31	93,79	100,00	96,37
4	Jawa Tengah	97,02	95,88	100,00	97,63
5	DI Yogyakarta	99,61	99,62	95,15	98,13
6	Jawa Timur	95,90	95,02	100,00	96,97
7	Aceh	99,09	99,05	24,49	74,21
8	Sumatera Utara	98,11	97,77	100,00	98,63
9	Sumatera Barat	92,44	90,62	51,19	78,08
10	R i a u	94,16	93,60	69,73	85,83
11	Kepulauan Riau	92,65	90,71	64,03	82,46
12	J a m b i	95,10	93,70	50,19	79,66
13	Sumatera Selatan	97,80	97,15	90,94	95,30
14	Bangka Belitung	89,64	88,24	73,58	83,82
15	Bengkulu	85,09	84,54	40,76	70,13
16	Lampung	91,26	87,11	100,00	92,79
17	Kalimantan Barat	92,51	87,89	88,36	89,59
18	Kalimantan Tengah	96,31	95,08	42,80	78,06
19	Kalimantan Selatan	99,57	99,30	51,64	83,50
20	Kalimantan Timur	98,86	98,62	68,93	88,80
21	Sulawesi Utara	96,29	96,05	71,35	87,90
22	Gorontalo	98,67	98,17	20,58	72,47
23	Sulawesi Tengah	96,03	94,21	47,30	79,18
24	Sulawesi Selatan	95,93	94,95	61,77	84,22
25	Sulawesi Barat	97,33	96,88	47,05	80,42
26	Sulawesi Tenggara	91,57	91,37	26,82	69,92
27	Maluku	93,39	93,19	59,35	81,98
28	Maluku Utara	94,50	94,60	60,96	83,36
29	B a l i	95,68	96,02	87,48	93,06
30	NTB	87,91	85,67	46,54	73,38
31	NTT	85,76	79,31	94,20	86,42
32	Papua	93,83	91,16	77,31	87,44
33	Papua Barat	98,68	97,77	64,03	86,83
	Indonesia	99,12	98,86	100,00	99,33

Berdasarkan standar ideal, terdapat 10 provinsi (30,30%) termasuk paripurna (91-100), 13 provinsi (39,39%) termasuk utama (81-90), 5 provinsi (15,15%) termasuk madya (76-80), 3 provinsi (9,09%) termasuk pratama (71-75), dan 2 provinsi (6,06%) termasuk kurang (≤ 70) dalam kesetaraan memperoleh layanan pendidikan di SM. Dengan demikian, berdasarkan standar ideal kesetaraan memperoleh layanan pendidikan di SM sebesar 99,33 termasuk kategori paripurna.

5. Perguruan Tinggi (PT)

Hasil analisis tiga indikator kesetaraan layanan pendidikan PT tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.46. PG APK PT berkisar antara -15,56 terendah (DKI Jakarta) berarti laki-laki lebih kecil, sampai 11,81 tertinggi (Gorontalo) berarti perempuan lebih kecil, dengan angka nasional sebesar 1,51. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 11 provinsi (33,33%) memiliki PG APK dengan perempuan lebih besar dengan ditandai nilai negatif, sedangkan 22 provinsi lainnya (66,67%) memiliki PG APK dengan perempuan lebih kecil dengan ditandai nilai positif.

IPG APK PT berkisar antara 0,64 terendah (Sumatera Selatan) berarti laki-laki lebih besar, sampai 1,60 tertinggi (Papua) berarti perempuan lebih besar, dengan angka nasional sebesar 0,95. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 22 provinsi (66,67%) memiliki IPG APK dengan perempuan lebih kecil ditandai dengan nilai kurang dari 1,00, dan 11 provinsi (33,33%) memiliki IPG APK dengan perempuan lebih besar ditandai dengan nilai lebih besar dari 1,00, tidak ada satu provinsi pun yang memiliki IPG APK yang seimbang dengan nilai 1,00.

Tabel 4.46
Indikator Kesetaraan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% M-Swt	No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% M-Swt
1	DKI Jakarta	-15.56	1.14	46.07	18	Kalimantan Tengah	-0.69	1.06	73.68
2	Jawa Barat	3.21	0.81	77.01	19	Kalimantan Selatan	2.21	0.89	64.10
3	Banten	1.55	0.87	87.69	20	Kalimantan Timur	-3.59	1.16	48.75
4	Jawa Tengah	2.61	0.84	68.32	21	Sulawesi Utara	3.78	0.88	44.67
5	DI Yogyakarta	1.44	0.98	62.83	22	Gorontalo	11.81	0.74	47.23
6	Jawa Timur	3.29	0.87	74.14	23	Sulawesi Tengah	1.66	0.94	74.49
7	Aceh	5.21	0.87	71.26	24	Sulawesi Selatan	3.83	0.92	79.71
8	Sumatera Utara	4.14	0.88	83.61	25	Sulawesi Barat	1.30	0.83	100.00
9	Sumatera Barat	-5.10	1.13	54.70	26	Sulawesi Tenggara	1.27	0.95	72.94
10	Riau	-3.16	1.17	68.06	27	Maluku	-0.49	1.01	48.66
11	Kepulauan Riau	2.31	0.81	80.61	28	Maluku Utara	-1.00	1.03	75.17
12	Jambi	3.62	0.85	69.02	29	Bali	-4.96	1.20	60.56
13	Sumatera Selatan	8.69	0.64	80.10	30	NTB	9.38	0.74	83.42
14	Bangka Belitung	0.37	0.90	77.14	31	NTT	-0.67	1.03	68.90
15	Bengkulu	7.68	0.75	70.24	32	Papua	-8.86	1.60	59.61
16	Lampung	5.75	0.68	72.66	33	Papua Barat	10.31	0.74	77.17
17	Kalimantan Barat	-0.80	1.06	65.55		Indonesia	1.51	0.95	67.66

% S-Swt PT berkisar antara 44,67% terendah (Sulawesi Utara) sampai 100,00% tertinggi (Sulawesi Barat) yang berarti belum ada PTN dengan angka nasional sebesar 67,66%. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di PT cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan angka % S-Swt di atas 60%. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 22 provinsi (66,67%) memiliki % S-Swt PT di atas angka nasional, sedangkan 11 provinsi (33,33%) memiliki % S-Swt lebih kecil dari angka nasional. Sejalan dengan tingginya % S-Swt PT, terutama di Sulawesi Barat maka diharapkan pemerintah segera membangun PTN di provinsi tersebut.

Tabel 4.47
Kesetaraan Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	PG APK	IPG APK	% S-Swt	Nilai
1	DKI Jakarta	84,44	87,89	74,15	82,16
2	Jawa Barat	96,79	80,88	100,00	92,56
3	Banten	98,45	86,52	100,00	94,99
4	Jawa Tengah	97,39	84,36	100,00	93,92
5	DI Yogyakarta	98,56	98,12	100,00	98,89
6	Jawa Timur	96,71	87,18	100,00	94,63
7	Aceh	94,79	86,77	100,00	93,85
8	Sumatera Utara	95,86	87,87	100,00	94,58
9	Sumatera Barat	94,90	88,16	88,03	90,36
10	Riau	96,84	85,15	100,00	93,99
11	Kepulauan Riau	97,69	81,11	100,00	92,93
12	Jambi	96,38	84,74	100,00	93,71
13	Sumatera Selatan	91,31	64,19	100,00	85,17
14	Bangka Belitung	99,63	89,97	100,00	96,53
15	Bengkulu	92,32	74,78	100,00	89,03
16	Lampung	94,25	68,45	100,00	87,57
17	Kalimantan Barat	99,20	94,15	100,00	97,78
18	Kalimantan Tengah	99,31	94,45	100,00	97,92
19	Kalimantan Selatan	97,79	89,35	100,00	95,71
20	Kalimantan Timur	96,41	85,90	78,46	86,92
21	Sulawesi Utara	96,22	87,89	71,89	85,33
22	Gorontalo	88,19	73,80	76,00	79,33
23	Sulawesi Tengah	98,34	93,66	100,00	97,33
24	Sulawesi Selatan	96,17	91,66	100,00	95,94
25	Sulawesi Barat	98,70	82,80	100,00	93,83
26	Sulawesi Tenggara	98,73	95,39	100,00	98,04
27	Maluku	99,51	98,84	78,30	92,22
28	Maluku Utara	99,00	96,62	100,00	98,54
29	Bali	95,04	83,10	97,46	91,86
30	NTB	90,62	73,70	100,00	88,11
31	NTT	99,33	96,81	100,00	98,72
32	Papua	91,14	62,35	95,92	83,14
33	Papua Barat	89,69	73,97	100,00	87,89
	Indonesia	98,49	94,59	100,00	97,69

Tabel 4.47 merupakan tiga indikator kesetaraan memperoleh layanan pendidikan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai kesetaraan PT. Pada tingkat nasional, PG APK menjadi 98,49, IPG APK menjadi 94,59, dan % S-Swt menjadi 100,00 sehingga nilai kesetaraan memperoleh layanan pendidikan PT adalah 97,69. Hal ini berarti kesetaraan memperoleh layanan

pendidikan di PT tercapai sekitar 98% sedangkan tertinggi terjadi di DI Yogyakarta (98,89) dan terendah terjadi di Gorontalo (79,33).

Berdasarkan standar ideal, 22 provinsi (66,67%) termasuk paripurna (91-100), 10 provinsi (30,30%) termasuk utama (81-90), dan 1 provinsi (3,03%) termasuk madya (76-80). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal kesetaraan memperoleh layanan pendidikan di PT sebesar 97,69 termasuk paripurna.

6. Semua Jenjang

Pada Tabel 4.48 menunjukkan bahwa kesetaraan memperoleh layanan pendidikan untuk lima jenjang pendidikan sebesar 99,15 dengan nilai kesetaraan terbesar (99,85) pada jenjang SD dan terkecil (97,69) pada jenjang PT.

Tabel 4.48
Kinerja Kesetaraan Layanan Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TK	SD	SMP	SM	PT	Rata-rata
1	DKI Jakarta	95,97	99,93	96,38	97,53	82,16	94,39
2	Jawa Barat	98,47	86,07	98,37	99,64	92,56	95,02
3	Banten	98,06	95,19	99,06	96,37	94,99	96,73
4	Jawa Tengah	98,62	82,92	93,98	97,63	93,92	93,41
5	DI Yogyakarta	95,17	99,50	98,56	98,13	98,89	98,05
6	Jawa Timur	97,76	89,15	99,29	96,97	94,63	95,56
7	Aceh	93,63	77,14	78,27	74,21	93,85	83,42
8	Sumatera Utara	95,92	99,98	99,35	98,63	94,58	97,69
9	Sumatera Barat	97,49	79,95	77,28	78,08	90,36	84,63
10	R i a u	96,07	99,21	86,87	85,83	93,99	92,39
11	Kepulauan Riau	96,47	98,23	91,59	82,46	92,93	92,34
12	J a m b i	92,75	78,50	78,11	79,66	93,71	84,55
13	Sumatera Selatan	96,41	81,35	93,57	95,30	85,17	90,36
14	Bangka Belitung	92,55	88,82	86,06	83,82	96,53	89,56
15	Bengkulu	94,03	75,87	68,53	70,13	89,03	79,52
16	Lampung	97,92	83,12	98,57	92,79	87,57	91,99
17	Kalimantan Barat	95,86	89,51	94,89	89,59	97,78	93,53
18	Kalimantan Tengah	95,97	93,13	79,56	78,06	97,92	88,93
19	Kalimantan Selatan	97,43	83,69	79,16	83,50	95,71	87,90
20	Kalimantan Timur	98,03	99,77	89,69	88,80	86,92	92,64
21	Sulawesi Utara	90,93	99,45	99,92	87,90	85,33	92,71
22	Gorontalo	98,12	70,59	69,16	72,47	79,33	77,93
23	Sulawesi Tengah	95,77	88,15	75,95	79,18	97,33	87,28
24	Sulawesi Selatan	98,59	79,72	82,53	84,22	95,94	88,20
25	Sulawesi Barat	96,78	70,08	79,39	80,42	93,83	84,10
26	Sulawesi Tenggara	96,86	70,42	70,74	69,92	98,04	81,20
27	Maluku	97,41	97,72	95,02	81,98	92,22	92,87
28	Maluku Utara	94,81	98,91	95,01	83,36	98,54	94,13
29	B a l i	97,15	92,84	99,24	93,06	91,86	94,83
30	NTB	97,84	72,16	76,96	73,38	88,11	81,69
31	NTT	95,34	99,76	98,48	86,42	98,72	95,74
32	Papua	94,40	99,76	98,55	87,44	83,14	92,65
33	Papua Barat	98,41	98,77	97,00	86,83	87,89	93,78
	Indonesia	99,09	99,85	99,81	99,33	97,69	99,15

Bila kesetaraan memperoleh layanan pendidikan dibandingkan antarjenjang pendidikan TK, SD, SMP, SM, dan PT maka akan diperoleh provinsi mana yang memiliki layanan pendidikan yang paling setara. Pada Tabel 4.48 juga menunjukkan bahwa kesetaraan provinsi untuk lima jenjang pendidikan dengan nilai nasional sebesar 99,15, nilai tertinggi terjadi di DI Yogyakarta (98,05) dan terendah terjadi di Gorontalo (77,93). Hal ini berarti kesetaraan memperoleh layanan pendidikan nasional tercapai 99%.

Berdasarkan standar ideal maka terdapat 19 provinsi (57,58%) termasuk paripurna (91-100), 12 provinsi (36,36%) termasuk utama (81-90), dan 2 provinsi (6,06%) termasuk madya (76-80) dalam kesetaraan memperoleh layanan pendidikan. Dengan demikian, kesetaraan layanan pendidikan nasional sebesar 99,15 termasuk paripurna.

E. Misi K-5: Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan.

Misi K-5 kepastian memperoleh layanan pendidikan menggunakan empat indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui kinerja kepastian memperoleh layanan pendidikan. Tabel 4.49 menunjukkan perbandingan keempat indikator kepastian layanan pendidikan antara lima jenjang pendidikan. APM SD sebesar 95,55%, APK SMP sebesar 99,47%, SM sebesar 76,40%, dan PT sebesar 27,10% sedangkan TK sebesar 35,98% dikarenakan belum merupakan prasyarat untuk masuk SD. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi jenjang pendidikan APK makin rendah dan makin sedikit siswa yang berada di sekolah yang sesuai.

Tabel 4.49
Perbandingan Indikator Kepastian Layanan Pendidikan
Tahun 2011/2012

No.	Jenis Indikator	Standar Ideal	Angka Nasional				
			TK	SD	SMP	SM	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	APK/APM	35/115/100/100/100	35.98	95.55	99.47	76.40	27.10
2.	AMK/AM	27/55/100/100/100/100	31.40	60.19	81.78	93.17	48.41
3.	AB5 SD/AB	94/100/100	-	96.43	97.68	96.58	-
4.	RLB	6/3/3	-	6.18	3.01	3.01	-

Catatan: APM untuk SD, AMK untuk TK dan SD, AB 5 SD untuk SD

Hal yang sebaliknya untuk AMK/AM ternyata makin tinggi jenjang pendidikan juga makin besar kecuali PT ditandai dengan AM terbesar pada SM sebesar 93,17, SMP sebesar 81,78, SD sebesar 60,19, sedangkan PT sebesar 48,41, dan yang terkecil TK sebesar 31,40.

Dalam hal AB pada tiga jenjang pendidikan, ternyata AB 5 SD pada SD sebesar 96,43 yang terkecil dan terbesar pada SMP sebesar 97,68. Hal ini

berarti, siswa SD yang berhenti setelah mencapai tingkat V sebesar 3,57%, sedangkan siswa SM yang berhenti setelah mencapai tingkat XII sebesar 3,42% dan siswa SMP yang berhenti setelah mencapai tingkat IX sebesar 2,32%. Hal ini juga menunjukkan bahwa di semua jenjang (SD, SMP dan SM) masih terdapat siswa yang tidak lulus atau keluar dari sekolah tanpa mendapatkan tanda tamat belajar.

Indikator lainnya khusus SD, SMP dan SM, yaitu RLB (rata-rata lama belajar) ternyata SD yang paling rendah (6,18), sedangkan SMP dan SM mempunyai nilai yang sama (3,01). Besarnya RLB SD karena masih banyak anak yang menyelesaikan sekolah lebih dari 6 tahun karena pernah mengalami tidak naik kelas atau mengulang.

1. Taman Kanak-kanak (TK)

Hasil analisis dua indikator kepastian memperoleh layanan pendidikan TK tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.50. APK TK berkisar antara 13,15 terendah (Kalimantan Barat) sampai 92,98 tertinggi (DI Yogyakarta) dengan angka nasional sebesar 35,98. Dengan demikian, anak usia TK (4-6) yang bersekolah di TK masih rendah atau baru mencapai sekitar 36% dari idealnya sekitar 100% karena terdapat anak usia 6 tahun yang sudah bersekolah di SD. Kisaran yang lebar ini mengindikasikan variasi yang tinggi antarprovinsi. Terdapat 5 provinsi (15,15%) yang memiliki APK lebih dari 50,00. Kecilnya APK TK karena belum merupakan syarat untuk masuk SD.

Tabel 4.50
Indikator Kepastian Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	APK	AMK	No.	Provinsi	APK	AMK
1	DKI Jakarta	35,65	28,00	18	Kalimantan Tengah	43,12	44,00
2	Jawa Barat	21,85	15,08	19	Kalimantan Selatan	51,47	55,76
3	Banten	21,48	15,10	20	Kalimantan Timur	34,04	37,34
4	Jawa Tengah	49,96	41,04	21	Sulawesi Utara	60,59	59,11
5	DI Yogyakarta	92,98	90,78	22	Gorontalo	62,86	68,70
6	Jawa Timur	72,69	59,47	23	Sulawesi Tengah	40,66	40,63
7	Aceh	31,62	29,95	24	Sulawesi Selatan	35,44	37,47
8	Sumatera Utara	20,04	13,55	25	Sulawesi Barat	46,35	45,76
9	Sumatera Barat	36,47	37,27	26	Sulawesi Tenggara	38,07	43,42
10	Riau	24,17	24,45	27	Maluku	21,72	21,59
11	Kepulauan Riau	25,45	27,28	28	Maluku Utara	21,37	21,01
12	Jambi	31,91	28,70	29	Bali	48,28	46,59
13	Sumatera Selatan	16,55	15,76	30	NTB	26,52	21,91
14	Bangka Belitung	39,77	40,19	31	NTT	16,48	17,57
15	Bengkulu	28,62	29,69	32	Papua	18,61	18,53
16	Lampung	29,13	27,32	33	Papua Barat	16,13	16,42
17	Kalimantan Barat	13,15	13,29		Indonesia	35,98	31,40

Perbandingan APK TK provinsi dengan norma nasional menunjukkan bahwa terdapat 13 provinsi (39,39%) yang memiliki APK lebih tinggi atau sama dengan nasional. Sebanyak 20 provinsi lainnya (60,61%) memiliki APK lebih kecil dengan nasional.

AMK TK berkisar antara 13,29% terendah (Kalimantan Barat) sampai 90,78% tertinggi (DI Yogyakarta) dengan angka nasional sebesar 31,40%. Dengan demikian, secara nasional anak usia masuk TK (4-5 tahun) yang telah bersekolah di TK masih sangat kecil karena kurang dari 50% akibat adanya anak yang bersekolah di PAUD nonformal. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 15 provinsi (45,45%) yang memiliki AMK TK di atas angka nasional, sedangkan 18 provinsi (54,55%) memiliki AMK lebih kecil dari angka nasional. Sejalan dengan rendahnya AMK TK, kondisi ini menunjukkan bahwa anak usia masuk TK yang telah bersekolah di TK di setiap provinsi relatif kecil karena TK belum merupakan syarat untuk masuk SD.

Tabel 4.51 merupakan dua jenis indikator kepastian mendapatkan layanan pendidikan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai. Pada tingkat nasional, APK menjadi 100,00 dan AMK menjadi 100,00 sehingga nilai kepastian mendapatkan layanan pendidikan secara nasional menjadi 100,00. Hal ini berarti kepastian mendapatkan layanan pendidikan TK sekitar 100% dengan nilai kualitas tertinggi terjadi di DKI Jakarta (100,00) dan terendah terjadi di Kalimantan Barat (43,06).

Tabel 4.51
Kepastian Layanan Pendidikan TK Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	APK	AMK	Nilai	No.	Provinsi	APK	AMK	Nilai
1	DKI Jakarta	100.00	100.00	100.00	18	Kalimantan Tengah	100.00	100.00	100.00
2	Jawa Barat	61.48	55.69	58.59	19	Kalimantan Selatan	100.00	100.00	100.00
3	Banten	60.44	55.77	58.10	20	Kalimantan Timur	95.79	100.00	97.89
4	Jawa Tengah	100.00	100.00	100.00	21	Sulawesi Utara	100.00	100.00	100.00
5	DI Yogyakarta	100.00	100.00	100.00	22	Gorontalo	100.00	100.00	100.00
6	Jawa Timur	100.00	100.00	100.00	23	Sulawesi Tengah	100.00	100.00	100.00
7	Aceh	88.98	100.00	94.49	24	Sulawesi Selatan	99.72	100.00	99.86
8	Sumatera Utara	56.40	50.05	53.22	25	Sulawesi Barat	100.00	100.00	100.00
9	Sumatera Barat	100.00	100.00	100.00	26	Sulawesi Tenggara	100.00	100.00	100.00
10	Riau	68.00	90.32	79.16	27	Maluku	61.12	79.76	70.44
11	Kepulauan Riau	71.61	100.00	85.80	28	Maluku Utara	60.13	77.62	68.88
12	Jambi	89.79	100.00	94.90	29	Bali	100.00	100.00	100.00
13	Sumatera Selatan	46.57	58.22	52.39	30	NTB	74.62	80.94	77.78
14	Bangka Belitung	100.00	100.00	100.00	31	NTT	46.38	64.92	55.65
15	Bengkulu	80.52	100.00	90.26	32	Papua	52.36	68.47	60.41
16	Lampung	81.96	100.00	90.98	33	Papua Barat	45.38	60.67	53.03
17	Kalimantan Barat	37.01	49.11	43.06		Indonesia	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan standar ideal, terdapat 18 provinsi (54,55%) termasuk paripurna (91-100), 3 provinsi (9,09%) termasuk utama (81-90), 2 provinsi (6,06%) termasuk madya (76-80), dan 10 provinsi (30,30%) termasuk kurang (≤ 70). Dengan demikian, kepastian mendapatkan layanan pendidikan TK Sebesar 100 termasuk kategori paripurna.

2. Sekolah Dasar (SD)

Hasil analisis empat indikator kepastian memperoleh layanan pendidikan SD tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.52. APM SD berkisar antara 89,53 terendah (Papua Barat) sampai 98,56 tertinggi (Bali) dengan angka nasional sebesar 95,55. Dengan demikian, anak usia SD yang telah bersekolah di SD sangat tinggi mencapai 95,55% dari idealnya sebesar 100%. Perbandingan APM SD tiap provinsi dengan norma nasional menunjukkan bahwa terdapat 18 provinsi (54,55%) yang memiliki APM lebih tinggi dari nasional, sedangkan 15 provinsi lainnya (45,45%) memiliki APM lebih kecil dengan nasional.

Tabel 4.52
Indikator Kepastian Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	APM	AMK	AB	RLB
1	DKI Jakarta	98.01	60.43	97.78	6.08
2	Jawa Barat	96.97	63.39	96.22	6.07
3	Banten	96.22	50.75	95.29	6.13
4	Jawa Tengah	96.15	59.34	97.66	6.20
5	DI Yogyakarta	97.52	63.24	98.44	6.14
6	Jawa Timur	95.95	57.34	97.69	6.14
7	Aceh	89.54	53.69	96.25	6.19
8	Sumatera Utara	94.61	63.25	96.02	6.12
9	Sumatera Barat	97.34	64.11	97.48	6.34
10	Riau	94.01	52.79	97.19	6.12
11	Kepulauan Riau	97.47	58.14	94.44	6.23
12	Jambi	95.59	61.74	95.41	6.23
13	Sumatera Selatan	93.18	61.32	96.02	6.16
14	Bangka Belitung	98.46	62.81	94.09	6.49
15	Bengkulu	97.18	62.75	95.24	6.25
16	Lampung	95.38	60.54	96.82	6.14
17	Kalimantan Barat	93.18	63.97	97.44	6.45
18	Kalimantan Tengah	96.83	63.46	96.04	6.24
19	Kalimantan Selatan	95.61	54.08	96.92	6.31
20	Kalimantan Timur	97.27	64.05	93.88	6.22
21	Sulawesi Utara	95.37	69.82	96.30	6.15
22	Gorontalo	93.73	64.19	95.41	6.42
23	Sulawesi Tengah	95.25	57.80	97.95	6.34
24	Sulawesi Selatan	95.77	63.91	97.91	6.21
25	Sulawesi Barat	90.63	60.83	96.59	6.25
26	Sulawesi Tenggara	96.19	61.77	96.32	6.24
27	Maluku	91.39	68.49	95.82	6.06
28	Maluku Utara	97.62	74.90	94.89	6.15
29	Bali	98.56	67.56	98.01	6.12
30	NTB	92.37	52.20	97.98	6.20
31	NTT	93.45	61.34	97.26	6.44
32	Papua	90.89	56.82	95.92	6.27
33	Papua Barat	89.53	41.87	95.99	6.36
	Indonesia	95.55	60.19	96.43	6.18

AMK SD berkisar antara 41,87% terendah (Papua Barat) sampai 74,90% tertinggi (Maluku Utara) dengan angka nasional sebesar 60,19%. Dengan demikian, secara nasional anak usia masuk SD (7 tahun) yang telah bersekolah di SD cukup tinggi (60,19%). Hal ini bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 11 provinsi (33,33%) yang memiliki AMK SD di bawah angka nasional, sedangkan 22 provinsi (66,67%) memiliki AMK lebih besar dari angka nasional. Sejalan dengan rendahnya AMK SD, kondisi ini menunjukkan bahwa banyak anak usia di bawah 7 tahun yang telah bersekolah di SD.

AB5 SD berkisar antara 93,88% terendah (Kalimantan Timur) sampai 98,44 tertinggi (DI Yogyakarta) dengan angka nasional sebesar 96,43%. Dengan demikian, terdapat sekitar 4% yang keluar dari SD setelah tingkat V SD. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 15 provinsi (45,45%) memiliki AB5 SD di atas angka nasional berarti lebih baik, sedangkan 18 provinsi lainnya (54,55%) memiliki AB5 SD lebih rendah dari nasional.

Tabel 4.53
Kepastian Layanan Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	APM	AMK	AB	RLB	Nilai
1	DKI Jakarta	85,23	100,00	100,00	98,76	96,00
2	Jawa Barat	84,33	100,00	100,00	98,93	95,81
3	Banten	83,67	92,27	100,00	97,84	93,45
4	Jawa Tengah	83,61	100,00	100,00	96,85	95,11
5	DI Yogyakarta	84,80	100,00	100,00	97,67	95,62
6	Jawa Timur	83,43	100,00	100,00	97,72	95,29
7	Aceh	77,86	97,62	100,00	97,00	93,12
8	Sumatera Utara	82,27	100,00	100,00	98,07	95,09
9	Sumatera Barat	84,65	100,00	100,00	94,62	94,82
10	R i a u	81,75	95,98	100,00	98,11	93,96
11	Kepulauan Riau	84,76	100,00	100,00	96,25	95,25
12	J a m b i	83,12	100,00	100,00	96,28	94,85
13	Sumatera Selatan	81,03	100,00	100,00	97,33	94,59
14	Bangka Belitung	85,62	100,00	100,00	92,48	94,52
15	Bengkulu	84,50	100,00	100,00	96,03	95,13
16	Lampung	82,94	100,00	100,00	97,79	95,18
17	Kalimantan Barat	81,02	100,00	100,00	93,00	93,51
18	Kalimantan Tengah	84,20	100,00	100,00	96,08	95,07
19	Kalimantan Selatan	83,14	98,33	100,00	95,06	94,13
20	Kalimantan Timur	84,58	100,00	93,88	96,47	93,73
21	Sulawesi Utara	82,93	100,00	100,00	97,50	95,11
22	Gorontalo	81,50	100,00	100,00	93,44	93,74
23	Sulawesi Tengah	82,83	100,00	100,00	94,65	94,37
24	Sulawesi Selatan	83,28	100,00	100,00	96,55	94,96
25	Sulawesi Barat	78,81	100,00	100,00	95,95	93,69
26	Sulawesi Tenggara	83,64	100,00	100,00	96,16	94,95
27	Maluku	79,47	100,00	100,00	98,96	94,61
28	Maluku Utara	84,88	100,00	100,00	97,50	95,60
29	B a l i	85,71	100,00	100,00	98,06	95,94
30	NTB	80,32	94,91	100,00	96,79	93,01
31	NTT	81,26	100,00	100,00	93,22	93,62
32	Papua	79,04	100,00	100,00	95,70	93,68
33	Papua Barat	77,85	76,13	100,00	94,37	87,09
	Indonesia	83,09	100,00	100,00	97,16	95,06

RLB SD berkisar antara 6,06 terjadi di Jawa Barat (terbaik) sampai 6,49 tertinggi di Bangka Belitung (terburuk) dengan angka nasional sebesar 6,18. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang menyelesaikan pendidikan di SD lebih dari 6 tahun karena adanya siswa yang mengulang. Apabila dibandingkan dengan angka nasional, terdapat 13 provinsi (39,39%) memiliki RLB di bawah nasional yang berarti lebih baik. Sisanya, sebanyak 20 provinsi lainnya (60,61%) memiliki RLB di atas nasional yang berarti lebih buruk.

Tabel 4.53 merupakan empat jenis indikator kepastian mendapatkan layanan pendidikan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai. Pada tingkat nasional, APM menjadi 83,09, AMK menjadi 100,00, AB5 SD menjadi 100,00 dan RLB menjadi 97,16 sehingga nilai kepastian mendapatkan layanan pendidikan sebesar 95,06. Hal ini berarti kepastian mendapatkan layanan pendidikan SD sekitar 95% dengan nilai kepastian mendapatkan layanan pendidikan tertinggi terjadi di DKI Jakarta (96,00) dan terendah terjadi di Papua Barat (87,09).

Berdasarkan standar ideal maka 32 provinsi (96,97%) termasuk paripurna (91-100) dan 1 provinsi (3,03%) termasuk utama (81-90) dalam kepastian memperoleh layanan pendidikan di SD. Dengan demikian, kepastian SD termasuk paripurna dan ditandai oleh persentase yang paling besar pada nilai dan 91-100.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Hasil analisis empat indikator kepastian memperoleh layanan pendidikan SMP tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.54. APK SMP berkisar antara 80,52% terendah (Papua Barat) sampai 118,73% tertinggi (DI Yogyakarta) dengan angka nasional sebesar 99,47%. Dengan demikian, adanya APK lebih dari 100,00 dikarenakan terdapat anak di luar usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP. Perbandingan APK SMP tiap provinsi dengan norma nasional menunjukkan bahwa terdapat 17 provinsi (51,52%) yang memiliki APK lebih rendah dari nasional dan 16 provinsi lainnya (48,48%) memiliki APK lebih tinggi dengan nasional, sedangkan 15 provinsi (45,45%) memiliki APK dengan nilai lebih dari 100,00%.

AM SMP berkisar antara 68,59% terendah (Kalimantan Selatan) sampai 104,06% tertinggi (DI Yogyakarta) dengan angka nasional sebesar 81,78%. Dengan demikian, secara nasional lulusan SD yang melanjutkan ke SMP baru mencapai 81,78% yang berarti masih terdapat 18,22% lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP. Hal ini bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 13 provinsi (39,39%) yang memiliki AM SMP di bawah angka nasional, sedangkan 20 provinsi (60,61%) memiliki AM lebih besar dari angka nasional.

Tabel 4.54
Indikator Kepastian Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	APK	AM	AB	RLB
1	DKI Jakarta	117,54	96,82	91,10	3,01
2	Jawa Barat	94,55	77,56	99,72	3,27
3	Banten	95,66	72,48	94,85	3,01
4	Jawa Tengah	100,43	83,40	86,92	3,00
5	DI Yogyakarta	118,73	104,06	85,58	3,01
6	Jawa Timur	107,18	82,31	98,39	3,00
7	Aceh	107,59	90,05	90,70	3,02
8	Sumatera Utara	102,41	82,74	87,61	3,01
9	Sumatera Barat	111,22	79,34	81,62	3,01
10	Riau	105,38	76,19	99,65	3,41
11	Kepulauan Riau	110,87	99,82	99,22	3,02
12	Jambi	101,25	70,60	96,71	3,02
13	Sumatera Selatan	93,82	86,03	99,87	3,27
14	Bangka Belitung	98,57	94,02	99,38	3,03
15	Bengkulu	100,67	82,60	98,12	3,02
16	Lampung	94,92	72,37	95,36	3,01
17	Kalimantan Barat	86,94	80,17	99,64	3,01
18	Kalimantan Tengah	87,34	78,00	91,74	3,01
19	Kalimantan Selatan	89,43	68,59	92,43	3,01
20	Kalimantan Timur	97,59	98,91	99,42	3,28
21	Sulawesi Utara	99,63	98,91	82,89	3,01
22	Gorontalo	90,87	86,06	98,55	3,04
23	Sulawesi Tengah	90,80	71,58	99,65	3,93
24	Sulawesi Selatan	98,96	82,71	99,42	3,77
25	Sulawesi Barat	94,36	83,93	99,71	4,17
26	Sulawesi Tenggara	100,57	80,73	99,00	3,02
27	Maluku	102,40	80,28	97,37	3,02
28	Maluku Utara	98,06	82,37	99,78	4,39
29	Bali	109,99	98,15	99,60	3,24
30	NTB	103,84	71,32	99,87	3,18
31	NTT	82,74	83,05	99,74	4,49
32	Papua	81,56	96,22	99,59	3,07
33	Papua Barat	80,52	99,77	99,60	3,02
	Indonesia	99,47	81,78	97,68	3,01

AB SMP berkisar antara 81,62% terendah (Sumatera Barat) sampai 99,87% tertinggi (NTB) dengan angka nasional sebesar 97,68%. Dengan demikian, terdapat kurang dari 3% siswa SMP tidak bertahan sampai tingkat IX. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 20 provinsi (60,61%) memiliki AB di atas angka nasional, sedangkan 13 provinsi lainnya (39,39%) memiliki AB lebih rendah dari nasional.

RLB SMP berkisar antara 3,00 yang berarti tidak ada siswa yang mengulang terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah (terbaik) sampai 4,49 tertinggi di NTT (terburuk) dengan angka nasional sebesar 3,01. Hal ini menunjukkan bahwa masih 29 provinsi terdapat siswa yang menyelesaikan pendidikan di SMP lebih dari 3 tahun atau masih ada siswa yang mengulang. Apabila dibandingkan dengan angka nasional, terdapat 12 provinsi (36,36%)

memiliki RLB sama atau di bawah nasional yang berarti lebih baik. Sisanya, sebanyak 21 provinsi lainnya (63,64%) memiliki RLB di atas nasional yang berarti lebih buruk.

Tabel 4.55 merupakan empat indikator kepastian mendapatkan layanan pendidikan yang telah dikonversi sehingga menghasilkan nilai kepastian mendapatkan layanan pendidikan SMP. Pada tingkat nasional, APK menjadi 99,47, AM menjadi 81,78, AB menjadi 97,68, dan RLB menjadi 99,74 sehingga nilai kepastian mendapatkan layanan pendidikan menjadi 94,67. Hal ini berarti kepastian mendapatkan layanan pendidikan SMP tercapai 95% dengan nilai tertinggi terjadi di Kepulauan Riau (99,59%) dan terendah terjadi di Nusa Tenggara Timur (83,07).

Tabel 4.55
Kepastian Layanan Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	APK	AM	AB	RLB	Nilai
1	DKI Jakarta	100,00	96,82	91,10	99,73	96,91
2	Jawa Barat	94,55	77,56	99,72	91,67	90,88
3	Banten	95,66	72,48	94,85	99,82	90,70
4	Jawa Tengah	100,00	83,40	86,92	99,85	92,54
5	DI Yogyakarta	100,00	100,00	85,58	99,73	96,33
6	Jawa Timur	100,00	82,31	98,39	99,86	95,14
7	Aceh	100,00	90,05	90,70	99,49	95,06
8	Sumatera Utara	100,00	82,74	87,61	99,80	92,54
9	Sumatera Barat	100,00	79,34	81,62	99,50	90,12
10	R i a u	100,00	76,19	99,65	88,00	90,96
11	Kepulauan Riau	100,00	99,82	99,22	99,31	99,59
12	J a m b i	100,00	70,60	96,71	99,48	91,70
13	Sumatera Selatan	93,82	86,03	99,87	91,76	92,87
14	Bangka Belitung	98,57	94,02	99,38	99,01	97,75
15	Bengkulu	100,00	82,60	98,12	99,28	95,00
16	Lampung	94,92	72,37	95,36	99,73	90,59
17	Kalimantan Barat	86,94	80,17	99,64	99,51	91,56
18	Kalimantan Tengah	87,34	78,00	91,74	99,72	89,20
19	Kalimantan Selatan	89,43	68,59	92,43	99,59	87,51
20	Kalimantan Timur	97,59	98,91	99,42	91,46	96,85
21	Sulawesi Utara	99,63	98,91	82,89	99,73	95,29
22	Gorontalo	90,87	86,06	98,55	98,79	93,57
23	Sulawesi Tengah	90,80	71,58	99,65	76,26	84,57
24	Sulawesi Selatan	98,96	82,71	99,42	79,65	90,19
25	Sulawesi Barat	94,36	83,93	99,71	72,00	87,50
26	Sulawesi Tenggara	100,00	80,73	99,00	99,29	94,76
27	Maluku	100,00	80,28	97,37	99,45	94,27
28	Maluku Utara	98,06	82,37	99,78	68,39	87,15
29	B a l i	100,00	98,15	99,60	92,52	97,57
30	NTB	100,00	71,32	99,87	94,44	91,41
31	NTT	82,74	83,05	99,74	66,76	83,07
32	Papua	81,56	96,22	99,59	97,64	93,75
33	Papua Barat	80,52	99,77	99,60	99,32	94,80
	Indonesia	99,47	81,78	97,68	99,74	94,67

Berdasarkan standar ideal maka dapat dikatakan bahwa 21 provinsi (63,64%) termasuk kriteria paripurna (91-100) dan 12 provinsi (36,36%) termasuk utama (81-90). Dengan demikian, berdasarkan standar ideal kepastian layanan pendidikan di SMP sebesar 94,67 termasuk kategori paripurna.

4. Sekolah Menengah (SM)

Hasil analisis empat indikator kepastian memperoleh layanan pendidikan SM tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.56. APK SM berkisar antara 58,18% terendah (Kalimantan Barat) sampai 106,28% tertinggi (Bali) dengan angka nasional sebesar 76,40%. Dengan demikian, adanya APK lebih dari 100,00% dikarenakan terdapat anak di luar usia 16-18 tahun yang bersekolah di SM. Perbandingan APK SM tiap provinsi dengan norma nasional menunjukkan bahwa terdapat 15 provinsi (45,45%) yang memiliki APK lebih rendah dari nasional dan 18 provinsi lainnya (54,55%) memiliki APK lebih tinggi dengan nasional. Dari yang lebih tinggi nasional terdapat 2 provinsi (6,06%) memiliki APK dengan nilai lebih dari 100,00%.

Tabel 4.56
Indikator Kepastian Layanan Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	APK	AMK	AB	RLB
1	DKI Jakarta	99,09	106,20	93,84	3,01
2	Jawa Barat	67,78	90,10	99,34	3,00
3	Banten	73,11	92,67	97,73	3,00
4	Jawa Tengah	70,97	87,98	98,56	3,01
5	DI Yogyakarta	103,50	105,71	94,40	3,01
6	Jawa Timur	80,18	97,35	99,05	3,01
7	Aceh	96,05	96,51	93,12	3,03
8	Sumatera Utara	83,56	98,99	98,93	3,01
9	Sumatera Barat	76,74	97,58	94,00	3,01
10	Riau	88,27	97,26	94,10	3,01
11	Kepulauan Riau	75,53	94,26	95,13	3,01
12	Jambi	75,35	96,09	94,26	3,01
13	Sumatera Selatan	75,91	87,10	96,14	3,01
14	Bangka Belitung	82,96	95,70	89,10	3,02
15	Bengkulu	88,96	88,57	90,66	3,01
16	Lampung	63,51	77,68	96,23	3,01
17	Kalimantan Barat	58,18	79,80	94,57	3,02
18	Kalimantan Tengah	73,21	93,44	92,26	3,01
19	Kalimantan Selatan	62,19	98,90	91,99	3,01
20	Kalimantan Timur	82,22	97,07	93,62	3,01
21	Sulawesi Utara	92,07	96,07	92,13	3,01
22	Gorontalo	71,82	97,98	92,07	3,01
23	Sulawesi Tengah	66,64	97,60	90,26	3,02
24	Sulawesi Selatan	78,40	96,84	96,54	3,01
25	Sulawesi Barat	84,14	95,92	94,15	3,01
26	Sulawesi Tenggara	93,28	89,80	92,31	3,01
27	Maluku	93,86	93,63	93,49	3,01
28	Maluku Utara	99,03	97,69	90,52	3,02
29	Bali	106,28	92,11	96,66	3,00
30	NTB	78,44	96,65	95,12	3,01
31	NTT	61,80	91,24	92,81	3,02
32	Papua	66,76	90,67	91,14	3,04
33	Papua Barat	58,37	85,81	88,52	3,03
	Indonesia	76,40	93,17	96,58	3,01

AM SM berkisar antara 77,68% terendah (Lampung) sampai 106,20% tertinggi (DKI Jakarta) dengan angka nasional sebesar 93,17%. Dengan demikian, secara nasional lulusan SMP yang melanjutkan ke SM mencapai 93,17% yang berarti masih terdapat 6,83% lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SM. Hal ini bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 12 provinsi (36,36%) yang memiliki AM SM di bawah angka nasional, sedangkan 21 provinsi (63,64%) memiliki AM lebih besar dari angka nasional.

AB SM berkisar antara 88,52% terendah (Papua Barat) sampai 99,34% tertinggi (Jawa Barat) dengan angka nasional sebesar 96,58%. Dengan demikian, terdapat kurang dari 4% siswa SM yang tidak bertahan sampai tingkat XII. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 27 provinsi (81,82%) memiliki AB di bawah angka nasional, sedangkan 6 provinsi lainnya (18,18%) memiliki AB lebih tinggi dari nasional.

RLB SM berkisar antara 3,00 yang berarti tidak ada siswa yang mengulang terjadi di Bali, Banten, Jawa Barat (terbaik) sampai 3,04 tertinggi di Papua (terburuk) dengan angka nasional sebesar 3,01. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 30 provinsi (90,90%) terdapat siswa yang menyelesaikan pendidikan di SM lebih dari 3 tahun karena ada siswa yang mengulang. Apabila dibandingkan dengan angka nasional, terdapat 25 provinsi (75,76%) memiliki RLB sama atau di bawah nasional yang berarti lebih baik. Sisanya, sebanyak 8 provinsi lainnya (24,24%) memiliki RLB di atas nasional yang berarti lebih buruk.

AM SM berkisar antara 77,68% terendah (Lampung) sampai 106,20% tertinggi (DKI Jakarta) dengan angka nasional sebesar 93,17%. Dengan demikian, secara nasional lulusan SMP yang melanjutkan ke SM mencapai 93,17% yang berarti masih terdapat 6,83% lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SM. Hal ini bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 12 provinsi (36,36%) yang memiliki AM SM di bawah angka nasional, sedangkan 21 provinsi (63,64%) memiliki AM lebih besar dari angka nasional.

AB SM berkisar antara 88,52% terendah (Papua Barat) sampai 99,34% tertinggi (Jawa Barat) dengan angka nasional sebesar 96,58%. Dengan demikian, terdapat kurang dari 4% siswa SM yang tidak bertahan sampai tingkat XII. Bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 27 provinsi (81,82%) memiliki AB di bawah angka nasional, sedangkan 6 provinsi lainnya (18,18%) memiliki AB lebih tinggi dari nasional.

RLB SM berkisar antara 3,00 yang berarti tidak ada siswa yang mengulang terjadi di Bali, Banten, Jawa Barat (terbaik) sampai 3,04 tertinggi di Papua (terburuk) dengan angka nasional sebesar 3,01. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 30 provinsi (90,90%) terdapat siswa yang menyelesaikan pendidikan di SM lebih dari 3 tahun karena ada siswa

yang mengulang. Apabila dibandingkan dengan angka nasional, terdapat 25 provinsi (75,76%) memiliki RLB sama atau di bawah nasional yang berarti lebih baik. Sisanya, sebanyak 8 provinsi lainnya (24,24%) memiliki RLB di atas nasional yang berarti lebih buruk.

Tabel 4.57 merupakan empat indikator kepastian mendapatkan layanan pendidikan yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai. Pada tingkat nasional, APK menjadi 76,40, AM menjadi 93,17, AB menjadi 96,58, dan RLB menjadi 99,70 sehingga nilai kepastian mendapatkan layanan pendidikan menjadi 91,46. Hal ini berarti kepastian mendapatkan layanan pendidikan SM tercapai 91% dengan nilai terjadi di DI Yogyakarta (98,52) dan terendah terjadi di Papua Barat (82,94).

Tabel 4.57
Kepastian Layanan Pendidikan Tiap SM Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	APK	AM	AB	RLB	Nilai
1	DKI Jakarta	99,09	100,00	93,84	99,73	98,16
2	Jawa Barat	67,78	90,10	99,34	99,85	89,27
3	Banten	73,11	92,67	97,73	99,87	90,85
4	Jawa Tengah	70,97	87,98	98,56	99,78	89,32
5	DI Yogyakarta	100,00	100,00	94,40	99,70	98,52
6	Jawa Timur	80,18	97,35	99,05	99,78	94,09
7	Aceh	96,05	96,51	93,12	99,06	96,18
8	Sumatera Utara	83,56	98,99	98,93	99,82	95,33
9	Sumatera Barat	76,74	97,58	94,00	99,54	91,97
10	R i a u	88,27	97,26	94,10	99,65	94,82
11	Kepulauan Riau	75,53	94,26	95,13	99,56	91,12
12	J a m b i	75,35	96,09	94,26	99,71	91,35
13	Sumatera Selatan	75,91	87,10	96,14	99,79	89,73
14	Bangka Belitung	82,96	95,70	89,10	99,29	91,76
15	Bengkulu	88,96	88,57	90,66	99,72	91,98
16	Lampung	63,51	77,68	96,23	99,76	84,30
17	Kalimantan Barat	58,18	79,80	94,57	99,35	82,98
18	Kalimantan Tengah	73,21	93,44	92,26	99,69	89,65
19	Kalimantan Selatan	62,19	98,90	91,99	99,52	88,15
20	Kalimantan Timur	82,22	97,07	93,62	99,57	93,12
21	Sulawesi Utara	92,07	96,07	92,13	99,78	95,01
22	Gorontalo	71,82	97,98	92,07	99,61	90,37
23	Sulawesi Tengah	66,64	97,60	90,26	99,24	88,43
24	Sulawesi Selatan	78,40	96,84	96,54	99,61	92,85
25	Sulawesi Barat	84,14	95,92	94,15	99,66	93,47
26	Sulawesi Tenggara	93,28	89,80	92,31	99,57	93,74
27	Maluku	93,86	93,63	93,49	99,60	95,15
28	Maluku Utara	99,03	97,69	90,52	99,32	96,64
29	B a l i	100,00	92,11	96,66	99,92	97,17
30	NTB	78,44	96,65	95,12	99,54	92,44
31	NTT	61,80	91,24	92,81	99,18	86,26
32	Papua	66,76	90,67	91,14	98,53	86,78
33	Papua Barat	58,37	85,81	88,52	99,05	82,94
	Indonesia	76,40	93,17	96,58	99,70	91,46

Berdasarkan standar ideal, sebanyak 20 provinsi (60,61%) termasuk kriteria paripurna (91-100) dan 13 provinsi (39,39%) termasuk kriteria utama (81-90) dalam memperoleh kepastian layanan pendidikan. Dengan demikian, berdasarkan standar ideal kepastian memperoleh layanan pendidikan di SM sebesar 91,46 termasuk kategori paripurna.

5. Perguruan Tinggi (PT)

Hasil analisis dua indikator kepastian memperoleh layanan pendidikan PT tiap provinsi disajikan pada Tabel 4.58. APK PT berkisar antara 3,55% terendah (Bangka Belitung) sampai 120,84% tertinggi (DKI Jakarta) dengan angka nasional sebesar 27,10%. Dengan demikian, adanya APK PT lebih dari 100,00 yaitu DKI Jakarta, dikarenakan DKI Jakarta merupakan tujuan lulusan SM untuk melanjutkan belajar di PT dan karena banyaknya PT di DKI Jakarta. Perbandingan APK PT tiap provinsi dengan norma nasional menunjukkan bahwa terdapat 21 provinsi (63,64%) yang memiliki APK lebih rendah dari nasional dan 12 provinsi lainnya (36,36%) memiliki APK lebih tinggi dari nasional.

AM PT berkisar antara 13,52% terendah (Banten) sampai 207,99% tertinggi (DKI Jakarta) dengan angka nasional sebesar 48,41%. Dengan demikian, secara nasional lulusan SM yang melanjutkan ke PT mencapai separuh lulusan SM. Perbedaan AM PT yang cukup jauh ini memperlihatkan bahwa distribusi PT belum merata di tiap provinsi. Hal ini bila dibandingkan antara provinsi, terdapat 26 provinsi (78,79%) yang memiliki AM PT di bawah angka nasional, sedangkan 7 provinsi (21,21%) memiliki AM lebih besar dari angka nasional.

Tabel 4.58
Indikator Kepastian Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	APK	AM	No.	Provinsi	APK	AM
1	DKI Jakarta	120,84	207,99	18	Kalimantan Tengah	12,04	30,64
2	Jawa Barat	15,19	37,58	19	Kalimantan Selatan	19,63	45,31
3	Banten	10,70	13,52	20	Kalimantan Timur	23,61	40,38
4	Jawa Tengah	15,36	29,11	21	Sulawesi Utara	29,33	47,26
5	DI Yogyakarta	75,72	126,73	22	Gorontalo	38,66	86,40
6	Jawa Timur	24,09	42,87	23	Sulawesi Tengah	25,30	36,91
7	Aceh	36,76	50,08	24	Sulawesi Selatan	44,05	51,33
8	Sumatera Utara	32,03	29,66	25	Sulawesi Barat	6,92	22,54
9	Sumatera Barat	40,51	50,67	26	Sulawesi Tenggara	26,98	37,79
10	Riau	19,74	29,60	27	Maluku	42,26	49,87
11	Kepulauan Riau	11,06	40,50	28	Maluku Utara	29,07	36,61
12	Jambi	21,91	33,84	29	Bali	26,89	35,58
13	Sumatera Selatan	19,59	32,37	30	NTB	31,01	33,98
14	Bangka Belitung	3,55	25,94	31	NTT	20,56	28,08
15	Bengkulu	26,53	41,30	32	Papua	19,17	46,82
16	Lampung	15,35	24,68	33	Papua Barat	34,51	44,90
17	Kalimantan Barat	13,20	30,36		Indonesia	27,10	48,41

Tabel 4.59 merupakan dua indikator kepastian mendapatkan layanan pendidikan PT yang telah dikonversi dan menghasilkan nilai. Pada tingkat nasional, APK menjadi 27,10 dan AM sebesar 48,41 sehingga nilai kepastian mendapatkan layanan pendidikan PT adalah 37,76. Hal ini berarti kepastian

mendapatkan layanan pendidikan di PT tercapai sekitar 37% sedangkan nilai tertinggi terjadi di DKI Jakarta (100,00) dan terendah terjadi di Banten (12,11).

Berdasarkan standar ideal maka dapat dikatakan bahwa 1 provinsi (3,03%) termasuk paripurna (91-100), 1 provinsi (3,03%) termasuk utama (81-90), dan 31 provinsi (93,94%) termasuk kategori kurang (≤ 70) dalam kepastian memperoleh layanan pendidikan. Dengan demikian, kepastian memperoleh layanan PT sebesar 37,76 termasuk dalam kondisi kurang.

Tabel 4.59
Kinerja Kepastian Layanan Pendidikan PT Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	APK	AM	Nilai	No.	Provinsi	APK	AM	Nilai
1	DKI Jakarta	100.00	100.00	100.00	18	Kalimantan Tengah	12.04	30.64	21.34
2	Jawa Barat	15.19	37.58	26.38	19	Kalimantan Selatan	19.63	45.31	32.47
3	Banten	10.70	13.52	12.11	20	Kalimantan Timur	23.61	40.38	31.99
4	Jawa Tengah	15.36	29.11	22.24	21	Sulawesi Utara	29.33	47.26	38.30
5	DI Yogyakarta	75.72	100.00	87.86	22	Gorontalo	38.66	86.40	62.53
6	Jawa Timur	24.09	42.87	33.48	23	Sulawesi Tengah	25.30	36.91	31.10
7	Aceh	36.76	50.08	43.42	24	Sulawesi Selatan	44.05	51.33	47.69
8	Sumatera Utara	32.03	29.66	30.84	25	Sulawesi Barat	6.92	22.54	14.73
9	Sumatera Barat	40.51	50.67	45.59	26	Sulawesi Tenggara	26.98	37.79	32.38
10	R i a u	19.74	29.60	24.67	27	Maluku	42.26	49.87	46.06
11	Kepulauan Riau	11.06	40.50	25.78	28	Maluku Utara	29.07	36.61	32.84
12	J a m b i	21.91	33.84	27.87	29	B a l i	26.89	35.58	31.23
13	Sumatera Selatan	19.59	32.37	25.98	30	NTB	31.01	33.98	32.50
14	Bangka Belitung	3.55	25.94	14.74	31	NTT	20.56	28.08	24.32
15	Bengkulu	26.53	41.30	33.91	32	Papua	19.17	46.82	33.00
16	Lampung	15.35	24.68	20.02	33	Papua Barat	34.51	44.90	39.71
17	Kalimantan Barat	13.20	30.36	21.78		Indonesia	27.10	48.41	37.76

6. Semua Jenjang

Tabel 4.60 menunjukkan bahwa kepastian memperoleh layanan pendidikan provinsi untuk lima jenjang pendidikan sebesar 83,79 dengan nilai kepastian terbesar adalah jenjang TK sebesar 100,00 dan terkecil jenjang PT sebesar 37,76. Bila kepastian memperoleh layanan pendidikan dibandingkan antarjenjang pendidikan TK, SD, SMP, SM dan PT maka akan diperoleh provinsi mana yang memiliki kepastian memperoleh layanan pendidikan yang baik. Pada Tabel 4.60 juga menunjukkan bahwa kepastian pendidikan provinsi untuk lima jenjang pendidikan dengan nilai nasional sebesar 83,79, nilai tertinggi terjadi di DKI Jakarta (98,21) dan terendah terjadi di Kalimantan Barat (66,58).

Berdasarkan standar ideal maka terdapat 2 provinsi (6,06%) termasuk paripurna (91-100), 10 provinsi (30,30%) termasuk utama (81-90), 13 provinsi (39,39%) termasuk madya (76-80), 5 provinsi (15,15%) termasuk pratama (71-75), dan 3 provinsi (9,09%) termasuk kurang (≤ 70). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja provinsi tercapai terbesar termasuk madya.

Tabel 4.60
Kinerja Kepastian Layanan Pendidikan Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TK	SD	SMP	SM	PT	Rata-rata
1	DKI Jakarta	100,00	96,00	96,91	98,16	100,00	98,21
2	Jawa Barat	58,59	95,81	90,88	89,27	26,38	72,19
3	Banten	58,10	93,45	90,70	90,85	12,11	69,04
4	Jawa Tengah	100,00	95,11	92,54	89,32	22,24	79,84
5	DI Yogyakarta	100,00	95,62	96,33	98,52	87,86	95,67
6	Jawa Timur	100,00	95,29	95,14	94,09	33,48	83,60
7	Aceh	94,49	93,12	95,06	96,18	43,42	84,45
8	Sumatera Utara	53,22	95,09	92,54	95,33	30,84	73,40
9	Sumatera Barat	100,00	94,82	90,12	91,97	45,59	84,50
10	R i a u	79,16	93,96	90,96	94,82	24,67	76,71
11	Kepulauan Riau	85,80	95,25	99,59	91,12	25,78	79,51
12	J a m b i	94,90	94,85	91,70	91,35	27,87	80,13
13	Sumatera Selatan	52,39	94,59	92,87	89,73	25,98	71,11
14	Bangka Belitung	100,00	94,52	97,75	91,76	14,74	79,76
15	Bengkulu	90,26	95,13	95,00	91,98	33,91	81,26
16	Lampung	90,98	95,18	90,59	84,30	20,02	76,21
17	Kalimantan Barat	43,06	93,51	91,56	82,98	21,78	66,58
18	Kalimantan Tengah	100,00	95,07	89,20	89,65	21,34	79,05
19	Kalimantan Selatan	100,00	94,13	87,51	88,15	32,47	80,45
20	Kalimantan Timur	97,89	93,73	96,85	93,12	31,99	82,72
21	Sulawesi Utara	100,00	95,11	95,29	95,01	38,30	84,74
22	Gorontalo	100,00	93,74	93,57	90,37	62,53	88,04
23	Sulawesi Tengah	100,00	94,37	84,57	88,43	31,10	79,70
24	Sulawesi Selatan	99,86	94,96	90,19	92,85	47,69	85,11
25	Sulawesi Barat	100,00	93,69	87,50	93,47	14,73	77,88
26	Sulawesi Tenggara	100,00	94,95	94,76	93,74	32,38	83,17
27	Maluku	70,44	94,61	94,27	95,15	46,06	80,11
28	Maluku Utara	68,88	95,60	87,15	96,64	32,84	76,22
29	B a l i	100,00	95,94	97,57	97,17	31,23	84,38
30	NTB	77,78	93,01	91,41	92,44	32,50	77,43
31	NTT	55,65	93,62	83,07	86,26	24,32	68,58
32	Papua	60,41	93,68	93,75	86,78	33,00	73,52
33	Papua Barat	53,03	87,09	94,80	82,94	39,71	71,51
	Indonesia	100,00	95,06	94,67	91,46	37,76	83,79

F. Kinerja Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan

Kinerja atau keberhasilan program pembangunan pendidikan umumnya dinilai berdasarkan pengukuran mengenai terserapnya dana yang dialokasikan untuk program pembangunan pendidikan. Cara yang lebih akurat memberikan indikasi tentang keberhasilan program pembangunan pendidikan ialah dengan menggunakan data yang tersedia dikaitkan dengan misi pendidikan 5K.

Dengan menggunakan formula yang sudah ditentukan, kinerja pendidikan dihitung melalui rata-rata dari nilai ketersediaan layanan, keterjangkauan layanan, kualitas layanan, kesetaraan memperoleh layanan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan. Pendidikan TK dikatakan berhasil diukur dengan gabungan 13 indikator, pendidikan SD diukur dengan 18 indikator, pendidikan SMP dan SM diukur dengan 20 indikator sedangkan PT diukur dengan 10 indikator. Selanjutnya, nilai rata-rata tersebut diperbandingkan dengan menggunakan standar ideal.

1. TK

Berdasarkan Tabel 4.61 diperoleh nilai kinerja pendidikan TK secara nasional sebesar 92,07 dengan nilai kepastian yang terbesar sebesar 100,00 dan nilai kualitas terkecil sebesar 64,03. Hal ini berarti kinerja pendidikan TK telah mencapai 92% dengan nilai tertinggi terjadi di DI Yogyakarta (94,34) dan terendah terjadi di Kalimantan Barat (70,64).

Tabel 4.61
Kinerja Pendidikan TK Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	Kinerja					Rata-rata
		Ketersediaan Layanan	Keterjangkauan Layanan	Kualitas/Mutu Layanan	Kesetaraan Memperoleh Layanan	Kepastian Mendapatkan Layanan	
1	DKI Jakarta	99,88	93,62	74,08	95,97	100,00	92,71
2	Jawa Barat	96,97	65,60	64,31	98,47	58,59	76,79
3	Banten	90,05	83,26	65,73	98,06	58,10	79,04
4	Jawa Tengah	97,84	98,44	60,46	98,62	100,00	91,07
5	DI Yogyakarta	99,74	98,36	78,44	95,17	100,00	94,34
6	Jawa Timur	99,88	97,72	65,09	97,76	100,00	92,09
7	Aceh	96,97	82,28	60,00	93,63	94,49	85,47
8	Sumatera Utara	86,71	86,72	68,19	95,92	53,22	78,15
9	Sumatera Barat	99,11	98,83	63,02	97,49	100,00	91,69
10	Riau	86,53	98,55	58,66	96,07	79,16	83,79
11	Kepulauan Riau	97,54	99,59	66,48	96,47	85,80	89,18
12	Jambi	97,93	91,12	63,13	92,75	94,90	87,97
13	Sumatera Selatan	95,27	59,30	62,00	96,41	52,39	73,07
14	Bangka Belitung	97,51	98,47	68,28	92,55	100,00	91,36
15	Bengkulu	90,00	98,42	61,38	94,03	90,26	86,82
16	Lampung	99,94	98,93	60,98	97,92	90,98	89,75
17	Kalimantan Barat	84,23	66,27	63,77	95,86	43,06	70,64
18	Kalimantan Tengah	98,07	98,49	62,14	95,97	100,00	90,93
19	Kalimantan Selatan	91,12	97,93	62,46	97,43	100,00	89,79
20	Kalimantan Timur	99,37	98,91	64,28	98,03	97,89	91,69
21	Sulawesi Utara	98,70	98,74	58,51	90,93	100,00	89,37
22	Gorontalo	97,70	97,46	57,59	98,12	100,00	90,17
23	Sulawesi Tengah	97,50	98,33	63,39	95,77	100,00	91,00
24	Sulawesi Selatan	97,05	98,52	65,39	98,59	99,86	91,88
25	Sulawesi Barat	93,37	98,45	60,00	96,78	100,00	89,72
26	Sulawesi Tenggara	84,80	97,88	59,39	96,86	100,00	87,79
27	Maluku	96,70	52,82	69,67	97,41	70,44	77,41
28	Maluku Utara	92,66	84,15	64,43	94,81	68,88	80,98
29	Bali	82,66	96,79	65,46	97,15	100,00	88,41
30	NTB	98,46	63,54	61,90	97,84	77,78	79,90
31	NTT	95,30	52,66	60,45	95,34	55,65	71,88
32	Papua	98,54	78,80	65,70	94,40	60,41	79,57
33	Papua Barat	72,90	98,67	60,99	98,41	53,03	76,80
	Indonesia	98,47	98,76	64,03	99,09	100,00	92,07

Berdasarkan standar ideal yang bernilai 100, tidak ada provinsi yang berhasil mencapai nilai tersebut, 9 provinsi (2,27%) termasuk kinerja paripurna (91-100), 13 provinsi (39,39%) termasuk kinerja utama (81-90), 8 provinsi (24,24%) termasuk kinerja madya (76-80), 2 provinsi (6,06%) termasuk pratama (71-75), dan sisanya sebesar 1 provinsi (3,03%) termasuk kinerja kurang (≤ 70). Dengan demikian, kinerja pendidikan TK secara nasional sebesar 92,07 termasuk kategori paripurna. Namun, kualitas layanan pendidikan TK sebesar 64,03 masih perlu ditingkatkan.

2. SD

Berdasarkan Tabel 4.62 diperoleh nilai kinerja pendidikan SD secara nasional sebesar 92,91 dengan nilai kesetaraan yang terbesar sebesar 99,85 dan nilai ketersediaan terkecil sebesar 86,88. Hal ini berarti kinerja pendidikan SD hanya tercapai 93% dengan keberhasilan SD tertinggi di Sumatera Utara (93,16) dan terendah di Sulawesi Tenggara (83,50).

Tabel 4.62
Kinerja Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	Kinerja					Rata-rata
		Ketersediaan Layanan	Keterjangkauan Layanan	Kualitas/Mutu Layanan	Kesetaraan Memperoleh Layanan	Kepastian Mendapatkan Layanan	
1	DKI Jakarta	92,87	75,40	91,97	99,93	96,00	91,23
2	Jawa Barat	92,88	82,37	89,48	86,07	95,81	89,32
3	Banten	93,07	71,35	90,27	95,19	93,45	88,67
4	Jawa Tengah	85,67	98,56	87,67	82,92	95,11	89,99
5	DI Yogyakarta	81,44	98,71	89,07	99,50	95,62	92,87
6	Jawa Timur	83,64	95,74	88,18	89,15	95,29	90,40
7	Aceh	82,84	95,93	80,05	77,14	93,12	85,82
8	Sumatera Utara	89,45	94,56	86,72	99,98	95,09	93,16
9	Sumatera Barat	83,10	98,76	85,21	79,95	94,82	88,37
10	Riau	93,84	88,76	85,84	99,21	93,96	92,32
11	Kepulauan Riau	83,18	92,82	87,94	98,23	95,25	91,48
12	Jambi	82,78	98,81	85,13	78,50	94,85	88,02
13	Sumatera Selatan	91,03	91,67	83,92	81,35	94,59	88,51
14	Bangka Belitung	84,96	97,91	84,27	88,82	94,52	90,10
15	Bengkulu	89,03	98,85	86,38	75,87	95,13	89,05
16	Lampung	96,13	91,19	84,30	83,12	95,18	89,98
17	Kalimantan Barat	77,41	98,75	83,15	89,51	93,51	88,47
18	Kalimantan Tengah	72,84	98,45	82,90	93,13	95,07	88,48
19	Kalimantan Selatan	76,81	98,76	83,41	83,69	94,13	87,36
20	Kalimantan Timur	86,51	94,47	84,87	99,77	93,73	91,87
21	Sulawesi Utara	72,49	98,45	84,21	99,45	95,11	89,94
22	Gorontalo	90,70	98,84	84,81	70,59	93,74	87,74
23	Sulawesi Tengah	72,10	98,62	79,81	88,15	94,37	86,61
24	Sulawesi Selatan	81,17	98,84	87,65	79,72	94,96	88,47
25	Sulawesi Barat	76,65	98,72	83,97	70,08	93,69	84,62
26	Sulawesi Tenggara	71,89	98,55	81,69	70,42	94,95	83,50
27	Maluku	84,88	98,76	80,78	97,72	94,61	91,35
28	Maluku Utara	77,11	98,61	80,53	98,91	95,60	90,15
29	Bali	83,68	98,80	91,76	92,84	95,94	92,60
30	NT B	90,65	91,50	90,03	72,16	93,01	87,47
31	NTT	84,83	98,82	79,23	99,76	93,62	91,25
32	Papua	76,86	98,88	79,92	99,76	93,68	89,82
33	Papua Barat	71,77	98,84	81,51	98,77	87,09	87,60
	Indonesia	86,88	95,42	87,36	99,85	95,06	92,91

Berdasarkan standar ideal yang bernilai 100, tidak ada provinsi yang berhasil mencapai nilai tersebut, 9 provinsi (27,27%) termasuk kinerja paripurna (91-100) dan 24 provinsi (72,73%) lainnya termasuk kinerja utama (81-90). Dengan demikian, kinerja pendidikan SD secara nasional sebesar 92,91 termasuk kategori paripurna. Namun, ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan SD sebesar 86,88 dan 87,36 masih perlu ditingkatkan.

3. SMP

Berdasarkan Tabel 4.63 diperoleh nilai kinerja pendidikan SMP secara nasional sebesar 92,26 dengan nilai kesetaraan yang tertinggi sebesar 99,81 dan terendah nilai ketersediaan sebesar 74,58. Hal ini berarti kinerja pendidikan SMP hanya tercapai 92% dengan nilai tertinggi terjadi di DKI Jakarta (94,75) dan nilai terendah terjadi di Gorontalo (81,26).

Tabel 4.63
Kinerja Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	Kinerja					Rata-rata
		Ketersediaan Layanan	Keterjangkauan Layanan	Kualitas/Mutu Layanan	Kesetaraan Memperoleh Layanan	Kepastian Mendapatkan Layanan	
1	DKI Jakarta	85,94	98,82	95,68	96,38	96,91	94,75
2	Jawa Barat	76,95	78,86	95,48	98,37	90,88	88,11
3	Banten	75,19	81,13	95,39	99,06	90,70	88,29
4	Jawa Tengah	86,46	83,10	95,93	93,98	92,54	90,40
5	DI Yogyakarta	83,16	98,67	92,50	98,56	96,33	93,84
6	Jawa Timur	80,84	92,37	96,50	99,29	95,14	92,83
7	Aceh	70,92	98,77	88,18	78,27	95,06	86,24
8	Sumatera Utara	74,71	98,96	93,50	99,35	92,54	91,81
9	Sumatera Barat	77,10	98,44	89,68	77,28	90,12	86,52
10	Riau	67,40	96,64	93,12	86,87	90,96	87,00
11	Kepulauan Riau	70,22	98,52	93,94	91,59	99,59	90,77
12	Jambi	65,61	92,35	93,58	78,11	91,70	84,27
13	Sumatera Selatan	75,60	98,99	93,57	93,57	92,87	90,92
14	Bangka Belitung	71,93	98,84	93,60	86,06	97,75	89,64
15	Bengkulu	68,00	98,73	93,12	68,53	95,00	84,68
16	Lampung	69,24	95,12	92,48	98,57	90,59	89,20
17	Kalimantan Barat	65,71	98,42	92,05	94,89	91,56	88,53
18	Kalimantan Tengah	58,77	94,18	91,36	79,56	89,20	82,61
19	Kalimantan Selatan	62,64	96,20	90,45	79,16	87,51	83,19
20	Kalimantan Timur	65,77	98,73	95,52	89,69	96,85	89,31
21	Sulawesi Utara	61,00	98,33	89,55	99,92	95,29	88,82
22	Gorontalo	54,89	98,57	90,11	69,16	93,57	81,26
23	Sulawesi Tengah	56,80	93,82	95,24	75,95	84,57	81,28
24	Sulawesi Selatan	65,94	96,07	93,99	82,53	90,19	85,74
25	Sulawesi Barat	63,94	94,06	94,10	79,39	87,50	83,80
26	Sulawesi Tenggara	62,69	97,52	92,61	70,74	94,76	83,66
27	Maluku	63,60	98,51	85,49	95,02	94,27	87,38
28	Maluku Utara	61,55	94,78	92,91	95,01	87,15	86,28
29	Bali	83,64	91,61	96,16	99,24	97,57	93,65
30	NT B	70,52	90,38	95,08	76,96	91,41	84,87
31	NTT	61,05	98,81	88,05	98,48	83,07	85,89
32	Papua	63,31	98,69	91,32	98,55	93,75	89,12
33	Papua Barat	63,24	98,66	89,67	97,00	94,80	88,67
	Indonesia	74,58	97,85	94,40	99,81	94,67	92,26

Berdasarkan standar ideal sebesar 100,00 maka tidak ada provinsi yang berhasil mencapai nilai tersebut, terdapat 5 Provinsi (15,15%) yang mencapai kriteria paripurna (91-100) dan sisanya sebanyak 28 Provinsi (84,85%) termasuk kriteria utama (81-90). Dengan menggunakan standar ideal maka kinerja pendidikan SMP secara nasional sebesar 92,26 termasuk kategori paripurna. Namun, ketersediaan layanan pendidikan SMP sebesar 74,58 masih perlu ditingkatkan.

4. SM

Berdasarkan Tabel 4.64 diperoleh nilai keberhasilan pendidikan SM secara nasional sebesar 90,54 dengan nilai kesetaraan terbesar sebesar 99,33 dan nilai ketersediaan yang terkecil sebesar 73,38. Hal ini berarti kinerja pendidikan SM sebesar 91% dengan nilai tertinggi di DI Yogyakarta (94,32) dan terendah di Sulawesi Tenggara (81,89).

Tabel 4.64
Kinerja Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	Kinerja					Rata-rata
		Ketersediaan Layanan	Keterjangkauan Layanan	Kualitas/Mutu Layanan	Kesetaraan Memperoleh Layanan	Kepastian Mendapatkan Layanan	
1	DKI Jakarta	80,37	98,84	96,23	97,53	98,16	94,23
2	Jawa Barat	71,71	82,02	95,71	99,64	89,27	87,67
3	Banten	69,46	90,19	95,96	96,37	90,85	88,56
4	Jawa Tengah	80,75	75,79	96,76	97,63	89,32	88,05
5	DI Yogyakarta	80,63	98,72	95,63	98,13	98,52	94,32
6	Jawa Timur	78,17	86,88	97,30	96,97	94,09	90,68
7	Aceh	72,08	98,85	94,23	74,21	96,18	87,11
8	Sumatera Utara	71,80	94,39	94,95	98,63	95,33	91,02
9	Sumatera Barat	80,24	92,48	94,41	78,08	91,97	87,44
10	Riau	73,79	98,96	94,89	85,83	94,82	89,66
11	Kepulauan Riau	68,64	97,75	95,77	82,46	91,12	87,15
12	Jambi	70,12	96,14	95,48	79,66	91,35	86,55
13	Sumatera Selatan	72,23	90,36	94,57	95,30	89,73	88,44
14	Bangka Belitung	72,79	98,93	94,78	83,82	91,76	88,42
15	Bengkulu	74,39	95,14	93,63	70,13	91,98	85,05
16	Lampung	68,37	83,25	94,12	92,79	84,30	84,57
17	Kalimantan Barat	64,32	85,10	93,81	89,59	82,98	83,16
18	Kalimantan Tengah	59,25	95,50	94,57	78,06	89,65	83,41
19	Kalimantan Sel	72,64	85,01	93,90	83,50	88,15	84,64
20	Kalimantan Timur	68,71	94,93	95,49	88,80	93,12	88,21
21	Sulawesi Utara	63,65	95,11	94,44	87,90	95,01	87,22
22	Gorontalo	71,74	91,17	94,59	72,47	90,37	84,07
23	Sulawesi Tengah	65,82	94,79	95,78	79,18	88,43	84,80
24	Sulawesi Selatan	68,83	92,26	94,84	84,22	92,85	86,60
25	Sulawesi Barat	55,76	91,90	94,01	80,42	93,47	83,11
26	Sulawesi Tenggara	61,46	90,93	93,42	69,92	93,74	81,89
27	Maluku	62,88	89,63	91,21	81,98	95,15	84,17
28	Maluku Utara	54,92	98,42	94,01	83,36	96,64	85,47
29	Bali	83,27	87,01	96,71	93,06	97,17	91,44
30	NT B	62,32	96,45	96,03	73,38	92,44	84,12
31	NTT	67,26	89,64	91,90	86,42	86,26	84,30
32	Papua	68,13	94,08	93,18	87,44	86,78	85,92
33	Papua Barat	60,19	98,74	94,47	86,83	82,94	84,63
	Indonesia	73,38	93,03	95,52	99,33	91,46	90,54

Berdasarkan standar ideal sebesar 100 maka terdapat 4 provinsi (12,12%) termasuk paripurna (91-100) dan 29 provinsi (87,88%) sisanya termasuk utama (81-90). Dengan demikian, kinerja pendidikan SM secara nasional sebesar 90,54 termasuk kategori utama. Namun, peningkatan ketersediaan layanan SM sebesar 73,38 masih perlu ditingkatkan. Bila ketersediaan layanan dapat ditingkatkan maka kinerja program pembangunan pendidikan SM dapat ditingkatkan.

5. PT

Berdasarkan Tabel 4.65 diperoleh nilai keberhasilan pendidikan PT secara nasional sebesar 77,51 dengan nilai ketersediaan yang terbesar sebesar 100,00 dan nilai kepastian terkecil sebesar 37,76. Hal ini berarti kinerja pendidikan PT hanya sebesar 78% dengan nilai tertinggi DI Yogyakarta (89,08) dan terendah Banten (59,11).

Tabel 4.65
Kinerja Pendidikan PT Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	Kinerja					Rata-rata
		Ketersediaan Layanan	Keterjangkauan Layanan	Kualitas Layanan	Kesetaraan Memperoleh Layanan	Kepastian Memperoleh Layanan	
1	DKI Jakarta	100.00	97.84	62.26	82.16	100.00	88.45
2	Jawa Barat	100.00	68.19	58.65	92.56	26.38	69.16
3	Banten	72.68	59.46	56.30	94.99	12.11	59.11
4	Jawa Tengah	100.00	67.03	59.71	93.92	22.24	68.58
5	DI Yogyakarta	100.00	97.45	61.18	98.89	87.86	89.08
6	Jawa Timur	100.00	77.03	60.08	94.63	33.48	73.05
7	Aceh	100.00	98.54	52.37	93.85	43.42	77.64
8	Sumatera Utara	97.08	98.57	57.38	94.58	30.84	75.69
9	Sumatera Barat	97.32	98.14	60.94	90.36	45.59	78.47
10	Riau	100.00	93.64	63.33	93.99	24.67	75.13
11	Kepulauan Riau	74.21	98.98	57.38	92.93	25.78	69.86
12	Jambi	79.46	89.83	54.72	93.71	27.87	69.12
13	Sumatera Selatan	100.00	99.38	61.02	85.17	25.98	74.31
14	Bangka Belitung	39.80	92.75	57.14	96.53	14.74	60.19
15	Bengkulu	100.00	93.94	61.35	89.03	33.91	75.65
16	Lampung	100.00	93.70	60.70	87.57	20.02	72.39
17	Kalimantan Barat	93.78	93.55	57.23	97.78	21.78	72.83
18	Kalimantan Tengah	100.00	94.00	61.77	97.92	21.34	75.01
19	Kalimantan Selatan	39.78	92.24	48.01	95.71	32.47	61.64
20	Kalimantan Timur	89.65	89.03	59.61	86.92	31.99	71.44
21	Sulawesi Utara	75.89	83.21	43.25	85.33	38.30	65.20
22	Gorontalo	100.00	92.47	59.73	79.33	62.53	78.81
23	Sulawesi Tengah	100.00	91.97	54.71	97.33	31.10	75.02
24	Sulawesi Selatan	100.00	82.46	60.49	95.94	47.69	77.32
25	Sulawesi Barat	100.00	92.83	55.13	93.83	14.73	71.31
26	Sulawesi Tenggara	100.00	89.25	60.52	98.04	32.38	76.04
27	Maluku	100.00	89.10	54.84	92.22	46.06	76.44
28	Maluku Utara	100.00	90.08	54.51	98.54	32.84	75.19
29	Bali	96.11	88.28	54.59	91.86	31.23	72.42
30	NT B	100.00	93.01	57.06	88.11	32.50	74.14
31	NTT	100.00	93.76	54.78	98.72	24.32	74.31
32	Papua	74.98	90.52	53.47	83.14	33.00	67.02
33	Papua Barat	86.82	88.71	45.83	87.89	39.71	69.79
	Indonesia	100.00	91.05	61.06	97.69	37.76	77.51

Berdasarkan standar ideal sebesar 100,00 maka tidak terdapat provinsi yang termasuk ideal, 2 provinsi (6,06%) termasuk utama (81-90), 6 provinsi (18,18%) termasuk madya (76-80), 15 provinsi (45,45%) termasuk pratama (71-75) dan 10 provinsi (30,30%) termasuk kurang (≤ 70). Dengan demikian, kinerja pendidikan PT secara nasional sebesar 77,51 termasuk dalam kategori madya. Namun, kepastian memperoleh layanan pendidikan PT sebesar 37,76 sangat perlu ditingkatkan terutama pada APK dan AM ke PT. Selain itu, kualitas layanan pendidikan PT sebesar 61,06 juga perlu ditingkatkan agar kinerja pendidikan PT makin meningkat.

6. Semua Jenjang

Kinerja pendidikan dibandingkan antarjenjang pendidikan TK, SD, SMP, SM dan PT maka akan diperoleh jenjang pendidikan yang paling berhasil dalam program pembangunan pendidikan di setiap provinsi. Dengan melihat kebijakan pemerintah menggunakan misi pendidikan 5K dan nilai dari hasil konversi masing-masing indikator maka keberhasilan pembangunan pendidikan menurut jenjang tiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.66.

Tabel 4.66
Kinerja Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TK	SD	SMP	SM	PT	Rata-rata
1	DKI Jakarta	92.71	91.23	94.75	94.23	88.45	92.27
2	Jawa Barat	76.79	89.32	88.11	87.67	69.16	82.21
3	Banten	79.04	88.67	88.29	88.56	59.11	80.73
4	Jawa Tengah	91.07	89.99	90.40	88.05	68.58	85.62
5	DI Yogyakarta	94.34	92.87	93.84	94.32	89.08	92.89
6	Jawa Timur	92.09	90.40	92.83	90.68	73.05	87.81
7	Aceh	85.47	85.82	86.24	87.11	77.64	84.46
8	Sumatera Utara	78.15	93.16	91.81	91.02	75.69	85.97
9	Sumatera Barat	91.69	88.37	86.52	87.44	78.47	86.50
10	Riau	83.79	92.32	87.00	89.66	75.13	85.58
11	Kepulauan Riau	89.18	91.48	90.77	87.15	69.86	85.69
12	Jambi	87.97	88.02	84.27	86.55	69.12	83.18
13	Sumatera Selatan	73.07	88.51	90.92	88.44	74.31	83.05
14	Bangka Belitung	91.36	90.10	89.64	88.42	60.19	83.94
15	Bengkulu	86.82	89.05	84.68	85.05	75.65	84.25
16	Lampung	89.75	89.98	89.20	84.57	72.39	85.18
17	Kalimantan Barat	70.64	88.47	88.53	83.16	72.83	80.72
18	Kalimantan Tengah	90.93	88.48	82.61	83.41	75.01	84.09
19	Kalimantan Selatan	89.79	87.36	83.19	84.64	61.64	81.32
20	Kalimantan Timur	91.69	91.87	89.31	88.21	71.44	86.51
21	Sulawesi Utara	89.37	89.94	88.82	87.22	65.20	84.11
22	Gorontalo	90.17	87.74	81.26	84.07	78.81	84.41
23	Sulawesi Tengah	91.00	86.61	81.28	84.80	75.02	83.74
24	Sulawesi Selatan	91.88	88.47	85.74	86.60	77.32	86.00
25	Sulawesi Barat	89.72	84.62	83.80	83.11	71.31	82.51
26	Sulawesi Tenggara	87.79	83.50	83.66	81.89	76.04	82.58
27	Maluku	77.41	91.35	87.38	84.17	76.44	83.35
28	Maluku Utara	80.98	90.15	86.28	85.47	75.19	83.62
29	Bali	88.41	92.60	93.65	91.44	72.42	87.70
30	NTB	79.90	87.47	84.87	84.12	74.14	82.10
31	NTT	71.88	91.25	85.89	84.30	74.31	81.53
32	Papua	79.57	89.82	89.12	85.92	67.02	82.29
33	Papua Barat	76.80	87.60	88.67	84.63	69.79	81.50
	Indonesia	92.07	92.91	92.26	90.54	77.51	89.06

Bila kinerja pendidikan di TK, SD, SMP, SM, dan PT dianggap sama kondisinya maka diperoleh kinerja pendidikan untuk masing-masing provinsi. Kinerja pendidikan secara nasional sebesar 89,06, yang tertinggi adalah DI Yogyakarta (92,89) dan terendah terjadi di Kalimantan Barat (80,72).

Bila digunakan standar ideal maka terdapat 2 provinsi (6,06%) termasuk paripurna (91-100), 29 provinsi (87,88%) termasuk utama (81-90), dan 2 provinsi (6,06%) termasuk madya. Dengan demikian, berdasarkan standar ideal keberhasilan pendidikan secara nasional sebesar 89,06 termasuk kategori utama. Namun, kinerja pendidikan PT masih perlu ditingkakan karena yang terkecil jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah.

Tabel 4.67
Peringkat Kinerja Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2011/2012

No.	Provinsi	TK	SD	SMP	SM	PT	Rata-rata
1	DI Yogyakarta	94.34	92.87	93.84	94.32	89.08	92.89
2	DKI Jakarta	92.71	91.23	94.75	94.23	88.45	92.27
3	Indonesia	92.07	92.91	92.26	90.54	77.51	89.06
4	Jawa Timur	92.09	90.40	92.83	90.68	73.05	87.81
5	Bali	88.41	92.60	93.65	91.44	72.42	87.70
6	Kalimantan Timur	91.69	91.87	89.31	88.21	71.44	86.51
7	Sumatera Barat	91.69	88.37	86.52	87.44	78.47	86.50
8	Sulawesi Selatan	91.88	88.47	85.74	86.60	77.32	86.00
9	Sumatera Utara	78.15	93.16	91.81	91.02	75.69	85.97
10	Kepulauan Riau	89.18	91.48	90.77	87.15	69.86	85.69
11	Jawa Tengah	91.07	89.99	90.40	88.05	68.58	85.62
12	Riau	83.79	92.32	87.00	89.66	75.13	85.58
13	Lampung	89.75	89.98	89.20	84.57	72.39	85.18
14	Aceh	85.47	85.82	86.24	87.11	77.64	84.46
15	Gorontalo	90.17	87.74	81.26	84.07	78.81	84.41
16	Bengkulu	86.82	89.05	84.68	85.05	75.65	84.25
17	Sulawesi Utara	89.37	89.94	88.82	87.22	65.20	84.11
18	Kalimantan Tengah	90.93	88.48	82.61	83.41	75.01	84.09
19	Bangka Belitung	91.36	90.10	89.64	88.42	60.19	83.94
20	Sulawesi Tengah	91.00	86.61	81.28	84.80	75.02	83.74
21	Maluku Utara	80.98	90.15	86.28	85.47	75.19	83.62
22	Maluku	77.41	91.35	87.38	84.17	76.44	83.35
23	Jambi	87.97	88.02	84.27	86.55	69.12	83.18
24	Sumatera Selatan	73.07	88.51	90.92	88.44	74.31	83.05
25	Sulawesi Tenggara	87.79	83.50	83.66	81.89	76.04	82.58
26	Sulawesi Barat	89.72	84.62	83.80	83.11	71.31	82.51
27	Papua	79.57	89.82	89.12	85.92	67.02	82.29
28	Jawa Barat	76.79	89.32	88.11	87.67	69.16	82.21
29	NTB	79.90	87.47	84.87	84.12	74.14	82.10
30	NTT	71.88	91.25	85.89	84.30	74.31	81.53
31	Papua Barat	76.80	87.60	88.67	84.63	69.79	81.50
32	Kalimantan Selatan	89.79	87.36	83.19	84.64	61.64	81.32
33	Banten	79.04	88.67	88.29	88.56	59.11	80.73
34	Kalimantan Barat	70.64	88.47	88.53	83.16	72.83	80.72

Tabel 4.67 menunjukkan kinerja pendidikan berdasarkan peringkat. Secara nasional Indonesia memiliki nilai 89,06 termasuk peringkat 3. Dengan demikian, kinerja pendidikan Indonesia tercapai sekitar 89%. Lima peringkat tertinggi terjadi pada DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Timur. Peringkat 1 adalah DI Yogyakarta dengan nilai 92,89. DKI Jakarta termasuk peringkat 2 dengan nilai 92,27, Jawa Timur termasuk peringkat 4 dengan nilai 87,81, Bali termasuk peringkat 5 dengan nilai 87,70,

Kalimantan Timur termasuk peringkat 6 dengan nilai 86,51. Sebaliknya, lima peringkat terendah atau peringkat 30 sampai 34 adalah NTT, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Banten, dan Kalimantan Barat. NTT termasuk peringkat 30 dengan nilai sebesar 81,53, selanjutnya Papua Barat termasuk peringkat 31 dengan nilai 81,50, Kalimantan Selatan termasuk peringkat 32 dengan nilai 81,32, Banten termasuk peringkat 33 dengan nilai 80,73, sedangkan peringkat 34 yang terendah adalah Kalimantan Barat dengan nilai 80,72.

G. Perkembangan Kinerja Pendidikan

Perkembangan kinerja atau keberhasilan program pembangunan pendidikan adalah perbandingan nilai hasil pengukuran dari misi pendidikan 5K, yaitu ketersediaan layanan, keterjangkauan layanan, kualitas layanan, kesetaraan dalam memperoleh layanan, dan kepastian memperoleh layanan tiap provinsi. Untuk mengetahui apakah terdapat perkembangan dalam kinerja pendidikan maka minimal harus dilihat selama dua tahun, yaitu tahun 2010/2011 dan 2011/2012.

Berdasarkan Tabel 4.68 terlihat perbandingan kinerja pendidikan secara nasional yang mengalami peningkatan (0,11) dari 88,95 pada tahun 2010/2011 menjadi 89,24 pada tahun 2011/2012. Apabila nilai kinerja diperbandingkan antarprovinsi maka diperoleh gambaran bahwa terdapat 25 provinsi (75,76%) mengalami kenaikan dan 8 provinsi (24,24%) sisanya mengalami penurunan. Kenaikan terbesar (1,94) terjadi di DKI Jakarta dan terkecil (0,08) terjadi di Sulawesi Tengah, sedangkan penurunan terbesar terjadi di Jawa Tengah (1,73) dan terkecil (0,02) di Sulawesi Tenggara. Penurunan yang terjadi hendaknya dilihat pada misi yang keberapa dan kemudian perlu diketahui dari misi tersebut indikator apa yang mengalami penurunan.

Berdasarkan Tabel 4.69 adalah perkembangan peringkat kinerja pendidikan tiap provinsi. Kinerja pendidikan nasional yang pada tahun 2010/2011 termasuk peringkat 4, pada tahun 2011/2012 menjadi peringkat 3, berarti kondisinya lebih baik. Peringkat pertama sampai kelima terbaik pada tahun 2010/2011 terjadi di DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah. Pada tahun 2011/2012 ternyata terjadi sedikit perubahan karena Jawa Tengah yang semula masuk peringkat 6 menjadi peringkat 11 dan peringkat 6 menjadi Kalimantan Timur. Sebaliknya, lima peringkat terendah pada tahun 2010/2011 adalah NTB, Banten, Papua, NTT, dan terendah Kalimantan Barat, sedangkan peringkat lima terbawah pada tahun 2011/2012 adalah NTT, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Banten, dan Kalimantan Barat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali sudah konsisten dalam meningkatkan kinerja pendidikan sehingga keempat provinsi tersebut termasuk peringkat

yang sama. Sebaliknya, Kalimantan Barat konsisten termasuk peringkat terendah (34). NTT yang semula peringkat 33 meningkat menjadi peringkat 30 berarti meningkat 4 tingkat. Papua yang semula peringkat 32 meningkat menjadi 27 berarti meningkat 6 tingkat. NTB yang semula peringkat 30 meningkat menjadi peringkat 29. Kondisi sebaliknya terjadi di Banten yang semula peringkat 31 menurun menjadi peringkat 33 berarti turun 2 tingkat. Demikian juga Kalimantan Selatan yang semula peringkat 29 menurun menjadi peringkat 32 atau turun 3 tingkat.

Tabel 4.68
Perkembangan Kinerja Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2010/2011--2011/2012

No.	Provinsi	Kinerja Pendidikan		Selisih	Keterangan
		2010/2011	2011/2012		
1	DKI Jakarta	90.34	92.64	2.31	Naik
2	Jawa Barat	83.67	82.36	-1.31	Turun
3	Banten	80.80	80.76	-0.04	Turun
4	Jawa Tengah	87.35	85.75	-1.59	Turun
5	DI Yogyakarta	92.05	93.03	0.99	Naik
6	Jawa Timur	89.43	87.99	-1.44	Turun
7	Aceh	83.33	84.64	1.30	Naik
8	Sumatera Utara	84.38	86.14	1.76	Naik
9	Sumatera Barat	85.67	86.66	0.99	Naik
10	Riau	85.05	85.75	0.71	Naik
11	Kepulauan Riau	84.09	85.89	1.80	Naik
12	Jambi	81.50	83.39	1.88	Naik
13	Sumatera Selatan	82.05	83.26	1.21	Naik
14	Bangka Belitung	82.39	84.21	1.82	Naik
15	Bengkulu	83.51	84.41	0.90	Naik
16	Lampung	84.15	85.36	1.21	Naik
17	Kalimantan Barat	79.66	80.92	1.26	Naik
18	Kalimantan Tengah	83.12	84.31	1.19	Naik
19	Kalimantan Selatan	81.45	81.38	-0.07	Turun
20	Kalimantan Timur	85.30	86.70	1.40	Naik
21	Sulawesi Utara	83.98	84.12	0.14	Naik
22	Gorontalo	83.82	84.64	0.83	Naik
23	Sulawesi Tengah	83.66	83.89	0.23	Naik
24	Sulawesi Selatan	86.52	86.26	-0.26	Turun
25	Sulawesi Barat	81.96	82.88	0.92	Naik
26	Sulawesi Tenggara	82.60	82.81	0.20	Naik
27	Maluku	83.04	83.44	0.40	Naik
28	Maluku Utara	82.88	83.70	0.82	Naik
29	Bali	88.54	87.69	-0.85	Turun
30	NTB	81.21	82.27	1.07	Naik
31	NTT	80.68	81.65	0.96	Naik
32	Papua	80.71	82.55	1.84	Naik
33	Papua Barat	81.73	81.61	-0.12	Turun
	Indonesia	88.95	89.24	0.29	Naik

Tabel 4.69
Perkembangan Peringkat Kinerja Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2010/2011--2011/2012

2010/2011			2011/2012		
Peringkat	Provinsi	Nilai Kinerja	Peringkat	Provinsi	Nilai Kinerja
1	DI Yogyakarta	92.05	1	DI Yogyakarta	92.89
2	DKI Jakarta	90.34	2	DKI Jakarta	92.27
3	Jawa Timur	89.43	3	Indonesia	89.06
4	Indonesia	88.95	4	Jawa Timur	87.81
5	Bali	88.54	5	Bali	87.70
6	Jawa Tengah	87.35	6	Kalimantan Timur	86.51
7	Sulawesi Selatan	86.52	7	Sumatera Barat	86.50
8	Sumatera Barat	85.67	8	Sulawesi Selatan	86.00
9	Kalimantan Timur	85.30	9	Sumatera Utara	85.97
10	Riau	85.05	10	Kepulauan Riau	85.69
11	Sumatera Utara	84.38	11	Jawa Tengah	85.62
12	Lampung	84.15	12	Riau	85.58
13	Kepulauan Riau	84.09	13	Lampung	85.18
14	Sulawesi Utara	83.98	14	Aceh	84.46
15	Gorontalo	83.82	15	Gorontalo	84.41
16	Jawa Barat	83.67	16	Bengkulu	84.25
17	Sulawesi Tengah	83.66	17	Sulawesi Utara	84.11
18	Bengkulu	83.51	18	Kalimantan Tengah	84.09
19	Aceh	83.33	19	Bangka Belitung	83.94
20	Kalimantan Tengah	83.12	20	Sulawesi Tengah	83.74
21	Maluku	83.04	21	Maluku Utara	83.62
22	Maluku Utara	82.88	22	Maluku	83.35
23	Sulawesi Tenggara	82.60	23	Jambi	83.18
24	Bangka Belitung	82.39	24	Sumatera Selatan	83.05
25	Sumatera Selatan	82.05	25	Sulawesi Tenggara	82.58
26	Sulawesi Barat	81.96	26	Sulawesi Barat	82.51
27	Papua Barat	81.73	27	Papua	82.29
28	Jambi	81.50	28	Jawa Barat	82.21
29	Kalimantan Selatan	81.45	29	NTB	82.10
30	NTB	81.21	30	NTT	81.53
31	Banten	80.80	31	Papua Barat	81.50
32	Papua	80.71	32	Kalimantan Selatan	81.32
33	NTT	80.68	33	Banten	80.73
34	Kalimantan Barat	79.66	34	Kalimantan Barat	80.72

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Kinerja pendidikan dihitung dari komposit indikator ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian. Oleh karena kelima komposit indikator tersebut dalam satuan yang berbeda maka dilakukan proses konversi sehingga menghasilkan nilai dengan jumlah nilai maksimum 100. Hasilnya menjadi dasar penilaian terhadap kinerja pendidikan.

Tabel 5.1 menunjukkan peringkat kinerja pendidikan tiap jenjang pendidikan, yaitu TK, SD, SMP, SM, PT, dan rata-rata. Bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka kinerja pendidikan TK Indonesia sebesar 92,07 termasuk peringkat 4. Lima peringkat tertinggi adalah DI Yogyakarta termasuk peringkat 1 dengan nilai 94,34. DKI Jakarta termasuk peringkat 2 dengan nilai 92,71, Jawa Timur termasuk peringkat 3 dengan nilai 92,09, Sulawesi Selatan termasuk peringkat 4 dengan nilai 91,88, dan Kalimantan Timur dan Sumatera Barat termasuk peringkat 5 dengan nilai 91,69. Sebaliknya, lima peringkat terendah atau peringkat 30 adalah Papua Barat dengan nilai 76,80, Jawa Barat termasuk peringkat 31 dengan nilai 76,79, Sumatera Selatan termasuk peringkat 32 dengan nilai 73,07, Nusa Tenggara Timur termasuk peringkat 33 dengan nilai 71,88 sedangkan Kalimantan Barat termasuk peringkat 34 (terakhir) dengan nilai sebesar 70,64.

Kinerja pendidikan SD Indonesia sebesar 92,91 termasuk peringkat 2. Lima peringkat tertinggi adalah Sumatera Utara termasuk peringkat 1 dengan nilai 93,16. DI Yogyakarta termasuk peringkat 3 dengan nilai 92,87, Bali termasuk peringkat 4 dengan nilai 92,60, Riau termasuk peringkat 5 dengan nilai 92,32, dan Kalimantan Timur termasuk peringkat 6 dengan nilai 91,87. Sebaliknya, lima peringkat terendah atau peringkat 30 adalah Kalimantan Selatan dengan nilai 87,36, Sulawesi Tengah termasuk peringkat 31 dengan nilai 86,61, Aceh termasuk peringkat 32 dengan nilai 85,82, Sulawesi Barat termasuk peringkat 33 dengan nilai 84,62 sedangkan Sulawesi Tenggara termasuk peringkat 34 (terakhir) dengan nilai sebesar 83,50.

Kinerja pendidikan SMP Indonesia sebesar 92,26 termasuk peringkat 5. Lima peringkat tertinggi adalah DKI Jakarta termasuk peringkat 1 dengan nilai 94,75. DI Yogyakarta termasuk peringkat 2 dengan nilai 93,84, Bali termasuk peringkat 3 dengan nilai 93,65, Jawa Timur termasuk peringkat 4 dengan nilai 92,83, dan Sumatera Utara termasuk peringkat 6 dengan nilai 91,81. Sebaliknya, lima peringkat terendah atau peringkat 30 adalah

Sulawesi Tenggara dengan nilai 83,66, Kalimantan Selatan termasuk peringkat 31 dengan nilai 83,19, Kalimantan Tengah termasuk peringkat 32 dengan nilai 82,61, Sulawesi Tengah termasuk peringkat 33 dengan nilai 81,28 sedangkan Gorontalo termasuk peringkat 34 (terakhir) dengan nilai sebesar 81,26.

Tabel 5.1
Peringkat Kinerja Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011/2012

Peringkat	Provinsi	TK	Peringkat	Provinsi	SD	Peringkat	Provinsi	SMP
1	DI Yogyakarta	94.34	1	Sumatera Utara	93.16	1	DKI Jakarta	94.75
2	DKI Jakarta	92.71	2	Indonesia	92.91	2	DI Yogyakarta	93.84
3	Jawa Timur	92.09	3	DI Yogyakarta	92.87	3	Bali	93.65
4	Indonesia	92.07	4	Bali	92.60	4	Jawa Timur	92.83
5	Sulawesi Selatan	91.88	5	Riau	92.32	5	Indonesia	92.26
6	Kalimantan Timur	91.69	6	Kalimantan Timur	91.87	6	Sumatera Utara	91.81
7	Sumatera Barat	91.69	7	Kepulauan Riau	91.48	7	Sumatera Selatan	90.92
8	Bangka Belitung	91.36	8	Maluku	91.35	8	Kepulauan Riau	90.77
9	Jawa Tengah	91.07	9	NTT	91.25	9	Jawa Tengah	90.40
10	Sulawesi Tengah	91.00	10	DKI Jakarta	91.23	10	Bangka Belitung	89.64
11	Kalimantan Tengah	90.93	11	Jawa Timur	90.40	11	Kalimantan Timur	89.31
12	Gorontalo	90.17	12	Maluku Utara	90.15	12	Lampung	89.20
13	Kalimantan Selatan	89.79	13	Bangka Belitung	90.10	13	Papua	89.12
14	Lampung	89.75	14	Jawa Tengah	89.99	14	Sulawesi Utara	88.82
15	Sulawesi Barat	89.72	15	Lampung	89.98	15	Papua Barat	88.67
16	Sulawesi Utara	89.37	16	Sulawesi Utara	89.94	16	Kalimantan Barat	88.53
17	Kepulauan Riau	89.18	17	Papua	89.82	17	Banten	88.29
18	Bali	88.41	18	Jawa Barat	89.32	18	Jawa Barat	88.11
19	Jambi	87.97	19	Bengkulu	89.05	19	Maluku	87.38
20	Sulawesi Tenggara	87.79	20	Banten	88.67	20	Riau	87.00
21	Bengkulu	86.82	21	Sumatera Selatan	88.51	21	Sumatera Barat	86.52
22	Aceh	85.47	22	Kalimantan Tengah	88.48	22	Maluku Utara	86.28
23	Riau	83.79	23	Sulawesi Selatan	88.47	23	Aceh	86.24
24	Maluku Utara	80.98	24	Kalimantan Barat	88.47	24	NTT	85.89
25	NTB	79.90	25	Sumatera Barat	88.37	25	Sulawesi Selatan	85.74
26	Papua	79.57	26	Jambi	88.02	26	NTB	84.87
27	Banten	79.04	27	Gorontalo	87.74	27	Bengkulu	84.68
28	Sumatera Utara	78.15	28	Papua Barat	87.60	28	Jambi	84.27
29	Maluku	77.41	29	NTB	87.47	29	Sulawesi Barat	83.80
30	Papua Barat	76.80	30	Kalimantan Selatan	87.36	30	Sulawesi Tenggara	83.66
31	Jawa Barat	76.79	31	Sulawesi Tengah	86.61	31	Kalimantan Selatan	83.19
32	Sumatera Selatan	73.07	32	Aceh	85.82	32	Kalimantan Tengah	82.61
33	NTT	71.88	33	Sulawesi Barat	84.62	33	Sulawesi Tengah	81.28
34	Kalimantan Barat	70.64	34	Sulawesi Tenggara	83.50	34	Gorontalo	81.26

Kinerja pendidikan SM Indonesia sebesar 90,54 termasuk peringkat 6. Lima peringkat tertinggi adalah DI Yogyakarta termasuk peringkat 1 dengan nilai 94,32. DKI Jakarta termasuk peringkat 2 dengan nilai 94,23, Bali termasuk peringkat 3 dengan nilai 91,44, Sumatera Utara termasuk peringkat 4 dengan nilai 91,02, dan Jawa Timur termasuk peringkat 5 dengan nilai 90,68. Sebaliknya, lima peringkat terendah atau peringkat 30 adalah Gorontalo dengan nilai 84,07, Kalimantan Tengah termasuk peringkat 31 dengan nilai 83,41, Kalimantan Barat termasuk peringkat 32 dengan nilai 83,16, Sulawesi Barat termasuk peringkat 33 dengan nilai 83,11 sedangkan Sulawesi Tenggara termasuk peringkat 34 (terakhir) dengan nilai sebesar 81,89.

Tabel 5.1 (lanjutan)
Peringkat Kinerja Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011/2012

Peringkat	Provinsi	SM	Peringkat	Provinsi	PT	Peringkat	Provinsi	Rata2
1	DI Yogyakarta	94.32	1	DI Yogyakarta	89.08	1	DI Yogyakarta	92.89
2	DKI Jakarta	94.23	2	DKI Jakarta	88.45	2	DKI Jakarta	92.27
3	Bali	91.44	3	Gorontalo	78.81	3	Indonesia	89.06
4	Sumatera Utara	91.02	4	Sumatera Barat	78.47	4	Jawa Timur	87.81
5	Jawa Timur	90.68	5	Aceh	77.64	5	Bali	87.70
6	Indonesia	90.54	6	Indonesia	77.51	6	Kalimantan Timur	86.51
7	Riau	89.66	7	Sulawesi Selatan	77.32	7	Sumatera Barat	86.50
8	Banten	88.56	8	Maluku	76.44	8	Sulawesi Selatan	86.00
9	Sumatera Selatan	88.44	9	Sulawesi Tenggara	76.04	9	Sumatera Utara	85.97
10	Bangka Belitung	88.42	10	Sumatera Utara	75.69	10	Kepulauan Riau	85.69
11	Kalimantan Timur	88.21	11	Bengkulu	75.65	11	Jawa Tengah	85.62
12	Jawa Tengah	88.05	12	Maluku Utara	75.19	12	Riau	85.58
13	Jawa Barat	87.67	13	Riau	75.13	13	Lampung	85.18
14	Sumatera Barat	87.44	14	Sulawesi Tengah	75.02	14	Aceh	84.46
15	Sulawesi Utara	87.22	15	Kalimantan Tengah	75.01	15	Gorontalo	84.41
16	Kepulauan Riau	87.15	16	NTT	74.31	16	Bengkulu	84.25
17	Aceh	87.11	17	Sumatera Selatan	74.31	17	Sulawesi Utara	84.11
18	Sulawesi Selatan	86.60	18	NTB	74.14	18	Kalimantan Tengah	84.09
19	Jambi	86.55	19	Jawa Timur	73.05	19	Bangka Belitung	83.94
20	Papua	85.92	20	Kalimantan Barat	72.83	20	Sulawesi Tengah	83.74
21	Maluku Utara	85.47	21	Bali	72.42	21	Maluku Utara	83.62
22	Bengkulu	85.05	22	Lampung	72.39	22	Maluku	83.35
23	Sulawesi Tengah	84.80	23	Kalimantan Timur	71.44	23	Jambi	83.18
24	Kalimantan Selatan	84.64	24	Sulawesi Barat	71.31	24	Sumatera Selatan	83.05
25	Papua Barat	84.63	25	Kepulauan Riau	69.86	25	Sulawesi Tenggara	82.58
26	Lampung	84.57	26	Papua Barat	69.79	26	Sulawesi Barat	82.51
27	NTT	84.30	27	Jawa Barat	69.16	27	Papua	82.29
28	Maluku	84.17	28	Jambi	69.12	28	Jawa Barat	82.21
29	NTB	84.12	29	Jawa Tengah	68.58	29	NTB	82.10
30	Gorontalo	84.07	30	Papua	67.02	30	NTT	81.53
31	Kalimantan Tengah	83.41	31	Sulawesi Utara	65.20	31	Papua Barat	81.50
32	Kalimantan Barat	83.16	32	Kalimantan Selatan	61.64	32	Kalimantan Selatan	81.32
33	Sulawesi Barat	83.11	33	Bangka Belitung	60.19	33	Banten	80.73
34	Sulawesi Tenggara	81.89	34	Banten	59.11	34	Kalimantan Barat	80.72

Kinerja pendidikan PT Indonesia sebesar 77,51 termasuk peringkat 6. Lima peringkat tertinggi adalah DI Yogyakarta termasuk peringkat 1 dengan nilai 89,08. DKI Jakarta termasuk peringkat 2 dengan nilai 88,45, Gorontalo termasuk peringkat 3 dengan nilai 78,81, Sumatera Barat termasuk peringkat 4 dengan nilai 78,47, dan Aceh termasuk peringkat 5 dengan nilai 77,64. Sebaliknya, lima peringkat terendah atau peringkat 30 adalah Papua dengan nilai 67,02, Sulawesi Utara termasuk peringkat 31 dengan nilai 65,20, Kalimantan Selatan termasuk peringkat 32 dengan nilai 61,64, Bangka Belitung termasuk peringkat 33 dengan nilai 60,19, sedangkan Banten termasuk peringkat 34 (terakhir) dengan nilai sebesar 59,11.

Dengan demikian, kinerja pendidikan Indonesia sebesar 89,06 termasuk peringkat 3. Lima peringkat tertinggi adalah DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Timur. Sebaliknya, lima peringkat terendah atau peringkat 30 sampai 34 adalah NTT, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Banten, dan Kalimantan Barat. Selain itu, dapat dikatakan bahwa DI Yogyakarta di semua jenjang pendidikan dan rata-rata termasuk dalam peringkat 5 besar, DKI Jakarta termasuk peringkat 5 besar di empat jenjang,

yaitu TK, SMP, SM, PT, dan rata-rata, Jawa Timur termasuk peringkat 5 besar di empat jenjang, yaitu TK, SMP, SM, dan rata-rata, Sulsel termasuk peringkat 5 besar di TK, Kalimantan Timur termasuk peringkat 5 besar di TK, SD, dan rata-rata, Sumatera Utara termasuk peringkat 5 besar di SD, SMP, dan SM, Bali termasuk peringkat 5 besar di SD, SMP, SM, dan rata-rata, Gorontalo, Sumatera Barat, dan Aceh termasuk peringkat 5 besar di PT.

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan simpulan di atas maka dipandang perlu adanya tindak lanjut yang diupayakan demi mendekatkan kinerja atau keberhasilan pendidikan menuju ideal. Untuk itu, saran yang diberikan adalah:

1. TK perlu ditingkatkan kinerjanya terutama pada misi K-3 kualitas layanan karena nilai misi tersebut sebesar 64,03 di bawah rata-rata nilai pendidikan TK sebesar 92,07.
2. SD perlu ditingkatkan kinerjanya terutama pada misi K-1 ketersediaan layanan sebesar 86,88 dan K-3 kualitas layanan sebesar 87,36 karena nilai kedua misi tersebut di bawah rata-rata nilai pendidikan SD sebesar 92,91.
3. SMP perlu ditingkatkan kinerjanya terutama pada misi K-1 ketersediaan layanan sebesar 74,58 yang paling rendah jika dibandingkan dengan misi lainnya karena nilai misi tersebut di bawah rata-rata nilai pendidikan SMP sebesar 92,26.
4. SM perlu ditingkatkan kinerjanya terutama pada misi K-1 ketersediaan layanan sebesar 73,38 yang paling rendah jika dibandingkan dengan misi lainnya karena nilai misi tersebut di bawah rata-rata nilai pendidikan SM sebesar 90,54.
5. PT perlu ditingkatkan kinerjanya terutama pada misi K-3 kualitas layanan sebesar 61,06 dan misi K-5 kepastian mendapatkan layanan sebesar 37,76 karena nilai kedua misi tersebut yang paling rendah di bawah rata-rata nilai pendidikan PT sebesar 77,51.
6. Bila kelima jenjang pendidikan tersebut terutama PT dapat ditingkatkan maka diharapkan kinerja pendidikan tiap provinsi akan meningkat.

C. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan bukan terhadap simpulan yang dihasilkan melainkan mengenai metode yang digunakan adalah:

1. Pengungkapan kinerja atau keberhasilan pendidikan ini didasarkan atas gencarnya pandangan pemerhati pendidikan mengenai ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian sehingga ditetapkan untuk memfokuskan kriteria dengan menerapkan 10 sampai 20

indikator yang ada. Tidak tertutup kemungkinan bahwa langkah ini malah mendatangkan hasil yang cukup berbeda dari hasil yang diperoleh jika dilakukan penerapan dengan menggunakan semua indikator yang ada, baik ke arah positif maupun ke arah negatif. Oleh sebab itu, untuk kajian selanjutnya sebaiknya dapat digunakan pula indikator lainnya.

2. Salah satu indikator penting dalam kaitan dengan kualitas pendidikan ialah kelayakan guru mengajar, untuk jenjang pendidikan haruslah berijazah Sarjana/S1 atau Diploma 4 dan yang lebih tinggi untuk TK, SMP, SMP dan SM, sedangkan untuk PT harus berijazah S2 dan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan mutu di TK, SD, dan SMP menurun karena pada kenyataannya masih banyak guru TK yang berijazah SPG, guru SMP yang berijazah Diploma 2, demikian juga masih banyak guru SM yang berijazah Diploma 3 atau Sarjana Muda.
3. Keberhasilan pendidikan yang diindikasikan oleh kinerja dari indikator-indikator yang digunakan dalam kajian ini dipersyaratkan pula oleh indikator lainnya seperti sarana dan prasarana. Dalam kajian ini hanya digunakan data mengenai ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Oleh sebab itu, dalam kajian mendatang, perlu diikuti indikator sarana dan prasarana lainnya seperti ruang komputer, ruang UKS, dan indikator lainnya yang dapat membawa dampak terhadap kinerja pendidikan.
4. Indikator yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan indikator yang digunakan dalam Rencana Strategi tahun 2010-2014 yang lebih ditekankan pada Misi Pendidikan adalah 5 K.

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Statistik Persekolahan Taman Kanak-Kanak 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Statistik Persekolahan Sekolah Dasar 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Statistik Persekolahan Sekolah Dasar 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Pertama 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Pertama 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Atas 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Atas 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Kejuruan 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2011, *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Kejuruan 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Statistik Perguruan Tinggi 2011/2012*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Penelitian dan Pengembangan, 2002, *Pengkajian 13 Indikator Pendidikan 2001/2002*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Data dan Indikator untuk Penyusunan Program Pembangunan*, Jakarta: Biro Perencanaan

- Departemen Pendidikan Nasional, 2004, *Proyeksi Penduduk Indonesia per Provinsi menurut Usia Tahun 2000-2010*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Pendidikan Nasional, Tahun 2006-2007*, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*, Jakarta, Pusat Informasi dan Humas
- Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, 2011, *Statistik Madrasah 2011/2012*, Jakarta, Departemen Agama.
- International Consultative Forum on Educational For All, 1998, *Education for All: The Year 2000 Assesment*, Paris: UNDP, UNSECO, UNFPA, UNICEF, dan World Bank
- UNESCO, 2000, *Statistical Yearbook 1999*, UNESCO Publishing & Bernan Press.
- UNESCO/OECD, 2000, *Education at a Glance 1999*, UNESCO Publishing & Bernan Press.